

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR : 20 TAHUN 2014

TANGGAL : 21 MEI 2014

TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI
SELATAN TAHUN 2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta memperhatikan Rencana Kerja setiap SKPD lingkup Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Undang Undang 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015. Dalam proses penyusunan dokumen rencana tahunan ini dilakukan melalui empat pendekatan, yaitu pendekatan sinergitas perencanaan dari bawah dan perencanaan dari atas, serta pendekatan partisipatif, politis dan teknokratis. Berlandaskan empat pendekatan ini, maka disusunlah Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk Tahun 2015. Dokumen rencana tahunan ini merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013. Dalam menyusun RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 ini, senantiasa mempertimbangkan kondisi dan permasalahan daerah, serta arah kebijakan pembangunan tahun 2015 sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD dan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2020)

Arah kebijakan pembangunan Tahun 2015 diarahkan untuk mencapai sasaran program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, disamping itu juga tetap memperhatikan analisa kelayakan dan rasionalisasi pencapaiannya. Dalam mendukung capaian sasaran tersebut disusun program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan secara bersama-sama dan saling terkait, saling mendukung satu dengan lainnya. Keberhasilan pelaksanaan salah satu arah kebijakan juga turut menentukan keberhasilan agenda kebijakan lainnya. Dokumen Rencana RKPD sebagai dokumen yang sifatnya lebih operasional dimana terdapat 2 (dua) lampiran yaitu lampiran pertama memuat tema, prioritas RKPD dan arah kebijakan serta program prioritas yang sifatnya strategis dan lampiran kedua berupa matriks rencana program dan kegiatan prioritas setiap SKPD disertai dengan pagu anggaran yang sifatnya indikatif.

Dokumen rencana pembangunan Tahunan ini, sekaligus menjadi pedoman dalam proses penyusunan Rencana Kerja SKPD dan menjadi pedoman sinergitas bagi setiap pelaku pembangunan. Memperhatikan perkembangan lingkungan strategis Provinsi Sulawesi Selatan, maka titik berat pembangunan Tahun 2015 diarahkan pada upaya percepatan peningkatan posisi Sulawesi Selatan sebagai pilar utama pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan peluang pada setiap Daerah Kabupaten/Kota. Posisi Sulawesi Selatan dalam koridor 4 nasional berfokus pada peningkatan produksi komoditi unggulan sector pertanian, pengembangan industri utamanya industri pengolahan hasil-hasil pertanian, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah dalam membuka peluang kesempatan kerja, serta peningkatan kualitas infrastruktur wilayah berlandaskan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Dengan optimalisasi pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut, maka diharapkan dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya golongan ekonomi menengah kebawah dengan prinsip pemerataan yang berkeadilan.

Dokumen ini sekaligus menjadi acuan dalam mensinergikan program dan kegiatan antar Prioritas Pemerintah Daerah dengan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan dengan cakupan proses tersebut, maka RKPD Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi pokok;

1. menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat, karena memuat seluruh kebijakan publik,
2. menjadi pedoman dalam menyusun Renja-SKPD dengan melihat arah kebijakan pembangunan daerah dalam satu Tahun kedepan,
3. menciptakan kepastian Arah kebijakan dan Program Kegiatan Prioritas, yang merupakan komitmen Pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan, dan
4. menjadi acuan dalam menyusun Kebijakan umum anggaran dan Prioritas plafon anggaran sementara.

B. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun dengan maksud dan tujuan agar seluruh SKPD Provinsi menjadikan dokumen ini sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan SKPD sebagaimana Pasal 21 ayat (3) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Diharapkan seluruh SKPD Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyusun Renja-SKPD senantiasa mengacu kepada RKPD dengan memperhatikan dan mensinergikan beberapa hal sbb.:

1. Arah dan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam RPJMD dan RESTRA-SKPD;
2. Tema dan Prioritas RKPD Provinsi;
3. Indikator Kinerja yang ingin dicapai khususnya target dan indikator sasaran program dan kegiatan yang ingin dicapai;
4. Program dan Kegiatan telah disusun berdasarkan Skala Prioritas; dan
5. Sasaran utama yang ingin dicapai dari setiap kegiatan dalam Renja-SKPD.

Seluruh komponen diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, sehingga diharapkan meningkatnya hasil pembangunan daerah signifikan terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat didaerah Kabupaten dan Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

C. Dasar Hukum

Landasan hukum terhadap penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 adalah berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015. Sementara peraturan yang secara langsung terkait dengan penyusunan RKPD. antara lain adalah :

1. Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Pasal 120 sampai dengan pasal 130 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
3. Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;

4. Pasal 26 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.

D. Keterkaitan Perencanaan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan merupakan lanjutan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun sebelumnya. Rencana Tahunan ini merupakan penjabaran dari RPJMD Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan dan sifatnya operasional serta memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah sebagai landasan untuk melahirkan arah dan kebijakan pembangunan daerah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan memuat rencana program dan kegiatan Tahunan serta sasaran dan alokasi pembiayaan yang sifatnya indikatif dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Target dan indikator sasaran yang tertuang dalam Dokumen ini adalah terkait dengan target dan indikator sasaran program dan kegiatan yang akan dijabarkan kedalam Rencana masing-masing SKPD dan menjadi bahan pada bagi Kabupaten/Kota yang akan menyusun Perubahan RKPD. Dengan demikian diharapkan adanya sinkronisasi dan sinergitas antara sasaran dan tujuan pembangunan dapat dicapai secara bertahap setiap Tahunnya. Semua dokumen rencana pembangunan daerah memperlihatkan keterkaitan antar satu dengan lainnya dengan melihat target dan indikator sasaran masing-masing, sehingga diharapkan proses pembangunan terwujud dalam suatu sistem yang terencana, terpadu dan berkelanjutan.

Hubungan antara dokumen Pemerintah pusat dengan Pemerintah daerah tercermin dalam pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang jelas antar tingkat Pemerintahan antara lain termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Sebagai Wakil Pemerintah Diwilayah Provinsi. Besarnya distribusi keuangan didasarkan atas distribusi kewenangan, tugas dan tanggung jawab masing-masing. Demikian juga Pola hubungan keuangan antara pusat dan daerah didasarkan atas 4 (empat) prinsip, yaitu sebagai berikut.

1. urusan yang merupakan tugas pusat di daerah dalam rangka dekonsentrasi dibiayai dari dan atas beban APBN.
2. urusan yang merupakan tugas Pemda sendiri dalam rangka desentralisasi dibiayai dari dan atas beban APBD.
3. urusan yang merupakan tugas Pusat atau Daerah tingkat atasnya, yang dilaksanakan dalam rangka tugas pembantuan, dibiayai oleh Pusat atas beban APBN atau oleh Pemda tingkat atasnya atas beban APBD sebagai pihak yang menugaskan.
4. sepanjang sumber-sumber keuangan daerah belum mencukupi, maka Pemerintah Pusat memberikan sejumlah bantuan.

BAB II

EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 dapat dilihat pada pencapaian target dan indicator sasaran hingga akhir Tahun 2013. Program dan Kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan Tahun ini, dapat dilihat pada hasil pelaksanaan Renja dan RKA masing-masing SKPD, demikian juga perkiraan target dan indicator sasaran yang dicapai pada hingga Triwulan II Tahun 2014 ini. Capaian kinerja pelaksanaan pembangunan dapat diketahui dari uraian data dan informasi terkait dengan kondisi umum daerah, kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan, serta permasalahan pembangunan daerah. Hal tersebut diatas dapat diuraikan secara umum sebagai berikut.:

A. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Aspek Geografi dan Demografi

a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Letak Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan antara $0^{\circ}12' \sim 8^{\circ}$ Lintang Selatan dan $116^{\circ} 48' \sim 122^{\circ} 36'$ Bujur Timur, dengan ibukota Makassar. Wilayah ini berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat di sebelah utara yaitu Kabupaten Toraja Utara, dan Teluk Bone serta Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah timur yaitu Kabupaten Luwu Timur, kemudian berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah barat dan Laut Flores di sebelah timur. Luas wilayah khususnya wilayah daratan kurang lebih 45.764,53 km² atau , dimana sebagian besar wilayah daratnya berada pada jazirah barat daya Pulau Sulawesi serta sebagian lainnya berada pada jazirah tenggara Pulau Sulawesi.

Kondisi Kemiringan Wilayah Sulawesi Selatan yaitu 0 sampai 3 persen merupakan tanah yang relatif datar, 3 sampai 8 persen merupakan tanah relatif bergelombang, 8 sampai 45 persen merupakan tanah yang kemiringannya agak curam, lebih dari 45 persen tanahnya curam dan bergunung. Wilayah daratan terluas berada pada 100 hingga 400 meter DPL, dan sebahagian merupakan dataran yang berada pada 400 hingga 1000 meter DPL. Gunung Bawakaraeng di selatan, Gunung Lompobattang dan Rante Mario di Utara, dan pada bagian ntengah mebnetang bukit karst sepanjang Kab. Maros dan Pangkep.

Terdapat sekitar 65 sungai yang mengalir di Provinsi ini, dengan jumlah sungai terbesar ada di bagian utara wilayah Provinsi ini. Lima danau besar menjadi rona spesifik wilayah ini, yang tiga di antaranya yaitu Danau Matana, Danau Towuti dan Danau Mahalona di Kabupaten Luwu Timur, serta dua danau lainnya yaitu Danau Tempe dan Danau Sidenreng yang berada di Kabupaten Wajo. Sedang karakteristik geologi yang dicirikan oleh adanya berbagai jenis satuan batuan yang bervariasi.

Terdapat 67 aliran sungai mengalir berbagai kabupaten khususnya yang berada di dataran rendah. Di wilayah Luwu terdapat 25 aliran sungai. Kabupaten Tana Toraja, Enrekang, dan Pinrang dialiri oleh sungai terpanjang yakni sungai Saddang (150 km). DAS Jeneberang meliputi wilayah 8 (delapan) kabupaten di bagian selatan Sulawesi Selatan, termasuk kota Makassar, mencakup wilayah seluas 825,607 Ha dan kawasan hutan seluas 204,427 Ha. Sungai Walanae mengalir di kawasan Bone dan Wajo, sementara di Gowa dan Makassar mengalir sungai Jeneberang. Danau Tempe dan Sidenreng terdapat di Kabupaten Wajo dan sekitarnya, sementara di wilayah Luwu terdapat danau Matana dan Towuti. Pada wilayah bagian tengah wilayah Sulawesi Selatan, Formasi Walanae merupakan suatu formasi lapisan batuan pembawa air yang bersifat tertekan dengan debit kecil sampai sedang.

Berdasarkan klasifikasi tipe iklim menurut oldeman, Provinsi Sulawesi Selatan

memiliki 5 jenis iklim, yaitu Tipe iklim A termasuk kategori iklim sangat basah dimana curah hujan rata-rata 3500-4000 mm/Tahun. Wilayah yang termasuk ke dalam tipe ini adalah Kabupaten Enrekang, Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur. Tipe Iklim B, termasuk iklim basah dengan curah hujan rata-rata 3000 – 3500 mm/Tahun. Wilayah tipe ini terbagi 2 tipe yaitu (B1) meliputi Kabupaten Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Tipe B2 meliputi Gowa, Bulukumba, dan Bantaeng. Tipe iklim C termasuk iklim agak basah dengan Curah hujan rata-rata 2500 – 3000 mm/Tahun.

Tipe iklim C terbagi 3 yaitu Iklim tipe C1 meliputi Kabupaten Wajo, Luwu, dan Tana Toraja. Iklim C2 meliputi Kabupaten Bulukumba, Bantaeng, Barru, Pangkep, Enrekang, Maros dan Jeneponto. Sedangkan tipe iklim C3 terdiri dari Makassar, Bulukumba, Jeneponto, Pangkep, Barru, Maros, Sinjai, Gowa, Enrekang, Tana Toraja, Parepare, Selayar. Tipe iklim D dengan Curah hujan rata-rata 2000 – 2500 mm/Tahun. Tipe iklim ini terbagi 3 yaitu Wilayah yang masuk ke dalam iklim D1 meliputi Kabupaten Wajo, Bone, Soppeng, Luwu, Tana Toraja, dan Enrekang. Wilayah yang termasuk ke dalam iklim D2 terdiri dari Kabupaten Wajo, Bone, Soppeng, Sinjai, Luwu, Enrekang, dan Maros. Wilayah yang termasuk iklim D3 meliputi Kabupaten Bulukumba, Gowa, Pangkep, Jeneponto, Takalar, Sinjai dan Kota Makassar. Tipe iklim E dengan curah hujan rata-rata antara 1500 – 2000 mm/Tahun dimana tipe iklim ini disebut sebagai tipe iklim kering. Tipe iklim E1 terdapat di Kabupaten Maros, Bone dan Enrekang. Tipe iklim E2 terdapat di Kabupaten Maros, Bantaeng, dan Selayar.

Luas wilayah daratan Sulawesi Selatan 45.764,53 Km² atau 45.764.530 Ha, dan wilayah laut 998.370 km². Dari luas wilayah daratan yang digunakan untuk pengembangan sector pertanian seluas 4.566.820 Ha.

b. Potensi Pengembangan Wilayah

Penggunaan lahan pada wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 adalah sbb.:

Tabel. 2.1 Kondisi Penggunaan Lahan (Ha)
di Sulawesi Selatan Tahun 2012

No.	Kab / Kota	Lahan Sawah	Lahan Kering	Lainnya	Jumlah
1	Selayar	3,641	67,648	19,046	90,335
2	Bulukumba	22.458	78,464	14,545	115,457
3	Bantaeng	7.829	24,912	6,842	39,583
4	Jeneponto	16.897	49,841	8,241	74,979
5	Takalar	16.709	29,010	10,932	56,615
6	Gowa	33.656	103,998	50,679	188,333
7	Sinjai	14,766	48,374	18,856	81,996
8	Maros	26.002	102,419	33,491	161,912
9	Pangkep	16.682	68,092	26,457	111,231
10	Barru	13,818	42,538	61,116	117,472
11	Bone	89,018	190,979	175,903	455,900
12	Soppeng	27,567	68,386	54,047	150,000
13	Wajo	87,975	137,278	25,366	250,619
14	Sidrap	45,133	72,227	70,985	188,325
15	Pinrang	49,845	78,799	67,533	196,177
16	Enrekang	10.942	155,784	11,875	178,601
17	Luwu	39,637	233,735	26,653	300,025
18	Tana Toraja	10.761	115,005	43,989	205,755
19	Luwu Utara	27.757	495,556	226,945	750,258
20	Luwu Timur	23,088	318,893	324,136	666,177
21	Makassar	2,636	2,666	12,275	17,577
22	Parepare	923	6,541	2,469	9,933

23	Palopo	2,678	8,965	13,109	24,75
24	Toraja Utara	12,774	71,255	30,793	114,822

Sumber : Sulsel Dalam angka, 2013

Dari jumlah lahan sawah seluas 592.194 Ha. tersebut diatas, baru terdapat 367.957 Ha lahan yang sudah beririgasi, sehingga masih terdapat 244.237 Ha belum beririgasi. Lahan sawah yang beririgasi teknis seluas 161.066 Ha, beririgasi setengan teknis seluas 73.121 Ha, beririgasi sederhana seluas 41.443 Ha, sedangkan beririgasi Non PU seluas 92.327 Ha. Daerah yang sangat membutuhkan irigasi teknis adalah **Kabupaten Wajo** dengan luas lahan sawah yang belum beririgasi seluas 62.000 Ha. (71,6 persen) dari seluruh luas lahan sawah. Daerah ini akan dapat memicu tingkat produksi beras di Sulawesi Selatan.

Kawasan hutan terluas terdapat di Kabupaten Kepulauan Selayar yang mencapai 981.601,4 Ha. atau 28,68% dari total luas hutan negara yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan seluas 3.428.167,34 Ha. Kabupaten lain yang memiliki hutan negara yang relatif luas adalah Kabupaten Luwu Timur 734.755,48 Ha atau 17,75% dan Kabupaten Luwu Utara seluas 530.001,46 Ha. Luwu seluas 275.437,81 Ha, dan Kabupaten Bone seluas 124.325,44 Ha, serta Kabupaten Pangkep seluas 106.169,18 Ha. Kabupaten lainnya berada dibawah seratus ribu hektar.

Areal Kehutanan bertambah sebesar 715.355 Ha (21%) menjadi 3.428.167,34, H Ha. tetapi hutan lindung berkurang 12.002 Ha menjadi 1.221.558 Ha, hutan produksi terbatas berkurang sebanyak 250.697 Ha (51%) menjadi 237.854 Ha, hutan produksi biasa turun 19.000 Ha menjadi 112.641 Ha, Hutan suaka alam/wisata naik menjadi 1.026.793 Ha., sedangkan hutan produksi konversi hanya pada Kab. Luwu Utara dan Timur naik 100 % menjadi 248.552 Ha, kawasan perairan hanya di Selayar yaitu 580.765 Ha. Kawasan hutan terluas di Kabupaten Luwu Timur naik menjadi 734.755,48 Ha, Luwu Utara menjadi 530.001 Ha, dan Kabupaten Luwu 275.437,81 Ha. Selebihnya dibawah 100 Ha. Tiga daerah kawasan hutan terendah Kota Pare-pare 2.312,6 Ha, Kab. Bantaeng 5.792 Ha, Takalar 7.536 Ha, serta Jeneponto 9.599 Ha, dan Palopo 9.321 Ha.

Areal Perkebunan sebesar 671.923 Ha meliputi: Areal perkebunan rakyat 669.438 Ha dan yang terluas merupakan areal tanam Coklat sebesar 275.723 Ha dengan produksi mencapai 196.695 Ton, Kelapa dalam areal tanam seluas 111.048 Ha dengan produksi mencapai 82.045 Ton, Jambu mete 63.818 Ha, dengan produksi 19.733 Ton, kemudian Kopi Arabika 43.960 Ha, dengan produksi 21.798 Ton, Kopi robusta 26.440 Ha, dengan produksi sebesar 10.343 Ton, kemudian cengkeh 44.524 Ha dengan produksi mencapai 16.385 Ton. Areal perkebunan besar 15.079,51 Ha. Kondisi ini menunjukkan produktifitas lahan belum maksimal untuk mendukung pencapaian target dalam RPJMD.

Dari luas kawasan hutan Sulawesi Selatan terdapat hutan lindung seluas 1.221.558,96 Ha, dimana yang terluas adalah Kabupaten Luwu Utara 362.214 Ha, dan Luwu Timur 240.775 Ha. Hutan produksi terbatas yang terluas adalah Kabupaten Bone 80.478,30 Ha. Hutan produksi biasa terbesar di Kabupaten Gowa dengan luas 26.932,84 Ha. Kawasan perairan terbesar adalah Kabupaten Kepulauan Selayar seluas 530.765 Ha, dan Kabupaten Pangkep seluas 50.000 Ha. Luasan kawasan hutan umumnya memperlihatkan penurunan luasan setiap Tahun, hal ini perlu menjadi perhatian minimal dapat mempertahankan untuk kelestarian SDA dan LH. di masa datang.

Penggunaan lahan sebagai sawah terbesar terdapat di Kabupaten **Bone** dan Kabupaten **Wajo**. Dimana sebahagian besar berupa sawah tadah hujan yang luasnya mencapai 641,95 km² di Kabupaten Bone dan 657,80 km² di Kabupaten Wajo. Penggunaan lahan sebagai sawah yang menggunakan irigasi teknis terbesar terdapat di Kabupaten **Pinrang** dan Kabupaten **Sidenreng Rappang**. Penggunaan

lahan sawah irigasi mencapai 375,75 km² di Kabupaten Pinrang dan 298,90 km² di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sementara di Kabupaten Bone dan Wajo penggunaan sumber dari irigasi teknis masih rendah atau perlu mendapat perhatian.

c. Demografi

Perkembangan penduduk Sulawesi Selatan hingga Tahun 2013 memperlihatkan peningkatan dengan tingkat pertumbuhan penduduk dari Tahun 2010 hingga Tahun 2013 sebesar 1,2 persen. Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2012 adalah sebesar 8.190.222 jiwa, kemudian pada Tahun 2013 mencapai 8.324.265 jiwa dengan pertumbuhan 1,1 persen. Jumlah penduduk terbesar Tahun 2012 di Kota Makassar yang merupakan pusat kegiatan perekonomian dan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk sebesar 1.368.473 jiwa. Terendah adalah Kab. Selayar 124.319 jiwa dan Pare-pare yaitu 131.970 jiwa. Kepadatan penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2011 adalah 177 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi Makassar 7.786 jiwa/km² kemudian Kota pare-pare 1.329, Palopo 615, Takalar 484, Bantaeng 453 jiwa/km². Kepadatan terendah Kab. Luwu utara 36 jiwa dan Luwu timur 36 jiwa/km²

Tabel 2.2 Penduduk Menurut Kelompok Umur
Sulawesi Selatan, Tahun 2012

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
0 – 4	414.976	391.291	806.207	105.90
5 – 9	451.100	423.854	874.504	106.26
10 – 14	436.605	412.744	849.349	105.61
15 – 19	376.776	375.495	752.271	100.18
20 – 24	334.693	356.875	691.572	93.63
25 – 29	325.286	351.711	676.997	92.34
30 – 34	303.599	328.303	631.902	92.33
35 – 39	297.836	314.529	612.365	94.54
40 – 44	259.191	279.780	538.971	92.49
45 – 49	206.260	230.110	436.370	89.49
50 – 54	171.763	190.740	362.503	89.91
55 – 59	131.534	142.396	273.930	92.22
60 – 64	104.184	128.693	232.877	80.82
65 – 69	78.512	97.930	176.422	72.87
70 – 74	52.447	71.777	124.224	58.34
75 +	58.889	90.399	149.228	47.29
Jumlah total	4,003,655	4,186,576	8,190,222	

Sumber : Sulsel dalam angka 2013

Jumlah penduduk di Sulawesi Selatan pada Tahun 2013 diproyeksikan mencapai sebesar 8.342.000 jiwa dengan pertumbuhan penduduk 1,13 persen (data resmi 2013 dari BPS). Penduduk usia produktif adalah penduduk yang masih memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaannya dan tidak bergantung kepada orang lain. Kelompok usia produktif sebesar 4.370.922 Jiwa (53 persen) meliputi usia 15-50 Tahun. Penduduk jenis **kelamin wanita** terbesar di Kabupaten Bone sebesar 379.853 dengan sex ratio 90,84 dan terkecil dikota Makassar. Dan yang terkecil jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Luwu Timur dengan jumlah sebanyak 119.103 dengan Sex Ratio 106,14 persen. Penduduk laki-laki terbesar di Kota Makassar dan yang terkecil di Kota Pare-Pare.

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Upaya peningkatan pendapatan masyarakat yang berlandaskan pada pemerataan yang berkeadilan, maka dilaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan pada bidang strategis utamanya yang terkait dengan pemenuhan dasar dan kebutuhan hidup yaitu pendidikan dan kesehatan serta permukiman dan perbaikan pendapatan melalui perluasan kesempatan kerja. Kemampuan untuk memperoleh dari semua kebutuhan dasar ini akan mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Cerminan perkembangan hasil-hasil pembangunan dengan indikator kinerja yaitu persentase tingkat pengangguran mengalami penurunan dari 5,87 persen (208.983) Tahun 2012 menjadi 5,19 persen (187.983) Tahun 2013. Angka Penduduk miskin diatas 20 persen berturut-turut yaitu yang tertinggi di Kabupaten Jeneponto, Pangkep, Enrekang. Dibawah 10 persen yaitu Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kabupaten Sidrap.

Kondisi struktur ekonomi Sulawesi Selatan termasuk didalamnya rancangan pola permintaan barang dan jasa yang mempengaruhi struktur produksi termasuk pola konsumsi dari masyarakat. Selama ini pengukuran struktur ekonomi dihitung berdasarkan persentase sumbangan masing-masing aktivitas ekonomi yaitu sembilan sektor yang terdapat dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga yang berlaku. Nilai PDRB ADHB Tahun 2013 sebesar 184.780 Milyar rupiah dan yang tertinggi konsumsi sebesar 146.150 Milyar dan Investasi sebesar 55.480 Milyar rupiah sementara masih terjadi Defisit Neraca Perdagangan dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 7,64 persen. Hal lain yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kualitas tingkat pendapatan masyarakat antara lain dilihat kemampuan daya beli masyarakat yang pada Tahun 2012 sebesar 644,580 dan pada Tahun 2013 diharapkan mencapai 649,600. Namun kondisi ini belum dapat mengurangi indeks ketimpangan (Gini Ratio 0,41)

Daerah Sulawesi Selatan menyandang predikat sebagai lumbung pangan nasional khususnya padi, jagung, umbi-umbian dan kacang-kacangan. Produksi padi sawah Tahun 2012 mencapai 5,478.916 juta ton yang dipanen dari luas areal 881.814 Ha. atau rata-rata 5,08 ton per hektar. Data ini mengalami kenaikan sebesar 0,05 ton per Ha. Areal tanam padi sawah 965.523 ha. Produksi padi terbesar di Sulawesi Selatan berturut-turut adalah Kabupaten Bone mengalami kenaikan menjadi 685.462 ton, Kabupaten Pinrang naik menjadi 498.162, Kabupaten Wajo turun menjadi 421.650 ton, sedang Kabupaten Sidrap juga turun menjadi 327.054 ton. Untuk produksi jagung Tahun 2012 mencapai 1.515.328 ton dimana Kabupaten terbesarnya dan mengalami kenaikan adalah Kabupaten Gowa 220.572 ton dan Kabupaten Bone 255.254 ton. Jeneponto sebesar 253.600 ton kemudian Kabupaten Bantaeng sebanyak 165.783 ton. Untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah keempat daerah ini perlu penerapan teknologi pengolahan.

Produksi tanaman perkebunan Tahun 2012, khususnya Kakao sebesar 176.587 Ton terbesar Luwu Utara sebanyak 34.199 ton dan Luwu sebanyak 33.979 ton, Kelapa 80.795 terbesar di selayer 24.180 ton dan 33.498 ton untuk kopi 33.498 Ton meliputi Kopi robusta sebesar 12.235 ton terbesar di Sinjai dan Kopi Arabika sebesar 21.263 Ton terbesar di Enrekang. Komoditi ini sebahagian besar dihasilkan dari perkebunan rakyat sementara peran perkebunan besar (swasta) relatif sangat kecil.

Tabel 2.3 PDRB (ADHB)

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
1. Pertanian	25.071,81	28.008,21	30.361,21	34.788,23	39.518,44
-T.Pangan	11.872,49	13.555,19	14.766,81	16,890.98	19.253,34
-Perkebunan	5.549,53	6.046,59	6.224,39	6,932.85	7.150,47
-Peternakan	1.206,54	1.364,31	1.541,82	1,732.13	2.027,49
-Kehutanan	98,08	112,51	122,50	138.05	149,11
-Perikanan	6.345,17	6.929,60	7.705,98	9,094.22	10.938,03
2.Pertambangan dan galian	6.201,50	5.503,78	7.168,66	8,345.85	8.803,05
3. Industri Pengolahan	11.060,44	12.514,89	14.457,60	16,789.29	19.492,46
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	838,10	949,24	1.087,97	1,245.91	1.439,21
5. Bangunan	4.253,53	5.387,79	6.534,51	7,760.90	9.109,83
6.Perdagangan,hotel,dan restoran	13.913,80	16.690,29	20.434,51	24,236.35	28.349,56
7. Pengangkutan dan Komunikasi	6.972,02	7.953,95	9.445,57	10,849.77	12.982,89
8.Keuangan	5.203,00	6.241,52	7.810,11	9,513.69	11.803,27
9. Jasa-Jasa	11.629,00	16.704,94	20.529,72	23,859.82	27.928,39
PDRB Sulawesi Selatan	85.143,19	99.954,59	117.830,27	137.389,81	159.427,10

Sumber : prov. sul sel dalam angka 2013

Produksi tanaman perkebunan Tahun 2012, khususnya Kakao, Kelapa dan Kopi yang masing-masing memproduksi sebanyak 176.587 ton untuk Kakao, 80.795 ton untuk kelapa dan 33.498 ton untuk kopi, dimana sebahagian besar dihasilkan dari perkebunan rakyat sementara peran perkebunan besar (swasta) relatif sangat kecil yaitu 972 Ton untuk Kakao, 159 ton untuk kelapa dan 1.009 ton untuk Kopi. Produksi Kakao terbesar didominasi oleh Kabupaten Luwu Utara sebanyak 34.199 ton dan Luwu sebanyak 33.979 ton. Produksi Kelapa terbesar didominasi oleh Kabupaten Selayar sebanyak 24.180 Ton. Perkembangan Produksi Kopi Tahun 2012 mencapai 33.498 Ton meliputi Kopi robusta sebesar 12.235 ton dan Kopi Arabika sebesar 21.263 Ton. Produksi Kopi Robusta terbesar di Kabupaten Sinjai sebanyak 2.803 ton sedang kopi arabika terbesar diproduksi oleh Kabupaten Enrekang sebanyak 7.933 ton. Kondisi ini memperlihatkan kabupaten mana yang perlu mendapat perhatian untuk mendukung pencapaian target produksi komoditi unggulan sektor perkebunan di Provinsi Sulawesi Selatan hingga Tahun 2013.

Populasi ternak sapi Tahun 2012 mencapai 1.121.110 ekor, ternak kerbau 99.016 ekor, kambing 513.858 ekor, sedangkan produksi sektor perikanan total produksi ikan hasil tangkapan dan budidaya sebesar 2.036.522,7 ton dengan nilai hasil produksi mencapai 7,98 Trilyun rupiah. ya sebesar 2.036.522,7 ton dengan nilai hasil produksi mencapai 7,98 Trilyun rupiah. Demikian juga produksi hasil hutan terdiri dari kayu dan non kayu (rotan,damar) dimana produksi kayu naik hingga 12.689 meter kubik demikian juga produksi rotan, getah pinus dan damar mengalami kenaikan dari Tahun sebelumnya. Untuk Rotan mencapai 251.138 ton,

getah pinus 1.407.602 ton.

Tabel 2.4 Indikator Makro Ekonomi (ADHB)
Sulawesi Selatan Tahun 2008 - 2013

Indikator Makro	2009	2010	2011	2012	2013**
Pertumbuhan Ekonomi (ADHK)	6,23	8,19	7,61	8,37	7,64
Pendapatan Perkapita (juta rupiah)	12,63	14,67	16,93	19,48	21,10
Investasi (Triliun rupiah)	23,29	27,92	34,88	46,41	55,48
Ekspor (Triliun rupiah)	28,58	36,42	30,14	31,45	32,7
Impor (Triliun rupiah)	27,26	39,67	35,43	45,97	49,6

Sumber Data : BPS SulSel

Secara umum Sulawesi Selatan mengalami defisit neraca perdagangan, mulai pada Tahun 2010 hingga Tahun 2012. Kondisi ini dipengaruhi oleh besarnya impor bahan bakar mineral, alat elektronik dan otomotif serta makanan olahan. Sementara laju kenaikan nilai ekspor masih relatif melambat khususnya sektor pertambangan (al. Nikel), dan komodity sektor pertanian hasil olahan

Pada era globalisasi, eksistensi keberadaan beberapa pelaku usaha didaerah umumnya yang terkait dengan sektor pertanian masih mengalami ketertinggalan akibat dari kualitas manajemen usaha (SDM) dan ketidakmampuan bersaing dengan berbagai produk lainnya yang beredar dipasaran khususnya barang barang impor (tehnologi dan inovasi). Demikian juga pertumbuhan sektor industri pengolahan (agor-industri), disamping itu masih mengalami masalah dalam mengakses permodalan pada lembaga keuangan yang ada didaerah seperti Bank Rakyat yang ditawarkan Pemerintah melalui berbagai program perkreditan.

b. Kesejahteraan Sosial

Perkembangan pembangunan sumberdaya manusia dilihat dari aspek kualitas dan kuantitas ketenagakerjaan, berdasarkan data statistik ketenagakerjaan Tahun 2013 menunjukkan perbaikan dari Tahun 2010 yaitu jumlah angkatan kerja sebanyak 3.628.288 orang, dimana jumlah yang bekerja mencapai 3.439.305 orang terdapat yang bekerja kurang dari 35 Jam seminggu (setengah menganggur) 1.254.965 orang atau 35,3 persen berarti yang bekerja penuh mencapai 64,7 persen. Penduduk yang sedang mencari kerja (penganggur murni) 188.983 (5,2 persen) dibandingkan Tahun 2011 sebesar 236.926 orang. Jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan akibat inflasi yang tinggi dari 805.910 orang (9,8 persen) menjadi 857.450 jiwa Tahun 2013 atau 10,2 persen.

Tabel 2.5 Kondisi Ketenagakerjaan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012

Kabupaten / Kota	Angkatan Kerja		Jumlah	Penduduk Usia 15 Tahun ke atas	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Partisipasi Angkatan Kerja (%)
	Bekerja	Pencari Kerja				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Selayar	52.226	2.565	54.791	85.805	3,25	62.72
2 Bulukumba	169.567	9.796	179.363	282.797	2,71	68.42
3 Bantaeng	76.823	4.503	81.326	126.361	7,02	72.20
4 Jenepono	148.183	7.890	156.073	244.430	4,35	66.98

5	Takalar	116.802	6.846	123.648	194.651	6,21	62.33
6	Gowa	277.060	21.029	298.089	458.460	4,01	62.08
7	Sinjai	95.654	5.663	101.317	158.469	2,84	73.06
8	Maros	133.867	9.990	143.857	223.263	6,43	64.31
9	Pangkep	129.103	8.379	137.482	214.653	8,03	57.57
10	Barru	70.288	4.288	74.576	118.393	4,78	56.75
11	Bone	308.168	19.603	327.771	514.845	3,51	64.84
12	Soppeng	100.335	5.461	105.796	168.205	6,15	62.05
13	Wajo	174.317	14.036	188.353	290.208	3,13	59.92
14	Sidrap	118.720	5.960	124.680	196.858	6,99	57.19
15	Pinrang	146.463	10.269	156.732	243.620	5,35	54.96
16	Enrekang	76.608	5.467	82.075	125.602	3,05	74.50
17	Luwu	134.791	10.792	145.583	222.324	10,55	59.67
18	Tana Toraja	89.224	5.257	94.481	145.663	4,63	76.25
19	Luwu Utara	120.961	5.663	126.624	195.058	53,03	65.63
20	Luwu Timur	103.754	8.005	111.759	164.521	8,12	67.32
21	Toraja Utara	82.566	5.314	87.880	138.839	5,08	68.29
22	Makassar	541.050	49.668	590.718	962.867	9,97	57.94
23	Pare-pare	50.829	4.401	55.230	89.600	4,21	60.37
24	Palopo	58.139	6.081	64.220	102.493	8,43	59.64
Jumlah		3.351.908	208.983	3.560.891	5.667.985	5,87	62,82

Sumber : Statistik Sosial Sul Sel 2013

Struktur ketenagakerjaan merupakan aspek yang penting dalam pembangunan ekonomi, karena tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi utama. Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan indikator yang dapat menggambarkan keadaan penduduk yang berumur 15 Tahun keatas yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Untuk penduduk usia 6-15 Tahun merupakan sasaran kebijakan pendidikan gratis dengan program wajib belajar 9 Tahun, dan mulai Tahun 2013 dicanangkan program wajib belajar 12 Tahun.

Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2012 mencapai 8.190.222 jiwa dimana Penduduk yang bekerja pada sektor pertanian menurun dari 48,10 % menjadi 47,38 % (1.599.354 jiwa) dari jumlah penduduk Usia Kerja 15 Tahun keatas. Masih tingginya jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan aktifitas penduduk terhadap sektor pertanian masih sangat tinggi. Sebagian besar daerah di Provinsi Sulawesi Selatan penduduknya bekerja pada sektor pertanian. Hanya penduduk Kota Makassar dan Kota Parepare yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor non pertanian yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Kinerja perekonomian Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari Tahun 2011 pertumbuhan 7,61 persen dan Tahun 2012 naik menjadi 8,37 persen, capaian ini akibat meningkatnya nilai ekspor khususnya sektor pertambangan. Pada Tahun 2013 mengalami penurunan akibat tingginya tingkat inflasi dan turunnya kemampuan daya beli masyarakat. Laju pertumbuhan ini dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berfluktuasi setiap tahunnya. Secara lebih terinci dapat dilihat pada penggunaan nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Penggunaan PDRB Tahun 2012 yang terbesar adalah digunakan untuk konsumsi Rumah Tangga sebesar 75.27 Triliun rupiah, Ekspor 31.45 Triliun rupiah, dan Import. 45.97 Triliun rupiah. Kemudian konsumsi Pemerintah sebesar 50.99 Triliun rupiah, dan untuk Investasi sebesar 46.41 Triliun rupiah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa 80 persen PDRB 2012 digunakan untuk konsumsi, dimana hal ini sangat mempengaruhi pergeseran tingkat inflasi.

Secara umum tingkat inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro

yang dapat mencerminkan kondisi perekonomian suatu daerah. Tingkat inflasi pada Tahun 2011 sebesar 3,7 persen dan tahun 2013 naik hingga 4,6 persen. Kondisi ini memperlihatkan turunnya nilai uang akibat dari naiknya harga barang dan jasa. Hal ini akan berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat walaupun indeks daya beli 2012 mengalami kenaikan dari indeks 63,9 menjadi indeks 64,7 namun kenaikannya sangat lambat akibat inflasi. Untuk mengatasi inflasi perlu dilakukan melalui kebijakan moneter seperti mengendalikan peredaran uang dan kebijakan fiskal seperti pengendalian belanja Pemerintah ataupun menaikkan suku bunga bank. Kedua kebijakan ini berada diluar kendali pemerintah kecuali terhadap pengendalian harga, menaikkan produksi dan menstabilkan upah/gaji.

PDRB Sulawesi Selatan atas dasar harga berlaku pada Tahun 2012 meningkat dari sekitar 117,83 Trilyun rupiah menjadi 137,40 Trilyun rupiah, dengan kontribusi sektor pertanian sebesar menurun dari 27,98 menjadi 25,35 persen sementara oleh sektor perdagangan, restoran dan hotel naik 0,37 persen menjadi 17,58 persen. Secara umum pertumbuhan tersebut di atas rata-rata pertumbuhan PDRB Nasional.

Dari aspek penawaran, karakteristik penting yang melekat dalam proses pertumbuhan PDRB adalah pergerakan Rancangan struktur ekonomi yang signifikan dengan penambahan nilai setiap sektor pembangunan. Komponen utama dari Rancangan struktural ini meliputi pergeseran secara bertahap kegiatan-kegiatan dari bidang usaha pertanian ke bidang usaha industri khususnya industri pengolahan. Struktur perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan dari Tahun keTahun (yoy) memperlihatkan sedikit pergeseran dari sektor pertanian ke sektor industri dan perdagangan.

**Tabel 2.6 Struktur Ekonomi Provinsi Sul Sel
ADHK Tahun 2008 s.d 2012**

Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012	2013
Pertanian	28,02	25,77	25,35	24,55	23,90
Pertambangan Galian	5,51	6,08	6,71	5,39	5,99
Industri Pengolahan	12,52	12,27	12,19	12,16	12,21
Listrik,Gas, Airbersih	0,95	0,92	0,92	0,90	0,89
Konstruksi	5,39	5,55	5,62	5,67	5,84
Perdagangan	16,71	17,34	17,59	17,78	17,88
Angkutan Komunikasi	7,96	8,02	7,90	8,16	8,05
Keuangan, Persewaan	6,24	6,63	6,89	7,40	7,89
Jasa-Jasa	16,71	17,42	17,37	17,52	17,52
Jumlah	100	100	100	100	100

Sumber Data : BPS 2012

Pergeseran struktur ekonomi dimana peranan sektor pertanian 5 (lima) tahun secara kumulatif cenderung menurun dari 28,02 persen Tahun 2009 menurun menjadi 23,90 tahun 2013, hal ini disebabkan oleh peningkatan aktifitas perekonomian ataupun mata pencaharian masyarakat bergeser pada sektor perdagangan, jasa , dan sektor bangunan. Sementara yang diharapkan adalah peningkatan di-sektor industri pengolahan khususnya Non Migas melalui program Agro-Indusri, sangat lambat dimana sektor ini masih didominasi khususnya industri logam, makanan dan kerajinan kayu. Dengan penekanan pada pengembangan Agro-industri diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah hasil

produksi pertanian melalui industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan pertumbuhan sektor industri pengolahan semakin baik. Pergeseran kesektor industri belum sesuai dengan target sasaran pembangunan yang diharapkan tahun 2013.

Secara umum perkembangan sektor pertanian telah dapat mempengaruhi perkembangan terhadap nilai tukar petani 2009 yaitu sebesar 101,63 menjadi 104 Tahun 2011. Perkembangan Pendapatan perkapita Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 19,48 juta rupiah dan pada Tahun 2013 mencapai 21,4 Juta rupiah dengan jumlah penduduk 8.190.222 jiwa. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi sulawesi selatan semakin baik selama lima Tahun terakhir. Pendapatan perkapita tertinggi di Kabupaten Luwu Timur adalah dipicu oleh sumbangan pertumbuhan sektor pertambangan dan galian khususnya pertambangan Nikel. Fluktuasi pertumbuhan pertambangan nikel juga sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011	2012*
Jeneponto	4,610,849	5,498,174	6,634,117	7,730,819	8,890,871
Tana Toraja	5,109,776	5,728,578	6,658,056	8,053,762	9,755,778
Toraja Utara	5,235,498	5,868,904	6,917,434	8,319,159	9,987,988
Takalar	5,885,433	6,890,922	7,622,678	8,696,171	9,997,927
Gowa	5,529,628	6,723,419	7,783,598	8,993,574	10,128,896
Maros	5,729,993	6,822,748	8,144,361	9,432,271	10,743,536
Selayar	6,471,168	7,600,677	9,272,673	11,242,919	13,721,681
Bulukumba	6,967,180	8,304,680	9,537,341	10,755,395	12,580,775
Barru	7,460,311	8,723,197	10,036,580	11,358,620	13,032,438
Enrekang	7,210,200	8,557,801	10,099,496	11,925,764	13,841,220
Bantaeng	7,140,044	8,728,416	10,366,630	12,209,399	14,131,695
Bone	7,540,910	8,985,077	10,492,627	12,188,533	14,234,064
Luwu Utara	8,254,408	9,399,879	10,673,524	12,298,014	14,195,395
Luwu	8,264,778	9,698,354	11,181,456	12,956,485	14,856,356
Soppeng	8,718,841	10,360,170	12,189,646	14,195,790	16,315,876
Sinjai	8,763,212	10,535,799	12,293,670	13,994,793	15,975,743
Sidrap	9,057,342	10,949,482	12,381,995	15,350,303	17,777,949
Palopo	9,926,422	11,409,601	13,160,423	15,291,036	17,272,388
Parepare	10,315,544	11,900,669	13,893,981	15,881,651	17,997,404
Wajo	10,257,960	12,148,525	14,046,563	17,111,133	19,904,208
Pinrang	10,810,450	12,891,200	15,068,399	17,529,224	20,267,796
Pangkep	12,776,755	15,187,789	17,594,543	20,766,938	24,668,919
Kota Makassar	20,066,123	23,690,417	27,645,085	32,118,182	37,019,698
Luwu Timur	30,055,724	27,013,744	34,123,050	39,387,454	41,056,857

Tabel 2.7 Perkembangan Pendapatan Perkapita
Kabupaten/Kota (Rp.Juta) 2008 – 2012

Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan pendidikan yaitu terletak pada akses masyarakat dalam mendapatkan layanan pendidikan dasar hingga menengah, khususnya dalam menuntaskan wajib belajar sembilan Tahun. Hal ini sangat terkait dengan pendidikan gratis khususnya pembiayaan yang harus di alokasikan, antara lain pengadaan buku dan berbagai bentuk bantuan biaya pendidikan yang sasarannya bagi yang masyarakat miskin. Ketersediaan dan penyebaran fasilitas pendidikan yang kurang memadai dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan

Fasilitas yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya strata pendidikan.

Kualitas penyelenggaraan pendidikan juga membutuhkan perhatian khusus, kualitas dimaksud adalah terkait dengan standarisasi, proses pembelajaran, kompetensi luaran, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, serta pembiayaan dan penilaian.

Perekembangan capaian indikator utama indeks pembangunan manusia Tahun 2011 belum mencapai target yang diharapkan sebesar 72,77, hal ini disebabkan lambatnya kenaikan angka melek huruf disamping keterbatasan kapasitas anggaran pembangunan dibandingkan banyaknya target dan sasaran yang harus dicapai. Melihat lambatnya capaian indikator indeks pembangunan manusia tersebut diatas khususnya angka melek huruf, maka target RKPD Tahun 2013 akan sulit dicapai jika melihat masih kurang fokusnya alokasi anggaran khususnya untuk mendukung indikator pendidikan yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah dalam APBD Tahun 2013.

Tabel 2.8 Indeks Pembangunan Manusia

Human Development Indeks	Satuan	2009	2010	2011	2012	Provinsi Sulawesi Selatan 2009- 2012
Indeks Pembangunan Manusia		70,94	71,62	72,14	72,70	
Angka Harapan Hidup	Tahun	69,83	70,00	70,20	70,45	
Angka Melek Huruf	%	87,22	87,76	88,07	88,73	
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,35	7,42	7,92	7,95	
Daya Beli (Rupiah)	Ribu	635,500	636,600	640,300	643,590	

Oleh sebab itu target Tahun 2013 harus dilakukan percepatan dengan mengalokasikan anggaran pada kedua indikator pendidikan tersebut yaitu pemberantasan buta huruf peningkatan rata-rata lama bersekolah. Dengan demikian, maka target indeks pembangunan manusia Tahun 2013 diharapkan dapat dipacu hingga mencapai sebesar 73,16.

Peningkatann Indeks daya beli dari Tahun 2010 hingga 2012 juga belum memperlihatkan percepatan yang lebih baik. Kondisi ini diakibatkan oleh adanya kesenjangan tingkat pendapatan masyarakat yang cukup tinggi dimana angka gini ratio Tahun 2011 naik 0,01 point hingga mencapai 0,40 (semakin jauh dari angka 0.). Tahun 2013 diharapkan dapat ditekan hingga dibawah 0,39 Sehingga daya beli masyarakat dapat mencapai diatas 649.990. Pola konsumsi masyarakat yang tidak efisien dan efektif, dimana dari pengeluaran perkapita masyarakat sebesar 636.600 yang terbesar adalah untuk belanja barang dan jasa (pesta dan upacara, perumahan, kendaraan) mencapai 412.600, sedangkan untuk kebutuhan pokok pendidikan, sandang pangan hanya 224.000. Kondisi ini meperlihatkan perlunya perbaikan pola hidup yang konsuntif khususnya pola konsumsi masyarakat dan termasuk perlunya perbaikan pola pengeluaran Pemerintah.

Di kalangan petani dan nelayan, anak lebih banyak dipandang sebagai aset produktif ketimbang sebagai "media" investasi (melalui pendidikan dan keterampilan). Sikap dan wawasan ini juga tercermin dari rendahnya pengeluaran rata-rata masyarakat untuk pendidikan. Walau pun tetap perlu digaris bawahi bahwa alokasi belanja yang relatif sangat kecil itu terutama disebabkan oleh karena porsi terbesar dari pendapatan telah terserap pada pemenuhan kebutuhan pangan dan non pangan.

Masalah pokok pada bidang kesehatan terkait dengan belum optimalnya penerapan pola hidup sehat dan rendahnya derajat kesehatan lingkungan dalam masyarakat, rendahnya akses terhadap layanan kesehatan terutama pada masyarakat terpencil dan pulau-pulau terluar serta belum mantapnya manajemen pembangunan kesehatan dan daya tanggap terhadap penyakit yang berbahaya yang banyak menyebabkan kematian a.l. HIV/AIDS, demam berdarah, Gizi buruk, dan sebagainya. Ketersediaan pangan yang terjangkau oleh daya beli masyarakat juga merupakan akar masalah dalam upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, karena sangat terkait dengan kualitas gizi masyarakat.

3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

a. Layanan Bidang Sosial Budaya

Data dan informasi terkait dengan bidang sosial dibatasi pada hal hal yang memerlukan percepatan pembangunan khususnya sektor pendidikan dan kesehatan serta beban ketergantungan penduduk. Untuk melihat dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan yang telah dilakukan baik oleh Pemerintah maupun pihak swasta, dalam uraian selanjutnya akan disajikan berbagai indikator pendidikan, diantaranya angka partisipasi sekolah, angka putus sekolah, rasio murid-guru dan sekolah, angka melek huruf, serta rata-rata lama bersekolah. Demikian juga dengan dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan pada sektor kesehatan yang disajikan dalam bentuk perkembangan indikator makro bidang kesehatan.

Kekayaan dan keragaman budaya dalam tatanan Sulawesi Selatan sangat bervariasi sebagai satu rumpun budaya yang terdiri dari Bugis, Makassar, dan Toraja memberi nuansa tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Gambaran ini menunjukkan keragaman budaya yang tersebar pada wilayah yang beragam pula. Di balik keragaman tersebut, terdapat pula keragaman sistem nilai dan norma serta adat-istiadat yang spesifik. Variasi-variasi ini terkait pula dengan potensi kearifan lokal yang bisa berkembang dalam tatanan sosial budaya. Selain itu, terkandung pula potensi berkembangnya interaksi sosial dan komunikasi lintas budaya, yang dapat mendorong dinamika Rancangan secara lebih kreatif dalam menanggapi perkembangan zaman.

Percepatan pembangunan khususnya di sektor pendidikan, diarahkan pada pelaksanaan program wajib belajar 9 Tahun yang lalu dilanjutkan pada wajib belajar 12 Tahun yang telah dicanangkan Pemerintah didukung oleh kebijakan pendidikan gratis serta dapat dikatakan berhasil karena diiringi dengan meningkatnya fasilitas pendidikan; seperti peningkatan jumlah sekolah, jumlah kelas, dan tenaga pengajar. Keadaan tersebut dapat dicerminkan dengan meningkatnya daya tampung pada setiap jenjang pendidikan dan meningkatnya perbandingan anak didik dan guru.

Tabel 2.9 Rasio **Murid terhadap Guru** dan Ratio **Murid terhadap Sekolah**
Menurut Kabupaten Kota Tahun 2012

Kabupaten/ Kota	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Selayar	7,88	4,63	14,36	113.27	129.90	259
02. Bulukumba	10,80	11,89	21,97	156.01	308.35	328
03. Bantaeng	9,58	8,79	26,49	184.67	328.83	256
04. Jeneponto	19,96	10,35	30,94	202.53	369.53	332
05. Takalar	9,66	9,98	14,31	160.31	308.35	269
06. Gowa	15,94	6,73	17,02	204.51	348.28	193
07. Sinjai	10,45	5,10	24,06	137.70	289.20	190
08. Maros	13,45	9,40	13,92	174.79	290.52	229
09. Pangkep	15,31	6,98	14,20	165.87	275.86	196
10. Barru	8,69	5,30	19,99	115.94	225.41	257
11. Bone	11,42	5,55	20,36	152.56	327.41	370
12. Soppeng	10,21	8,97	12,65	112.88	309.28	316
13. Wajo	11,97	13,14	18,47	129.92	299.27	395
14. Sidrap	16,29	13,18	14,38	156.58	309.37	294
15. Pinrang	14,24	16,35	17,06	176.22	413.02	455
16. Enrekang	11,99	5,10	17,49	138.22	274.72	320
17. Luwu	12,49	5,48	17,58	179.84	204.68	632
18. Tator	13,16	4,94	15,10	223.62	227.29	434
19. Luwu Utara	8,95	3,89	18,59	131.35	244.36	236
20. Luwu Timur	17,01	8,26	6,83	236.50	409.24	251
21. Makassar	25,38	8,69	21,52	181.28	317.28	399
22. Pare-Pare	11,21	3,26	13,45	326.42	305.27	289
23. Palopo	15,39	6,86	14,31	239.42	784.95	558
24. Toraja Utara	95,52	10,64	18,46	181.28	234.41	

Rasio murid terhadap guru dapat juga diartikan bahwa seorang guru dapat mengawasi sejumlah anak didik/murid. Tahun 2011, pada jenjang pendidikan dasar seorang guru mengawasi sekitar 17 murid, pada jenjang pendidikan menengah sekitar 16 murid dan pada jenjang pendidikan atas sekitar 14 murid. Dari informasi tersebut mencerminkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan semakin sedikit murid yang diawasi oleh seorang guru sehingga kualitas daya serap murid lebih baik. Selain itu, angka-angka tersebut secara umum lebih baik apabila dibandingkan dengan Tahun-Tahun sebelumnya.

Kecenderungan yang terjadi selama periode 2008-2012, pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan atas perbandingan antara murid dan guru semakin kecil atau dengan kata lain seorang guru mengawasi murid yang semakin kecil. Baik pada sekolah dasar, sekolah menengah maupun pada sekolah lanjutan memperlihatkan keterbandingan antara murid dan guru yang semakin membaik. Pada Tahun 2008 rasio murid terhadap guru pada jenjang SD, SMP dan SMA masing-masing adalah 17,44; 14,99, dan 14,74 selama tiga (3) Tahun kemudian rasio untuk SD sedikit menurun jadi 16,56 tetapi SLTP dan SLTA mengalami kenaikan, yaitu 16,03; dan 15,03.

Perbandingan antara murid dan sekolah, mencerminkan besarnya daya tampung anak usia sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan. Pada jenjang pendidikan dasar setiap sekolah dapat menampung anak didik sebanyak 173 orang, pada jenjang menengah 385 anak didik dan jenjang pendidikan atas 449 anak didik selama Tahun 2012. Selama periode 2008-2012, pada jenjang pendidikan dasar dan menengah kecenderungan daya tampungnya (Rationya) cenderung meningkat.

Capaian bangunan sekolah Tahun 2012 untuk tingkat TK/RA sebanyak 3.727 sekolah, SD/MI sebanyak 6.858 sekolah, untuk SMP/MMTs sebanyak 2.028 sekolah, SLA/MA sebanyak 7.52 sekolah. Untuk SMK sebanyak 282 SDLB sebanyak 47 sekolah. Kondisinya menunjukkan bahwa ketersediaan sekolah untuk menampung penduduk usia sekolah berdasarkan jenjang pendidikan sudah semakin membaik.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dasar masyarakat dalam arti masyarakat dapat mengakses seluruh hak dasar masyarakat, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyelenggarakan berbagai pelayanan umum khususnya yang terkait dengan pemenuhan hak dasar. Gambaran umum mengenai penyelenggaraan berbagai pelayanan dimaksud diuraikan berdasarkan indikator-indikator kinerja pelayanan sebagai berikut:

Dalam membangun kualitas sumberdaya manusia dapat dilihat pada perkembangan hasil-hasil pembangunan pada layanan pendidikan dan pelayanan kesehatan, layanan air bersih serta layanan aspek ketenagakerjaan. Layanan pendidikan dan kesehatan adalah terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia, meliputi Indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli, rata-rata lama sekolah, ketersediaan sekolah, rasio guru/murid/sekolah, Angka partisipasi sekolah merupakan jumlah siswa kelompok usia sekolah 7-12 Tahun untuk tingkat pendidikan SD/MI dan 13-15 Tahun yang bersekolah di tingkat pendidikan SMP/MTs. Pada Tahun berkenaan dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun dan 13-15 Tahun. Rasio murid terhadap guru menurun dari Tahun 2008 hingga 2009 yaitu pada jenjang pendidikan dasar seorang guru mengawasi 17,8 murid menjadi 15,01 Murid, SMP/Mi sekitar 14,9 murid menjadi 12,01 murid, dan SLA/Ms 13,9 murid menjadi 11,7 murid. Ini menunjukkan pelayanan dan pengawasan terhadap murid semakin membaik. Sedangkan ratio Murid terhadap Sekolah Dasar dari 331 menjadi 346, SLTP dari 227 menjadi 242, dan SLA dari 165 menjadi 168. Hal ini menunjukkan daya tampung anak usia sekolah cenderung semakin membaik.

Indikator yang sangat mempengaruhi rendahnya capaian Indeks Pembangunan Manusia adalah Angka Melek Huruf. Hingga Tahun 2009 IPM baru mencapai angka 70,09 kemudian menjadi 71,62 pada Tahun 2010 dan pada Tahun 2011 diharapkan dapat dicapai angka 72,99. Untuk Tahun 2012 Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan sebesar 74, namun rata-rata kenaikan setiap Tahun hanya bertambah 0,70, oleh sebab itu maka diproyeksikan Tahun 2013 dapat dicapai 74,25. Berdasarkan kriteria UNDP nilai IPM kurang dari 50 digolongkan sedang, 51 hingga 79 digolongkan menengah dan diatas 79 digolongkan tinggi. Angka buta huruf Tahun 2010 menurun dari 12,98 persen menjadi 12,25 persen dan diharapkan dengan dukungan Kabupaten/Kota Tahun 2013 penduduk yang buta huruf dapat ditekan turun hingga 10 persen. Kemudian Angka rata-rata lama sekolah naik dari 7,40 menjadi 7,84 (rata-rata bersekolah dicapai hingga kelas 2 SMP) dan diharapkan Tahun 2013 meningkat hingga 8,49 Tahun atau anak-anak bersekolah hingga kelas 3 SMP.

Terkait dengan angka partisipasi kasar (APK) sekolah tingkat SD/MI pada Tahun 2008 mencapai 109,25 persen dan menjadi 114,26 persen pada Tahun

2010, dan untuk tingkat SMP/MTs. pada Tahun 2008 mencapai 70,77 persen dan menjadi 71,68 persen pada Tahun 2010, kemudian untuk tingkat SLTA 37,20 persen menjadi 37,06 persen Tahun 2010. Capaian ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah tingkat SD/MI pada Tahun 2008 mencapai 1/165 dan menjadi 1/170 pada Tahun 2010, dan untuk tingkat SMP/MTs. pada Tahun 2008 mencapai 1/318 dan menjadi 1/344 pada Tahun 2010, serta SLTA meningkat dari 1/394 menjadi 1/437.

Indikator pembentukan IPM khususnya buta huruf secara lebih rinci Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota dari Tahun ke Tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10 Jumlah Penduduk Buta Huruf di atas 14 % Tahun 2008 s/d 2012

No.	Urutan	TAHUN				
		2008	2009	2010	2011	2012
	Kabupaten /Kota	%	%	%	%	%
1	Jeneponto	23,52	22,80	22,73	22,59	22,58
2	Bantaeng	23,42	22,49	21,02	20,43	19,9
3	Gowa	20,22	19,75	18,08	17,67	17,40
4	Takalar	19,91	19,25	18,2	18,15	16,90
5	Wajo	18,03	17,31	16,47	15,03	15,01
6	Maros	17,11	17,10	17,03	16,90	16,02
7	Toraja Utara	17,70	17,00	16,20	16,17	14,15
	Sulawesi Selatan	13,47	12,98	12,25	11,93	11,27

Sumber data BPS Sul Sel 2013

Indikator lain yang dapat mencerminkan tentang kondisi pembangunan di bidang pendidikan adalah rata-rata lama sekolah. Angka ini menggambarkan secara umum jenjang pendidikan dan tingkat pendidikan selama kurun waktu 5 Tahun terakhir. Angka ini cenderung mengalami kelambatan dalam peningkatan. Dari data memperlihatkan bahwa sampai dengan Tahun 2011 rata-rata lama sekolah mencapai 8,19 artinya rata-rata penduduk Provinsi Sulawesi Selatan bersekolah hingga kelas 3 SLTP.

Kondisi tersebut di atas secara langsung mempengaruhi peningkatan angka indeks pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Selain angka melek huruf yang mempengaruhi secara langsung indeks pendidikan adalah rata-rata lama sekolah. Indeks pendidikan pada Tahun 2010 baru mencapai 75,9. Jika dibandingkan dengan angka nasional, maka Sulawesi Selatan masih dibawah angka nasional. Oleh sebab itu dengan program wajib belajar 9 Tahun serta rancangan ke wajib belajar 12 Tahun perlu didukung dengan kebijakan pendidikan gratis sehingga kualitas peningkatan rata-rata lama sekolah akan lebih baik.

**Tabel 2.11 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 hingga 2012**

Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011	2012*
1. Jeneponto	5,9	5,9	6,20	6,23	6,23
2. Bantaeng	5,8	5,9	6,0	6,10	6,46
3. Wajo	5,8	6,1	6,22	6,51	6,60
4. Takalar	6,2	6,2	6,42	6,46	6,99
5. Maros	6,5	6,5	6,62	6,90	7,08
6. Pangkep	6,5	6,6	6,73	6,94	7,07
7. Gowa	6,4	6,6	6,83	7,23	7,24
8. Sinjai	6,6	6,7	6,74	7,07	7,08
9. Bulukumba	6,4	6,7	6,97	7,11	7,11
10. Selayar	6,6	6,8	6,95	7,07	7,26
Sulawesi Selatan	7,2	7,35	7,84	6,72	7,95

Sumber
Data :
IPM Sul
Sel 2013.

Perkembangan layanan kesehatan dapat digambarkan oleh beberapa indikator kesehatan meliputi rasio fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dokter, dan rasio puskesmas, rasio rumah sakit per satuan penduduk, rasio dokter per satuan penduduk, rasio tenaga medis per satuan penduduk. Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan status kesehatan penduduk, ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana merupakan salah satu faktor yang penting. Capaian rasio fasilitas kesehatan per sepuluh ribu penduduk tidak mengalami Rancangan yang berarti yaitu dari 2,6 pada Tahun 2007 menjadi 2,9 pada Tahun 2010, dimana fasilitas kesehatan ini meliputi Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu dan Puskel. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat.

Ketersediaan tenaga kesehatan sangat mempengaruhi kualitas pelayanan pada masyarakat. Rasio tenaga kesehatan dari Tahun 2008 dari 14,7 per 10.000 meningkat menjadi 17,9 per 10.000 penduduk Tahun 2010. Capaian rasio dokter per satu fasilitas kesehatan mengalami penurunan dari 2,0 pada Tahun 2005 menjadi 1,0 pada Tahun 2010. Hal ini karena banyaknya tenaga dokter yang lebih suka bekerja di Rumah Sakit sementara di Puskesmas, Pustu dan Puskel sangat sedikit. Berdasarkan fasilitas pelayanan ini maka angka harapan hidup Tahun 2008 sebesar 69,6 kemudian pada Tahun 2010 mencapai 70,08 Tahun.

Perkembangan fasilitas layanan kesehatan Tahun 2010 masih didominasi oleh Pemerintah, hal ini diperlihatkan pada jumlah Rumah Sakit Umum Pemerintah sebanyak 28 Unit bangunan dan Rumah Sakit Khusus Pemerintah 7 Unit, sementara Rumah Sakit Umum Swasta sebanyak 15 Unit dan Rumah Sakit Khusus Swasta sebanyak 16 Unit, dan Rumah Sakit Umum TNI sebanyak 7 Unit. Fasilitas layanan kesehatan di Kabupaten/Kota berupa Puskesmas, Pustu dan Puskel seluruhnya disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota. Fasilitas layanan kesehatan ini juga didukung oleh Pos Yandu Paripurna yang akses pelayanannya sampai ke Desa-desa dan Kelurahan di Kabupaten/Kota.

Dalam mendukung optimalisasi pemanfaatan sarana fisik fasilitas kesehatan dipersiapkan berupa tenaga kesehatan sebanyak 15.792 orang yang terdiri dari Dokter sebanyak 2.867 orang, Bidan sebanyak 3.771 orang, serta Perawat sebanyak 9.154 orang. Tenaga dokter terbesar adalah Kota Makassar sebanyak 1.239 dokter dan di Kabupaten Gowa sebanyak 171 dokter, dan Maros sebanyak 108 orang.

Tabel 2.12 Perkembangan Fasilitas Kesehatan
Tahun 2009 s.d Tahun 2012

Fasilitas Kesehatan	2009	2010	2011	2012
Rumah Sakit	73 RS	73 RS	77 RS	78 RS
Puskesmas	401	413	423	431
Puskesmas Pembantu	1,210	1,210	1,267	1.284
Puskesmas keliling	348	348	47	450
Posyandu Paripurna	8,944	8,944	9,151	9,183

Sumber Data : Sul Sel dalam angka.

b. Layanan Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Berusaha untuk mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai pusat pelayanan (main-hubs), sebagai simpul utama sistem transportasi nasional dan internasional dan pusat pelayanan regional dan nasional. Pembangunan infrastruktur wilayah diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan tersebut melalui peningkatan aksesibilitas fisik antar daerah dan antar kawasan guna mendukung kelancaran aktifitas perekonomian dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Pergerakan lalu lintas udara pada Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin menunjukkan adanya peningkatan baik pada pergerakan penumpang maupun pergerakan barang yang ditunjukkan pada jumlah pesawat pada Tahun 2008 berjumlah 49.584 menjadi 73.077 pada Tahun 2011 dengan rata-rata jumlah pesawat 200 perhari. Sedangkan pergerakan penumpang pada Tahun 2008 berjumlah 4.706.189 orang meningkat menjadi 7.455.408 orang pada Tahun 2011 dengan rata-rata jumlah penumpang 20.426 orang/hari.

Pergerakan lalu lintas menunjukkan adanya peningkatan pada arus peti kemas maupun pada arus penumpang pada Pelabuhan Laut Makassar yang ditunjukkan pada arus peti kemas domestic bongkar pada Tahun 2008 berjumlah 2.178.079 Ton menjadi 4.380.522 Ton pada Tahun 2012, sedangkan arus pasti kemas domestic muat pada Tahun 2008 berjumlah 1.706.179 Ton meningkat menjadi 2.741.782 Ton pada Tahun 2011. Arus peti kemas impor pada Tahun 2008 berjumlah 18.002 Ton meningkat menjadi 32.070 Ton pada Tahun 2011 dan arus peti kemas ekspor pada Tahun 2008 berjumlah 197.410 Ton meningkat menjadi 453.371 Ton pada Tahun 2011. Arus penumpang naik maupun turun pada Pelabuhan Makassar mengalami penurunan, yang diperkirakan dipengaruhi oleh meningkatnya animo masyarakat untuk menggunakan angkutan udarah yang ditunjukkan oleh jumlah arus penumpang pada Tahun 2008 berjumlah 936.479 orang dan pada Tahun 2011 menjadi 839.327 orang.

Panjang dan kondisi jalan di Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2011 mencapai 2.970,03 Km yang terdiri dari 1.722,79 Km jalan nasional dan 1.147,51 Km jalan Provinsi. Jaringan jalan nasional menunjukkan kondisi yang relative baik yaitu 92% kondisi baik dan 8% dalam kondisi rusak ringan dan berat. Khusus untuk jalan Provinsi kondisi perkerasannya cukup bervariasi yakni 458,54 Km jalan dalam kondisi baik atau 39,86%, 399,33 Km jalan dalam kondisi sedang atau 34,80% ,209,06 Km jalan dalam kondisi rusak ringan atau 18,22% ,74,58 Km jalan dalam kondisi rusak atau berat 6,50% dan sisanya 6.00 Km atau 0,52 belum tembus. Keadaan tersebut mengindikasikan bahwa kondisi jalan Provinsi di Sulawesi Selatan masih berkinerja rendah, sehingga belum optimal untuk mendukung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat. Untuk itu diperlukan

peningkatan kinerja dengan melakukan pembangunan dan perbaikan konstruksi pada ruas-ruas jalan yang kerusakannya cukup parah, sehingga pelayanan transportasi dapat meningkatkan yang pada akhirnya akan berimplikasi pada peningkatan produktifitas masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan.

Kinerja layanan irigasi sebagai Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) merupakan infrastruktur utama dalam mendukung pemenuhan produksi pangan. Luas sawa di Provinsi pada Tahun 2011 seluas 862.112 Ha, yang terdiri dari jaringan beririgasi teknis seluas 635.555 Ha atau 73.723 persen, daerah rawa sawah seluas 54.700 Ha atau 6,34 persen dan sawah tadah hujan seluas 171.857 Ha atau 19,93 persen. Jaringan sawah beririgasi teknis di Provinsi Sulawesi Selatan seluas 635,55 Ha Terdiri dari sawah beririgasi kewenangan Pemerintah seluas 218,92 Ha atau 34,45 persen, sawah beririgasi kewenangan Provinsi seluas 41.868 Ha atau 6,58 persen, dan sawa beririgasi kewenangan kabupaten/kota seluas 374.768 Ha atau 58,97 persen. Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah menunjukkan kondisi yang relatif baik yaitu 54% irigasi dalam kondisi baik, dan 46% dalam kondisi rusak ringan dan berat. Sedangkan untuk jaringan irigasi kewenangan Provinsi kondisi baik seluas 16.329 Ha atau 39%, kondisi rusak sedang 15.491 Ha atau 37 persen, kondisi rusak ringan seluas 5.022 Ha atau 12%, dan kondisi rusak berat seluas 16.329 Ha atau 39%.

Besarnya jumlah jaringan irigasi dalam kondisi rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat banyak terjadi di daerah irigasi yang potensial menyumbang pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Menurunnya fungsi jaringan atau (termasuk rawa) disebabkan oleh tingginya tingkat kerusakan karena umur konstruksi, bencana alam dan kurang optimalnya kegiatan operasi dan pemeliharaan di samping rendahnya keterlibatan petani dan *stakeholders* lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi. Selain itu, kondisi debit sungai yang airnya digunakan untuk kebutuhan irigasi sangat fluktuatif antara musim hujan dan musim kemarau. Berkembangnya daerah pemukiman dan industri telah menurunkan area resapan air dan mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air.

Pemenuhan kebutuhan air baku baik untuk kebutuhan rumah tangga sebagaimana target MDGs dan untuk kebutuhan jaringan irigasi sangat membutuhkan keandalan dalam menyediakannya. Keandalan penyediaan air baku di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini di pengaruhi oleh belum terpenuhinya kebutuhan infrastruktur penampungan air berupa waduk, benungan, bendung dan embung serta belum optimalnya fungsi dan kapasitas tampungan air yang ada. Kondisi ini di perpara oleh kualitas operasi dan pemeliharaan yang rendah. Air sebagai sumber kehidupan juga berpotensi daya rusak akibat kegiatan pembangunan yang kurang memperhatikan daya dukung dan keberlanjutan lingkungan hidup. Dalam hal potensi daya rusak air, terjadi perluasan dampak kerusakan akibat banjir khususnya pada kawasan rawan banjir, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang RTRWP Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Jeneponto, Maros, Pangkep, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone, Pinrang, Luwu dan Luwu Timur. Selain itu juga di Provinsi Sulawesi Selatan terjadi fenomena meluasnya kerusakan pantai akibat abrasi yang mengancam keberadaan permukiman dan pusat-pusat perekonomian di sekitarnya.

Sistem kelistrikan Provinsi Sulawesi Selatan saat ini di pasok dari pembangkit-pembangkit yang terhubung ke sistem interkoneksi 150 kV dan 70 kV. Kapasitas pembangkit listrik Provinsi Sulawesi Selatan yang bersumber dari PLN pada Tahun 2011 memiliki daya mampu sebesar 700,50 MW sedangkan beban puncak yang hanjur dilayani sebesar 664,22 MW. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini kemampuan daya pembangkit yang ada telah mampu memenuhi kebutuhan

listrik, sehingga ,tujuan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Nasional dan Simpul Jejaring Akseleserasi Kesejahteraan melalui perwujudan Sulawesi Selatan sebagai pusat bisnis dan industri serta pintu masuk di Kawasan Timur Indonesia yang didukung oleh kecukupan, keandalan dan mutu pasokan listrik dapat tercapai.

Pertumbuhan kebutuhan energi listrik di Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 Tahun terakhir mencapai rata-rata 7,7% per Tahun. Ratio elektrifikasi Sulawesi Selatan pada Tahun 2011 sebesar 74,59% yang menunjukkan bahwa masih ada seekitar 26,41% atau 452,440 KK yang belum terjangkau oleh aliran listrik dan umumnya berada di daerah perdesaaan dan kepulauan. Sedangkan ratio desa berlistrik pada Tahun 2011 sebesar 84,36%, yang menunjukkan bahwa masih ada sekitar 15,64% atau 465 desa yang belum berlistrik. Pemenuhan kebutuhan energi listrik tersebut sangat memungkinkan untuk dipenuhi mengingat Provinsi Sulawesi Selatan memiliki beberapa jenis sumber energi terbarukan untuk dikembangkan, antara lain energi air yang bisa dikembangkan menjadi PLTA potensinya mencapai 2,946,8 MW dan yang bisa dikembangkan menjadi PLTM potensinya mencapai 80 MW. Selain itu, terdapat potensi gas alam yang berada di Kabupaten Wajo dengan cadangan terukur sebesar 377,3 BSCF atau setara dengan 400 MW dan baru di mamfaatkan untuk PLTGU sebesar 195 MW dan potensi panas bumi sebesar 337 Mw.

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah upaya pemenuhan hak dasar msyarakat akan kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau. Pemenuhan kebutuhan akan perumahan yang layak dan terjangkau melalui pembangunan perumahan sampai saat ini masih dilaksanakan oleh Pemerintah malalui Kementrian Perumahan Rakyat , Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Perum Perumnas dan swasta melalui pengembang yang tergabung dalam asosiasi penyelenggaraan pembangunan perumahan. Pembangunan perumahan di Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan yang layak dan terjangkau, yang kesenjangan pemenuhannya (backlog) pada Tahun 2011 mencapai 203.714 unit rumah. Pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh Perum Perumnas dan asosiasi pengembangan (REI) sampai Tahun 2011 mncpai 88.261 unit rumah, yang menunjukkan bahwa pembangunan perumahan hanya dapat memenuhi 43,3% kebutuhan perumahan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan dalam bentuk pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum di lingkungan hunian. Prasarana, sarana dan utilitas umum pada kawasan perumahan yang dibangun dimaksudkan untuk mendukung pencapaian kawasan perumahan yang sehat dan mendukung pencapaian target MDGs melalui pembangunan sarana dan prasarana air bersih serta penanganan sanitasi dasar dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Pencapaian peningkatan cakupan pelayanan akan air minum dan penyehatan lingkungan pada Tahun 2011 sudah menunjukkan hasil yang memadai yang ditunjukkan dengan cakupan pelayanan air bersih diperkotaan sebesar 66% melalui pembangunan sistem jaringan air minum perdesaan pada 268 kawasan. Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi dasar permukiman guna memenuhi kebutuhan layanan perumahan dan sanitiasi pada Tahun 2011 telah mencapai sebesar 80%,yang pencapaiannya dilaksanakan melalui pembangunan drainase lingkungan pada kawasan permukiman sepanjang 95.295,5 M. Pembangunan jalan lingkungan sebagai upaya meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui pembangunan jalan lingkungan permukiman sampai Tahun 2011 telah terbangun jalan sepanjang 247.460,62 M pada kawasan perumahan.

c. Layanan Bidang Ekonomi

Perkembangan hasil-hasil pembangunan pada bidang ekonomi meliputi pembangunan sektor pertanian sebagai sektor basis khususnya ketersediaan pangan yang terjangkau dan aman, perkembangan investasi dan ekspor, layanan pengembangan Koperasi dan UMKM, serta akses terhadap permodalan melalui lembaga keuangan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Koperasi dan UMKM telah memberikan sumbangsih dalam proses pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan jumlah Koperasi dan UMKM, berdasarkan data Koperasi dan UMKM di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan sebesar 14,37 % dari 7.017 unit pada Tahun 2008 menjadi 8.026 unit pada Tahun 2012. Adapun perkembangan jumlah Koperasi aktif mengalami peningkatan sebesar 4,26 % dari 5.327 unit Tahun 2008 menjadi 5.554 unit pada Tahun 2012. Perkembangan jumlah anggota Koperasi juga mengalami peningkatan sebesar 8,21 % dari 1.097.668 orang pada Tahun 2008 menjadi 1.187.797 orang pada Tahun 2012. Sedangkan data akhir Tahun 2012, diketahui jumlah pelaku UMKM di Sulawesi Selatan mencapai 909.670 unit. Dari data tersebut menunjukkan bahwa UMKM merupakan pelaku ekonomi yang dominan karena mencapai 75% dari seluruh pelaku ekonomi yang ada di Sulawesi Selatan.

Ditinjau dari penerapan tenaga kerja pada Tahun 2012, UMKM mampu menyerap sebanyak 2.185.217 orang tenaga kerja, atau mengalami kenaikan sebesar 16,49 % apabila dibandingkan Tahun 2008 sebanyak 1.875.826 orang tenaga kerja. Bahwa dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang relatif besar, sektor ini telah menjamin stabilitas pasar tenaga kerja, penekanan pengangguran dan menjadi wahana bangkitnya wirausaha baru serta tumbuhnya wirausaha nasional yang tangguh dan mandiri. Dengan memperhatikan peran dan potensinya dalam perekonomian daerah keberadaan Koperasi dan UMKM terbukti merupakan pelaku usaha mandiri, kukuh dan fleksibel, dalam kondisi normal maupun krisis sekalipun. Bahkan tidak disangkal oleh siapapun bahwa Koperasi dan UMKM memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap ekonomi daerah. Ia dapat menjadi jantung ekonomi rakyat dan pelopor pertumbuhan ekonomi rakyat.

**Tabel 2.13 Perkembangan Koperasi
Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012**

J U M L A H				
TAHUN	KOPERASI	KOPERASI AKTIF	TIDAK AKTIF	ANGGOTA
2008	7.017	5.327	1.690	1.097.668
2009	7.096	5.333	1.763	1.114.433
2010	7.497	5.105	2.392	1.128.384
2011	7.958	5.452	2.506	1.130.354
2012	8.026	5.554	2.472	1.187.797

Sumber : dinas koperasi & ukm

Untuk meningkatkan pendapatan ataupun output riil, maka dibutuhkan peningkatan nilai dari ekspor yaitu penjualan barang dan jasa keluar negeri yang kemudian diperoleh pembayaran sebagai penerimaan dalam mata uang asing (*Visible Export*). Kondisi neraca pembayaran Sulawesi Selatan memperlihatkan pertumbuhan nilai import lebih besar dari nilai export (*devisit net export*). Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian agar nilai ekspor kita semakin baik. Perkembangan nilai ekspor terbesar terdapat 5 (lima) komoditas (*data tahun 2012 belum terbit*) yaitu Nikel, Biji Kakao, Udang segar, Kopi Arabika, dan Karet. Komoditi ekspor yang nilainya dibawah 20.000 US\$ yaitu Dedak Gandum dengan nilai ekspor sebesar US\$ 19.413.637, Kayu Olahan nilai ekspor mencapai US\$ 18.773.050, kemudian Ikan Laut segar mencapai US\$, 15.969.474, dan Telur Ikan Terbang sebesar US\$: 11.401.225. Komoditi lain nilai ekspornya berada dibawah US\$: 10.000

**Tabel 2.14 Perkembangan Nilai Ekspor Terbesar
Tahun 2008 - Tahun 2011**

No	Uraian	T a h u n				
		Juta	2008	2009	2010	2011
1	Eksport Nikel	US\$	1.380,069.327	760,951.748	1.687.767.921	1.242.620.558
2	Biji Kakao	US\$	299,125.532	364,066.100	403.161.030	156.576.796
3	Udang Segar	US\$	58.671.200	46.231.000	52.760.400	49.572.100
4	Kopi Arabika	US\$	18.566.929	15.299.964	25.319.263	9.504.209

Sumber Data : BPS Sul Sel.

Investasi merupakan sumber penggerak aktifitas perekonomian dan sangat penting bagi perkembangan pembangunan guna menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkat jika didukung dengan optimalisasi pengelolaan (*natural resours*) dengan dukungan yang kuat dari pertambahan faktor-faktor produksi terkait dengan sumberdaya modal (*capital resours*). Perkembangan hasil-hasil pembangunan pada bidang urusan Penanaman Modal meliputi jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA), jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA), rasio daya serap tenaga kerja dan Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN.

Capaian jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) tidak mengalami Rancangan yakni sebanyak 5 unit dari Tahun 2007 hingga Tahun 2009, capaian jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) tidak mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 6.637.924.773 pada Tahun 2007 hingga Tahun 2009, capaian rasio daya serap tenaga kerja mengalami peningkatan dari 19 persen pada Tahun 2007 menjadi 21 persen pada Tahun 2009. Meningkatnya volume investasi yang masuk ke Provinsi Sulawesi Selatan akan mendorong peningkatan aktifitas perekonomian khususnya pengembangan dunia usaha.

Dukungan dari dunia usaha dalam mencapai sasaran pembangunan adalah dengan meningkatkan investasi yang program dan kegiatannya diarahkan pada pengembangan dan peningkatan sektor pertanian khususnya Agro-indutri dan Agro-bisnis dimana kegiatan kegiatan ini banyak membuka peluang kerja ataupun menyerap tenaga kerja sehingga dapat menekan angka pengangguran ataupun penduduk miskin. Hal lain adalah dapat membangun kerjasama antara Usaha Besar dengan Usaha Kecil dan Menengah.

**Tabel 2.15 Banyaknya proyek dan Nilai Modal PMDN/PMA
Yang disetujui Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2008 s.d Tahun 2011**

No.	Uraian	Nilai Investasi dan Jumlah Investor				
		Satuan	2008	2009	2010	2011
1	Nilai Proyek PMDN	(Rp Juta)	110.524.94	1.137.863.41	3.212.295.18	3.986.302.70
2	Nilai Proyek PMA	(000-US \$)	27.696.51	76.982.85	441.796.13	89.559.25
3	Jumlah proyek PMDN	Persetujuan	4	6	23	23
4	Jumlah proyek PMA	Persetujuan	12	6	34	34
5	Sektor Pertanian (000)		-	20.000	22.133.851	24.133.851
6	Sektor Industri	-	13.937	7.093	9.392	8.930
7	Sektor Jasa	-	6.429	19.504	19.504	19.504

Tenaga kerja yang terserap pada sektor ekonomi pada Tahun 2009 sebanyak 3,2 juta pekerja, dimana terdapat 49,30 persen bekerja pada sektor Primer (Pertanian) 27,24 persen pada sektor Sekunder (Industri), dan 23,46 persen pada sektor Tersier (Jasa). Besarnya persentase penyerapan tenaga kerja sektor pertanian karena Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai potensi yang relatif besar untuk pengusahaan tanaman bahan makanan seperti padi, tanaman perkebunan, perikanan, dan peternakan.

Dalam mendukung Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional dimana hal terkait dengan perkembangan hasil hasil pembangunan pada bidang urusan pertanian meliputi produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar, kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB, kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB, kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB, kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB dan cakupan bina kelompok petani.

Capaian produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar mengalami peningkatan dari 52,58 Kw/Ha pada Tahun 2005 menjadi 54,45 Kw/Ha pada Tahun 2009, kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB mengalami penurunan dari 48,89 persen pada Tahun 2005 menjadi 40,23 persen pada Tahun 2009, kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB mengalami penurunan dari 20,66 persen pada Tahun 2005 menjadi 17,68 persen pada Tahun 2009, kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB mengalami penurunan dari 4,01 persen pada Tahun 2005 menjadi 3,26 persen pada Tahun 2009.

Laus Panen Tahun 2009 dan 2010 seluas 862.017 Ha 886.354 Ha. Produktifitas mencapai 50,16 Kw/Ha, dan 49,44 Kw/Ha. Jumlah produksi padi mencapai 4.324.178 Ton, dan 4.382.442 Ton. Untuk Tahun 2011 Laus Panen 907.555 Ha dengan produktifitas mencapai 49,75 Kw/Ha, dengan jumlah produksi padi mencapai 4.514.849 Ton (kenaikan 3,02 %)

Perkembangan produktifitas beberapa komoditi pada sector pertanian tanaman pangan dan hortikultura dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.16 Kondisi Capaian Produksi Pangan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012**

No	Kabupaten/Kota	Produksi Tanaman (Ton)				
		Padi	Jagung	Ubi	Kedelai	Kacang
1.	Bone	714.341	255.254	23.945	10.909	7.991
2	Pinrang	528.927	73.531	9.953	1.052	131
3	Wajo	701.403	46.409	8.727	1.872	229
4	Sidrap	454.947	54.972	4.355	122	690
5	Luwu	47.197	13.704	4.571	620	120
6	Soppeng	267.188	48.881	2.100	2.322	450
7	Gowa	266.059	220.572	269.318	1.100	972
8	Maros	242.267	21.288	40.994	4.526	3.019
9	Bulukumba	222.567	122.351	47.988	69	4.156
10	Sulawesi Selatan	5.002.300	1.515.328	777.469	29.938	50.024

Sumber Data : Sul Sel dalam angka.

Perkembangan hasil-hasil pembangunan pada bidang urusan pariwisata meliputi kunjungan wisata dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB. Kunjungan wisata merupakan jumlah capaian kinerja kunjungan wisata sekabupaten dibandingkan dengan jumlah seluruh kunjungan wisata sekabupaten sedangkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB merupakan jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata dibandingkan dengan jumlah PDRB.

Capaian kunjungan wisata khususnya wisatawan Mancanegara mengalami peningkatan dari 31.215 orang pada Tahun 2008 menjadi 35.712 orang pada Tahun 2009 dan pada Tahun 2010 meningkat lagi menjadi 42.371 orang, kemudian pada Tahun 2011 dan Tahun 2012 tetap meningkat masing-masing 51.749 dan 65.000 dan diharapkan pada Tahun 2013 bisa mencapai 100.000 orang, dengan kondisi ini diharapkan kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi semakin membaik. Secara lebih rinci berbagai kondisi capaian indikator pembangunan bidang urusan pariwisata dari Tahun ke Tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.17 Perkembangan Kondisi Capaian Indikator Pembangunan
Bidang Urusan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2008 s.d Tahun 2012**

N	Uraian	T a h u n Kunjungan					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013*
1	Wisatawan Nusantara	2.032.021	2.715.715	3.768.252	4.471.632	4.850.000	4.950.000
2	Wisatawan Mancanegara	31.215	35.712	42.371	51.749	64.601	100.000

Sumber Data : Indikator sosial 2013

Sasaran untuk mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai 5 besar daerah tujuan wisata terkemuka di Indonesia, sejajar dengan destinasi utama di Indonesia seperti Bali, dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan yang diharapkan 2013 dapat mencapai 5 juta. Program kegiatan yang diperlukan untuk mendukung pencapaian sasaran itu memiliki spektrum yang luas, mulai dari pengembangan pemasaran pariwisata; pengembangan kemitraan dengan lembaga/asosiasi/organisasi kepariwisataan dalam dan luar negeri; peningkatan iklim usaha kepariwisataan; pengelolaan fasilitas pelayanan pariwisata milik daerah dengan menerapkan prinsip pelayanan prima dan memenuhi standar internasional; serta pemanfaatan

teknologi informasi dalam pengelolaan industri dan atraksi pariwisata.

4. Aspek Daya Saing Daerah

a. Kemampuan Ekonomi Daerah

Kinerja pembangunan daerah diperlihatkan pada kemampuan aktifitas perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan yang berkualitas dengan tingkat kesejahteraan yang semakin baik dengan mengedepankan asas pemerataan yang berkeadilan. Disamping itu dengan tetap membangun daya saing Sulawesi Selatan baik pada tingkat nasional atau internasional.

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas sarana dan prasarana atau infrastruktur wilayah, iklim berinvestasi yang kondusif, dan ketersediaan sumber daya manusia. Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek daya saing daerah, terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang akan dianalisis menurut kabupaten/kota di wilayah Provinsi. Indikator variabel aspek daya saing daerah terdiri dari indikator makro sektor pertanian terkait nilai tukar petani,

Kinerja pembangunan daerah atas aspek kemampuan ekonomi daerah diperlihatkan melalui indikator kinerja pembangunan terkait dengan pendapatan, kualitas sumberdaya manusia, produktifitas sektor pertanian serta perkembangan nilai ekspor khususnya komoditi pertanian.

Salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan petani adalah dengan melihat perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP), angka tersebut merupakan Rancangan antara harga yang diterima petani (produksi) dengan Rancangan harga yang dibayar petani (proses produksi dan konsumsi). Dengan interpretasi apabila nilai tersebut lebih besar dari 100 maka berarti daya tukar produksi hasil pertanian (harga yang diterima petani) lebih tinggi dibandingkan nilai dari barang-barang untuk konsumsi maupun proses produksi. Nilai Tukar Petani dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun terakhir dapat disajikan ke dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.18 Persentase Nilai Tukar Petani
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

NO	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Yang diterima Petani	113,21	123,10	130,31	142,43	151,04
2.	Yang dibayar Petani	112,99	122,30	128,22	132,99	139,70
3.	Nilai Tukar Petani	100,20	100,65	101,63	107,09	108,11

Sumber Data : BPS Sul Sel.

Dari Tabel tersebut di atas, terlihat bahwa di Provinsi Sulawesi Selatan nilai tukar petani Tahun 2008 mengalami perbaikan hingga Tahun 2011 dari 100,20 persen menjadi 107,09 persen. hal ini disebabkan oleh karena tingginya harga barang yang dikonsumsi petani dan harga barang yang digunakan untuk proses produksi (biaya produksi). Kenaikan harga barang pada saat itu dipicu oleh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sehingga laju inflasi cukup tinggi yaitu 15,20 Persen. Hal ini menunjukkan bahwa daya saing banyak dipengaruhi naik turunnya tingkat inflasi dan tingkat kualitas hasil produksi barang dan jasa.

Walaupun harga antar daerah berbeda, nilai pengeluaran rumah tangga masih dapat memperlihatkan perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi khususnya dilihat dari segi ekonomi.

Pengeluaran untuk konsumsi makanan masih tertinggi dari konsumsi bukan makanan yaitu rata-rata 410.669 rupiah per bulan, hal ini umumnya terjadi pada Negara yang sedang berkembang dimana kebutuhan makanan masih menjadi prioritas utama untuk memenuhi kebutuhan gizi.

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator: rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per Tahun, ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah banjir, luas wilayah kekeringan, luas wilayah perkotaan, jenis dan jumlah bank dan cabang, jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang, jenis, kelas, dan jumlah restoran, jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel, persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, dan persentase penduduk yang menggunakan alat komunikasi handpone ataupun alat komunikasi lainnya.

Beberapa indikator kinerja Tahun 2009 terkait dengan fasilitas infrastruktur wilayah yaitu panjang jalan Negara sebesar 1.556 km, panjang jalan Provinsi sebesar 1.260 km sedangkan panjang jalan kabupaten/kota mencapai 29.616 km. Sementara jumlah kendaraan mobil jenis kendaraan khusus/berat seperti mobil derek dan semacamnya mencapai 2.134 unit, jenis kendaraan penumpang sebanyak 136.352 unit, jenis kendaraan mobil beban seperti truck mencapai 79.320 unit, sementara pribadi mencapai 35.822. Untuk kendaraan bermotor jenis sepeda motor mencapai 1.538.733 unit. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah 0,02, berarti hal ini menunjukkan bahwa tingkat perkembangan jumlah kendaraan tidak sebanding dengan peningkatan jumlah panjang jalan dimana semakin kecil angka rasio maka menunjukkan semakin padatnya kendaraan di jalan.

Apabila hal ini tidak diantisipasi lebih awal, maka akan mengakibatkan lambatnya percepatan aktifitas perekonomian di Sulawesi Selatan khususnya pergerakan kendaraan dalam mengangkut barang dan jasa. Angka statistik memperlihatkan bahwa volume barang dan jasa serta manusia yang diangkut baik antar Kabupaten/Kota maupun antar Provinsi dari Tahun ke Tahun mengalami peningkatan yang cukup tinggi.

Peranan perbankan di Sulawesi Selatan dalam usaha memberdayakan atau membangun sektor ekonomi rakyat khususnya pengembangan jenis usaha mikro kecil dan menengah termasuk koperasi. Dengan jumlah bank yang ada diharapkan dana yang disiapkan untuk ke sektor ekonomi kecil dan menengah dapat tersalurkan secara signifikan kepada para pelaku usaha.

Tabel 2.19 Jumlah Bank Menurut Kelompok Bank Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2012

NO	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Bank Umum Devisa	136	136	138	141	141
2.	Bank Umum Bukan Devisa	450	466	472	476	476
3	Bank Perkreditan Rakyat	35	36	37	37	37

Sumber Data : BPS Sul Sel.

Jumlah dana yang disiapkan Pemerintah untuk kelompok usaha kecil dan

menengah pada Tahun 2005 sebesar Rp. 30,9 trilyun namun yang tersalur hanya Rp. 16,741 trilyun. Atau hanya mencapai 57 persen. Daya serap dari kelompok usaha kecil dan menengah relatif rendah karena belum seluruhnya merupakan jenis usaha yang layak perbankan sebagaimana jenis usaha yang masuk kategori usaha besar.

Tabel 2.20 Perkembangan Kredit Perbankan Tersalurkan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007-2011 (Rp.juta)

Tahun	Modal Kerja	Investasi	Modal Kerja + Investasi	Konsumsi	Total
2007	9.813.883	6.037.065	15.850.948	9.934.908	25.785.856
2008	12.423.971	6.444.359	18.868.330	12.862.471	31.730.801
2009	14.708.793	6.754.828	21.463.621	15.135.434	36.620.245
2010	15.708.601	7.429.316	22.463.456	17.804.130	41.213.069
2011	16.708.863	8.429.365	23.463.623	18.302.242	46.712.261

Sumber Data : BPS Sul Sel.

Jumlah kredit yang tersalur mengalami peningkatan dari Tahun keTahun dimana pada Tahun 2009 kredit perbankan yang tersalur mencapai Rp. 36,599 trilyun namun belum sepenuhnya menyentuh seluruh pelaku usaha khususnya usaha kecil dan menengah. Kondisi ini diakibatkan oleh karena penyebab utama menurunnya secara nominal jumlah kredit untuk sektor ekonomi rakyat tersebut antara lain sebagai akibat adanya reklasifikasi kredit dimana jumlah nominal lebih banyak diperuntukkan bagi usaha sektor produktif saja, sementara kredit yang banyak diinginkan masyarakat adalah kredit konsumsi yang angkanya jauh lebih besar dari dana yang disiapkan untuk itu. Disamping itu kemampuan pengusaha dalam memenejemen usahanya masih ikut-ikutan, sementara perbankan juga harus memperhitungkan tingkat resiko jika usaha kecil dan menengah mengalami kebangkrutan. Untuk itu perlu diperbanyak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di setiap wilayah yang jumlah UMKM cukup banyak.

Dengan dukungan iklim berusaha yang kondusif akan mendorong kinerja investasi yang lebih menjanjikan. Untuk meningkatkan kemampuan ekonomi daerah khususnya tingkat kesejahteraan masyarakat, dapat dilihat pada capaian dari beberapa indikator kinerja yang menggambarkan kualitas hidup Sumberdaya Manusia yang terkait dengan rasio ketergantungan penduduk usia 12 Tahun keatas sampai dengan usia 65 Tahun.

b. Fasilitas Infrasrtur Wilayah

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator:rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal perTahun, ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah kebanjiran, luas wilayah kekeringan, luas wilayah perkotaan, jenis dan jumlah bank dan cabang, jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang, jenis, kelas, dan jumlah restoran, jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel, persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Provinsi Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan mengalami kemajuan dari Tahun keTahun dalam penerapannya. Namun demikian, ketaatan berdasarkan rasio terhadap RTRW belum

memperlihatkan persentase sesuai yang diharapkan. Perlunya peningkatan secara intensif melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat agar lebih mematuhi kebijakan (*spacial*) Pemerintah Provinsi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029.

c. Kualitas Sumberdaya Manusia

Tabel 2.21 Rasio Beban Ketergantungan Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2011

No	Uraian	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1.	Angka Beban Ketergantungan	58,0 %	59,5 %	57,9 %	57,23	56,98
2.	Jumlah Rumah Tangga (RT)	1.752.704	1.783.932	1.865.662	1.865.662	1.865.662
3.	Rata-rata Anggota dalam RT	4,38	4,38	4,24	4,35	4,45

Sumber Data : BPS Sul Sel.

Angka beban ketergantungan menurut Kabupaten/Kota, memperlihatkan variasi yang cukup besar. Angka beban ketergantungan Kabupaten/Kota berkisar antara 48,14 persen hingga 82,11 persen. Daerah yang relatif rendah beban ketergantungannya adalah kota makassar, Kabupaten Wajo dan Soppeng. Sedangkan yang relatif tertinggi berturut turut adalah Kabupaten Enrekang 82,11 persen kemudian Kabupaten Tana Toraja dan Luwu. Daerah yang mempunyai angka beban ketergantungan cenderung penduduk yang berumur 7-14 Tahun jumlahnya relatif besar dimana ini merupakan usia sekolah atau sedang mengikuti pendidikan SD dan SMP yang masih dalam tanggungan kepala rumah tangga.

d. Analisis Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran seperti merasionalkan keseimbangan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung, mengarahkan pemanfaatan anggaran pada pencapaian *Millenium Development Goals (MDGs)* dan mendukung prinsip *pro-poor, pro-job, dan pro-growth*. Kinerja perekonomian daerah Provinsi Sulawesi Selatan juga tergantung pada capaian proyeksi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dan realisasi investasi dunia usaha, serta kemampuan pengeluaran investasi oleh Pemerintah daerah untuk memicu pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan stabilitas politik dan keamanan baik nasional maupun tingkat daerah.

Kinerja pengelolaan keuangan daerah dibutuhkan untuk pencapaian target pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD 2008-2013 dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013. Kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana komponen keuangan daerah meliputi komponen Pendapatan daerah, Belanja daerah dan Pembiayaan daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Perkembangan capaian target dan sasaran Rencana Kerja Tahunan Provinsi Sulawesi Selatan 5 (lima) Tahun terakhir (2008 hingga 2013) memperlihatkan kemajuan yang signifikan terhadap pencapaian sasaran agenda dan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan. Demikian juga Target dan sasaran tersebut diharapkan menjadi lebih baik pada Tahun ini 2014, sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2013-2018. Secara nasional posisi Sulawesi Selatan kedepan akan menjadi pilar utama pembangunan nasional yang antara lain diukur dari pergeseran data dan informasi terkait dengan indikator-indikator makro khususnya terkait dengan komponen pertumbuhan pada sektor pertanian dan industri pengolahan. Indikator lain yang diharapkan berada diatas rata-rata nasional adalah indikator Indeks Pembangunan Manusia, kemiskinan, Produk Domestik Regional Bruto, Investasi, dan pendapatan perkapita.

B. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD

B.1. Evaluasi Kinerja RPJMD

Berdasarkan hasil pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2013 dan prediksi Tahun berjalan yaitu Tahun 2014 dikaitkan dengan target serta sasaran utama yang ingin dicapai dalam RPJMD 2013-2018, diuraikan berdasarkan program pembangunan terkait dengan 7 Misi yang diuraikan kedalam 7 (tujuh) tujuan pembangunan dalam RPJMD 2013-2018 yaitu:

- a. mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama.
- b. meningkatnya kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.
- c. meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
- d. meningkatnya daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global.
- e. meningkatnya kualitas demokrasi dan hukum.
- f. meningkatnya kualitas ketertiban, keamanan, harmoni sosial dan kesatuan bangsa. Dan
- g. meningkatnya perwujudan Pemerintahan yang baik dan bersih.

Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk Tahun 2013 dan triwulan II tahun 2014, dirumuskan berdasarkan indikator kinerja pembangunan daerah yang telah dicapai dikaitkan dengan Misi dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2013-2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mendorong Semakin Berkembangnya Masyarakat Religius

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas religius masyarakat dan kerukunan intra dan antar umat beragama dengan Sasaran yang ingin dicapai adalah terjaminnya keadaan yang kondusif bagi penghayatan dan pengamalan agama, dan terpeliharanya kerukunan intra dan antar umat beragama. Indikator kinerja yang telah dicapai hingga tahun 2013

Kebahagiaan (*happiness*) adalah pencapaian puncak dari seluruh upaya pembangunan. Visi ini terkait dengan penciptaan kondisi bagi pemenuhan kehidupan rohaniah dan spiritualitas masyarakat sebagai salah satu landasan bagi pencapaian kebahagiaan yang hakiki. Dalam upaya umum ini tercakup penciptaan dukungan bagi umat beragama, baik laki-laki maupun perempuan, bagi terpenuhinya situasi yang kondusif bagi penyelenggaraan ibadah, kecukupan tempat beribadah, kapasitas penceramah agama, serta kerukunan intra dan antar umat beragama.

Dalam perjalanan pelaksanaan pembangunan selama ini telah dikung dengan lahirnya kondisi dan situasi yang kondusif bagi seluruh umat dalam melaksanakan ibadah, perkembangan terpenuhinya ketersediaan tempat beribadah, kapasitas dan kualitas para pen-ceramah agama, serta berjalannya dengan baik kerukunan intra dan antar umat beragama dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan hidup. Arah kebijakan pembangunan terkait menitik beratkan pada bagaimana meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas pertumbuhan PDRB, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan serta kualitas pengelolaan sumberdaya alam.

Kemampuan ekonomi daerah tahun 2013 memperlihatkan tingkat pertumbuhan PDRB mencapai 8,37 persen yang secara signifikan telah meningkatkan rata-rata pendapatan masyarakat sebesar 19,4 juta rupiah. Capaian ini telah melampaui target, sehingga diharapkan tahun 2014 dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan, dengan asumsi tingkat inflasi dapat ditekan dan dikendalikan dengan baik. Tingkat pertumbuhan tersebut masih perlu difokuskan pada peningkatan pertumbuhan pada sektor pertanian khususnya agro-industri dan atau industri pengolahan. Konsep **Petik Olah Jual** menjadi hal yang perlu diterapkan dalam menyusun dan memverifikasi usulan program dan kegiatan pembangunan agar nilai tambah yang diperoleh semakin berlipat ganda. Hal ini agar menjadi fokus perhatian bagi seluruh SKPD terkait sektor pertanian dan sektor industri perdagangan, sehingga mendukung meningkatnya daya serap TK.

Peningkatan paritas daya beli yang telah mencapai Rp.643,590 membutuhkan akselerasi peningkatan yang lebih baik, hal ini perlu dilakukan agar dapat menurunkan jumlah penduduk miskin. Jumlah Penduduk miskin mengalami peningkatan hingga mencapai 9.82 persen yaitu didesa sebanyak 794.200 Jiwa dan dikota sebanyak 119.200 jiwa. Hal ini dipicu oleh tingginya laju inflasi dengan meningkatnya harga barang dan jasa (kenaikan harga BBM) yang juga melemahnya nilai rupiah terhadap dollar akibat stabilitas perekonomian global. Kondisi ini diharapkan dapat menurun hingga akhir tahun 2014, dengan catatan bahwa seluruh SKPD terkait merealisasikan program dan kegiatan yang mengarah pada perbaikan pendapatan masyarakat. Dengan kondisi perekonomian yang stabil dan terkendalinya tingkat inflasi diharapkan dapat memberi peluang akses masyarakat untuk berusaha secara mandiri sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi jumlah penduduk miskin dengan dukungan kondisi wilayah Sulawesi Selatan yang semakin kondusif.

Upaya dalam mewujudkan pergeseran struktur ekonomi khususnya pada sektor pertanian ke sektor industri merupakan strategi dasar untuk meningkatkan tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada pergeseran distribusi persentase PDRB (HB) dari Tahun 2012 ke Tahun 2013 untuk pertanian 25,32 menjadi 24,55 persen, Industri 12,22 menjadi 12,26 persen dan Jasa dari 17,37 persen menjadi 17,52 persen. Oleh karena itu, kontribusi yang sangat signifikan terhadap pencapaian sasaran Tahun selanjutnya tercermin dari besaran indikator makro pendapatan sektor pertanian, peningkatan kuantitas dan kualitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Program dan kegiatan yang mengarah pada pencapaian Indikator sasaran program dalam rangka perbaikan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah hingga Tahun 2013 semakin membaik, namun belum maksimal perlu pemetaan daerah-daerah miskin untuk jadi sasaran utama.

Kebijakan dan program prioritas terkait pada sektor pertanian tahun 2015 menitik beratkan pada peningkatan produksi dan akses masyarakat terhadap asset atau kegiatan produktif, serta perluasan kesempatan kerja. Program Peningkatan produksi pertanian dan pengembangan agro-industri pedesaan dengan sasaran 3,2 juta ton beras, 1,7 juta ton jagung, produksi kakao 325 ribu ton, populasi sapi 1 juta ekor dengan ekspor mencapai 5000 ekor/bulan, produksi tambak udang 33.200 Ton, serta rumput laut tambak 58.955,8 ribu ton kering dan dilaut 200.693,5 ribu ton kering. Kondisi terakhir yang telah dicapai hingga Tahun 2011 Beras 1,8 Juta Ton dan Jagung < 1 Juta Ton. Intensifikasi terhadap program tersebut diharapkan keterlibatan usaha ekonomi menengah keatas, dan industri pengolahan untuk membangun kerjasama dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Untuk mencapai target sasaran tersebut diatas, maka kegiatan prioritas Tahun 2015 diarahkan untuk mendukung berkembangnya usaha pertanian yang produktif dan efisien dengan nilai tambah dan daya saing yang tinggi, tercipta kedaulatan pangan dan produksi pangan hasil pertanian organik, dan berkembangnya penerapan iptek pada agro-industri pertanian, peternakan dan perikanan di kawasan andalan, serta pengembangan peluang pasar yang lebih menguntungkan. Demikian juga pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dengan sasaran pembangunan hutan tanaman rakyat dan perhutanan sosial luasan yang diharapkan mencapai diatas 26.000 ha.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengarahkan untuk meningkatkan produksi beberapa komoditas unggulan guna meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan peran masyarakat di pedesaan. Khususnya dalam kegiatan agribisnis. Komoditas unggulan di Sulawesi Selatan yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya kehutanan yang diorientasikan pada pemanfaatan produksi hasil hutan khususnya bukan kayu antara lain kokon sebagai bahan utama pembuatan sutera dan madu. Pada tahun 2013 menargetkan peningkatan produksi kokon dan madu sebesar 15 persen pertahun. Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian target 96 persen dan pencapaian produksi madu naik sebesar 12 persen.

Pengelolaan sumberdaya alam yang menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan belum dilaksanakan secara optimal, hal ini ditandai dengan meningkatnya tingkat kerusakan hutan dan semakin menurunnya kualitas lahan. Luas lahan kritis masih cukup besar tahun 2013 mencapai 525.885 Ha. Tingkat pengawasan, penertiban kegiatan masyarakat yang berpotensi merusak lingkungan baru mencapai 60 persen. Kondisi ini mengharuskan kita meningkatkan persentase pengawasan dan pengendalian kerusakan hutan dan DAS serta penambang liar ataupun Illegal Logging. Demikian juga dengan membuka lapangan kerja serta dukungan akses untuk berusaha dengan konsep kemandirian lokal diharapkan dapat memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat. Hal ini akan dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah, antar kelompok dan antar individu.

3. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur

Arah kebijakan pembangunan terkait dengan Misi dan tujuan yang **ketiga** dalam RPJMD 2013-2018, yaitu pendidikan dan kesehatan adalah mewujudkan akses dan kualitas pelayanan dasar masyarakat dalam arti masyarakat dapat mengakses pendidikan dasar dan menengah serta pelayanan kesehatan gratis sehingga masyarakat menjadi cerdas, sehat dan memiliki kreatifitas dengan

identitas diri, mempunyai semangat membangun yang baik dan berbudaya lokal serta berfikir global.

Pencapaian sasaran indikator utama aspek kesejahteraan masyarakat khususnya pendidikan dan kesehatan difokuskan pada pencapaian sasaran laju peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Indikator makro IPM belum memperlihatkan kinerja yang baik (tidak mencapai target), dimana hingga Tahun 2013 hanya mencapai 72,70 angka ini terdiri dari Angka Melek Huruf 88,73 Usia Harapan Hidup 70,45 tahun, dan RLS 7,95 tahun, serta daya beli 643.590 rupiah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlunya komitmen dari Dinas Kesehatan untuk lebih selektif mengarahkan kegiatannya pada peningkatan Usia Harapan hidup khususnya dengan menekan jumlah kematian bayi pertahun, demikian juga Dinas Pendidikan untuk penanganan penduduk buta huruf lebih focus pada usia produktif. Demikian juga untuk wajib belajar 12 tahun agar memperhatikan penduduk usia sekolah 15-17 tahun khususnya daerah Kab/Kota yang sangat rendah capaiannya. Kelambatan capaian RLS akibat rendahnya tingkat partisipasi sekolah khususnya angka partisipasi sekolah pada tingkat SMP dan SLTA. Kondisi ini memperlihatkan perlu dilakukan percepatan capaian target melalui optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan dasar dan menengah.

Perkembangan angka melek huruf hingga Tahun 2012 rata-rata naik 0,51 persen/tahun sementara target rata-rata naik 1,69 persen/Tahun. Kondisi capaian indeks pendidikan yang mengalami perlambatan diakibatkan kurangnya focus alokasi anggaran serta dukungan dari Kabupaten Kota untuk kegiatan yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran. Indikator sasaran terkait kesehatan adalah angka harapan hidup, dimana hingga Tahun 2012 hanya naik 0,20 Tahun sementara target diharapkan rata-rata naik 0,82 Tahun. Kondisi ini masih jauh dari harapan, sehingga untuk mencapai target pada Tahun selanjutnya akan sulit dicapai jika tidak didukung oleh Kabupaten/Kota. Perkembangan kemampuan daya beli masyarakat hingga Tahun 2012 hanya naik sebesar 3,17 poin sementara target yang diharapkan rata-rata naik 9,84 poin.

Indikator lainnya memperlihatkan kinerja yang baik antara lain indikator prevalensi gizi buruk telah mencapai 6,4 persen, cakupan air bersih, tingkat kematian ibu dan anak mencapai, serta rasio fasilitas pendidikan dan kesehatan terhadap jumlah penduduk. Kondisi ini perlu ditingkatkan dari tahun ketahun disamping untuk mendukung target MDgS. Dukungan lain aspek kesejahteraan dapat dilihat dari hasil pelaksanaan pembangunan terkait pembinaan pemuda dan olah raga serta pengembangan seni dan penguatan budaya local, dimana data memperlihatkan kinerja yang cukup baik sehingga tetap menjadi perhatian untuk mendapatkan dukungan.

Secara keseluruhan kualitas indeks pembangunan manusia belum dapat dicapai secara maksimal. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman dan sinergitas antar Provinsi dengan kabupaten/kota, khususnya SKPD terkait dalam proses penyusunan dan penetapan program dan kegiatan. Dari aspek kinerja laju pertumbuhan IPM atau shortfall 1,73 urutan ketiga (III) tertinggi setelah Kalimantan timur dan Yogyakarta. Demikian juga pertambahan nilai IPM mencapai 2,52 urutan kedua (II) setelah Nusa Tenggara Barat. Kinerja tersebut merupakan kemajuan yang realistis dan rasional untuk dapat ditingkatkan dari tahun ketahun.

Layanan urusan wajib terkait dengan pendidikan dan kesehatan diarahkan pada bagaimana agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat mendukung tercapai target dan sasaran indikator makro yang tertuang dalam RPJMD tahun 2013-2018.

Hasil pelaksanaan program terkait dengan pendidikan dasar secara umum telah mendukung perbaikan angka partisipasi sekolah SD dengan kenaikan sebesar 1,5 sehingga mencapai 97,59 dan SMP naik sebesar 0,9 hingga mencapai

87,69 sedangkan untuk SMA naik sebesar 0,7 sehingga mencapai 61,66. Kondisi ini memperlihatkan semakin tinggi level tingkat pendidikan semakin kecil Angka Partisipasi Sekolah, dan hal ini diakibatkan rasio ketersediaan sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah 16-18 tahun sangat rendah. Disamping itu pada usia ini banyak yang berhenti atau tidak bersekolah dan beralih dengan bekerja khususnya di sector pertanian, industry dan perdagangan dengan sasaran untuk mendukung peningkatan pendapatan keluarga.

Hingga Tahun 2013 kualitas pelayanan pendidikan semakin membaik, hal ini terlihat dari rata-rata tingkat kelulusan SD dan SMP rata-rata mencapai diatas 90 persen. Prioritas diarahkan pada ketersediaan dan sebaran fasilitas pendidikan yang memadai sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dimana fasilitas ini akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya strata pendidikan. Kualitas penyelenggaraan pendidikan perlu menjadi perhatian khusus yang terkait dengan proses pembelajaran, kompetensi luaran, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, manajemen pengelolaan pendidikan yang professional.

Sasaran program prioritas terkait menurunkan angka putus sekolah melalui program kejar paket setara SD dan SMP khususnya usia 7-12 Tahun dan usia 13-15 Tahun. Dengan program tersebut diharapkan Target Angka Melek Huruf hingga 2014 dapat mencapai 90,4 persen. Hasil yang dicapai hingga awal Tahun 2013 baru mencapai 87,76 persen. Oleh sebab itu perlu dipacu untuk meningkatkan budaya baca dengan penyediaan fasilitas perpustakaan/taman baca didesa tertinggal/pencil ataupun intervensi langsung dengan kerjasama Kabupaten/kota dengan sasaran pada penduduk yang buta huruf khususnya yang berusia produktif.

Program prioritas sektor kesehatan hingga tahun terakhir tetap difokuskan pada peningkatan akses masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan dasar. Sasaran program prioritas untuk kesehatan gratis adalah seluruh penduduk yang mempunyai identitas tidak mampu dan Tahun 2013 sudah mencapai 89 persen tertangani, dan Tahun 2014 diperkirakan akan melampaui 92 persen hingga 90 persen. Sehingga Usia Harapan Hidup akan semakin mengalami peningkatan atau diharapkan rata-rata naik 0,3 setiap Tahun.

Untuk itu maka kedepan peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan harus difokuskan pada upaya peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan khususnya pada Rumah Sakit, Puskesmas, maupun Pustu. Ratio puskesmas per 100.000 penduduk telah mencapai 5,38, rasio Pustu sebesar 17,24. Ratio ini masih rendah sehingga perlu penambahan termasuk fasilitas peralatan yang dibutuhkan. Demikian juga dengan ketersediaan tenaga medis dan para medis termasuk ratio dokter yang masih kecil yaitu 15 dokter umum per 100.000 penduduk dan 5 Dokter Spesialis untuk 100.000 penduduk. Kondisi ini diakibatkan oleh banyak dokter yang di daerah berpindah tempat ke pusat Kota atau ke ibukota untuk mendapatkan pendapatan dan fasilitas yang lebih baik. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah khususnya SKPD terkait.

Untuk layanan kesehatan persentase capaian Pola Hidup Bersih dan Sehat diharapkan mencapai 89 persen, namun belum memberi angka capaian yang menggembirakan hanya mancapai 80 persen. Secara umum sasaran indikator belum menunjukkan perbaikan yang signifikan untuk pencapaian sasaran setiap program prioritas dibidang kesehatan. Kondisi ini perlu menjadi fokus perhatian dalam menyusun kegiatan prioritas yang akan datang.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berusaha untuk mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai pusat pelayanan (main-hubs), sebagai simpul utama sistem transportasi nasional dan internasional dan pusat pelayanan regional dan nasional. Pembangunan infrastruktur wilayah diharapkan dapat mendukung tercapainya

tujuan tersebut melalui peningkatan aksesibilitas fisik antar daerah dan antar karyawan guna mendukung pencapaian tujuan tersebut adalah dengan melakukan pengembangan fasilitas pusat pertemuan, pameran dan social budaya pada kawasan Centre Point of Indonesia yang merupakan Kawasan Strategis Provinsi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Aksesibilitas wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan selain ditunjang oleh jalan dan jembatan diharapkan juga akan didukung oleh sarana dan prasarana transportasi massal berupa jaringan jalur kereta api umum antar kota lintas Provinsi yang menghubungkan Makassar dan Parepare, jaringan jalur kereta api kawasan Mamminasata dan Bus Rapid Transportation (BRT). Selain itu juga guna mendukung pencapaian target overstock pangan dan pemenuhan target capaian MDGs berupa peningkatan cakupan pelayanan air minum, sangat dibutuhkan adanya upaya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan rawa dan penyediaan dan pengelolaan air baku.

Sebagai upaya mewujudkan Sulawesi Selatan yang aman, nyaman, produktif dan peningkatan kualitas lingkungan hidup guna mewujudkan pembangunan wilayah yang didasarkan pada keberlanjutan lingkungan hidup. Degradasi kualitas lingkungan hidup antara lain menyebabkan banjir dan kekeringan, serta bencana alam lainnya yang semuanya bermuara pada penurunan produktifitas lingkungan, sebagai upaya mengatasi hal tersebut, maka dibutuhkan adanya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013 menargetkan penanganan jalan sepanjang 144 Km dengan kondisi mantap 96 persen. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan mulai Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012, realisasi kondisi mantap pada keseluruhan ruas-ruas jalan Provinsi yang dihasilkan akhir Tahun 2012 mencapai 87,94 persen dengan panjang penanganan 117,20 Km dari total panjang jalan Provinsi sepanjang 1.147,51 Km (*892,02 km kondisi baik*). Memperhatikan kondisi tersebut, maka dapat diindikasikan bahwa target kondisi mantap sebagaimana amanat RPJMD tidak tercapai yang diakibatkan belum optimalnya alokasi penganggaran untuk penanganan jalan Provinsi dan jalan strategis di Kabupaten/Kota yang antara lain diakibatkan bertambahnya kebutuhan penanganan ruas jalan dengan kondisi rusak, dan bertambahnya kebutuhan perencanaan dan pengawasan jalan.

4. Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas religius masyarakat dan kerukunan intra dan antar umat beragama dengan Sasaran yang ingin dicapai adalah terjaminnya keadaan yang kondusif bagi penghayatan dan

Untuk meningkatkan daya saing wilayah Sulawesi Selatan, diperlukan pertumbuhan yang berkualitas lebih tinggi dan berkesinambungan didorong oleh pengelolaan sumber-sumber pertumbuhan yang lebih berkualitas kearah industri pengolahan. Untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi yang utamanya digerakkan oleh sektor riil perlu didukung dengan kondisi iklim usaha yang kondusif, sehingga investasi baik dalam dan luar negeri serta ekspor dapat meningkat. Secara makro beberapa hal berpotensi dapat didayagunakan untuk memicu laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan.

- a. memanfaatkan output sektor pertanian yang relatif besar sebagai input bagi pengembangan agro-industri.
- b. keterkaitan industrial dan perdagangan Sulawesi Selatan dengan wilayah lain di Indonesia atau bahkan di manca negara.
- c. memanfaatkan potensi pasar internal Sulawesi Selatan yang cukup besar dan peningkatan kerjasama perekonomian wilayah/perdagangan dengan Provinsi

lain di Kawasan Timur Indonesia maupun dalam era perdagangan global yang saling menguntungkan.

Ketiga hal ini perlu diterapkan secara maksimal dalam proses pembangunan. Upaya dalam mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas merupakan salah satu strategi jangka menengah yang harus dilaksanakan dengan memanfaatkan keunggulan potensi lokal. Oleh karena itu, kontribusi yang sangat signifikan terhadap pencapaian sasaran hingga Tahun 2013 kedepan tercermin dari besaran indikator makro untuk yang telah dicapai dalam Tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Tahun 2010 ke tahun 2011 turun dari 8,18 persen menjadi 7,65 persen akibat turunnya ekspor Nikel (mines 6 persen) dan Tahun 2012 naik menjadi 8,37 persen. Hingga akhir Tahun 2013 diharapkan tetap stabil.

Untuk mencapai target agenda pembangunan, maka peletakan kebijakan dan sasaran dari program prioritas antara lain adalah menumbuhkembangkan industri strategis khususnya disektor pertanian yang memiliki keterkaitan industrial antar wilayah atau Negara lain. Kondisi ini dapat dicapai dengan meningkatkan realisasi investasi khususnya di sektor unggulan. Meningkatkan produktifitas dan kualitas hasil produksi pada sektor unggulan dalam mendukung peningkatan nilai ekspor. Membangun kerjasama regional dalam meningkatkan promosi perdagangan dan kerjasama regional termasuk didalamnya pengembangan industri pariwisata. Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2011 telah mepengaruhi peningkatan nilai ekspor sebesar 37,8 Triliun rupiah.

Kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 65.000 kunjungan sedangkan wisatawan nusantara mencapai 4.523.381 kunjungan dan diharapkan hingga akhir Tahun 2013 kunjungan mancanegara mencapai 100.000 dan wisatawan nusantara diharapkan mencapai 5.000.000 kunjungan.

Posisi Sulawesi Selatan sebagai pusat pelayanan (*main-hubs*) di kawasan timur indonesia, maka Kota Makassar diharapkan sebagai simpul utama sistem transportasi nasional dan internasional dan pusat pelayanan regional dan nasional. Pembangunan *Celebes Compeition Centre*, dan kawasan *Central Point of Indonesia* dengan memanfaatkan sesuai dengan fungsinya akan dapat meningkatkan transaksi perdagangan nasional sehingga diharapkan akan indikator capaiannya antara lain nilai ekspor naik 3-5 persen hingga akhir Tahun 2013, walaupun hal ini belum sepenuhnya tercapai. Sehingga perlu membangun intensitas kerjasama regional antar kawasan dan antar negara sehingga peluang pengembangan investasi semakin besar. Disamping itu secara tidak langsung akan mendukung berkembangnya industri pariwisata dimana Sulawesi Selatan akan menjadi daerah tujuan wisata yang terkemuka.

5. Meningkatkan kualitas demokrasi dan hukum

Kemajuan tatanan menuju peradaban yang baik mempersyaratkan terpatuhinya norma-norma kehidupan. Ini akan beriring dengan perwujudan kesetaraan dan *fairness* di dalam berbagai aspek tatanan. Misi ini mencakup upaya-upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum, penciptaan iklim bagi persaingan usaha, serta pensubstansian demokrasi dalam tatanan. Selain itu, tercakup upaya-upaya perwujudan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan kesadaran dan ke-patuhan hukum; pendidikan demok-rasi; perwujudan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlin-dungan anak; dukungan informasi dan komunikasi dengan Sasaran yang ingin dicapai adalah terjaminnya keadaan yang kondusif bagi masyarakat dalam menjalankan aktifitas kehidupan. Menurunnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dan semakin membaiknya kesadaran masyarakat dalam mematuhi

peraturan. Kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi serta Jiwa nasionalisme dan patriotisme diharapkan semakin membaik;

Kondisi Demokrasi dan HAM, dari tahun ketahun gelombang kesadaran eksistensi kehadiran manusia dimasyarakatnya semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pendidikan dan informasi. Peningkatan peran di masyarakat seperti demokratisasi akan terus berlangsung dan tidak akan mungkin dapat dicegah kemajuannya. Pemerintah-pemerintah otoriter di dunia walaupun belum dapat runtuh seluruhnya diperkirakan akan mengalami perlemahan yang serius. Keberhasilan negara otoriter pada tahun-tahun sebelumnya dalam mencegah demokratisasi, seperti halnya yang terjadi di beberapa negara bekas Uni Soviet, Afrika Utara dan Asia Selatan, hanya akan menunda sebentar keberhasilannya. Saat ini gelombang demokrasi sedang melanda negara-negara di Timur Tengah dan efek domino yang ditimbulkannya menjadi permasalahan yang bermuara pada persoalan kemanusiaan. Bahkan negara-negara demokrasi maju sekalipun sedang mengalami dinamika-dinamika koreksi dalam hal demokrasi, berkaitan dengan peran negara dan masyarakat sipil.

6. Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan, harmoni sosial dan kesatuan bangsa.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas religius masyarakat dan kerukunan intra dan antar umat beragama dengan Sasaran yang ingin dicapai adalah terjaminnya keadaan yang kondusif bagi penghayatan dan

Arah kebijakan dan tujuannya diarahkan untuk menciptakan kualitas keamanan dan ketertiban lingkungan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu didukung oleh sistem hukum yang responsif dan menjamin adanya kepastian hukum, keamanan dan ketentraman, serta upaya peningkatan penataan legislasi daerah. Perbaikan terhadap kondisi ini akan lebih banyak mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang lebih baik, serta berkembangnya usaha kegiatan yang lebih produktif. Dalam menciptakan Sulawesi Selatan kedepan sebagai wilayah yang kondusif tersebut diatas, juga diperlukan semangat kebersamaan dalam melahirkan beberapa indikator sasaran yang sifatnya kualitatif yaitu terbangunnya wawasan kebangsaan, yang didukung dengan perangkat legislasi yang berpihak pada rakyat sehingga dapat menjamin adanya rasa aman dalam kehidupan masyarakat. Disamping itu perlunya pembinaan kehidupan sosial politik dalam berbangsa dan bernegara, serta dukungan media informasi sebagai penyebarluasan informasi secara lebih efektif dan efisien.

Agenda pembangunan Sulawesi Selatan ini dijabarkan lebih lanjut kedalam kebijakan dan rancangan program pada tiga Tahun terakhir menunjukkan perbaikan peningkatan, hal ini dapat dilihat dari terkelolanya potensi konflik dengan baik. Upaya dalam mewujudkan peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan merupakan amanat Undang-Undang yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, kontribusi yang sangat signifikan terhadap pencapaian sasaran kedepan adalah dengan menetapkan sasaran dan target capaian yang secara rasional dapat dicapai.

Indikator kebijakan yang akan dicapai tersebut diatas akan dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan prioritas. Peletakan Kebijakan dan sasaran dari program prioritas pada Tahun 2013 dengan sasaran yang sifatnya kualitatif antara lain adalah terbangunnya rasa aman dan tentram dalam masyarakat, meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kepastian hukum, terbangunnya penataan sistem legislasi daerah yang berpihak pada masyarakat dengan sasaran lebih dari 3 perda yang terkait dengan pertambangan dan energi, pertanian, dan perencanaan. Pengurangan penambang liar dan peladang

berpindah setiap Tahun, Berkurangnya kerusakan sumberdaya kelautan setiap Tahun. Secara umum kondisi lingkungan yang aman dan tentram akan mendorong terciptanya aktifitas ekonomi dan sosial kemasyarakatan dapat berjalan dengan baik.

Kedepan perlunya alokasi dana untuk kejadian luar biasa meliputi penanggulangan bencana alam, penanggulangan bencana sosial, dan kegiatan tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah dengan menggunakan dana Belanja Tidak Terduga sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

7. Meningkatnya perwujudan Pemerintahan yang baik dan bersih

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat **Kelembagaan Pemerintah**. Arah kebijakan agenda ini terkait dengan Misi dan tujuan yang **ketuju** dalam RPJMD 2013-2018 diarahkan Dalam upaya menguatkan kelembagaan Pemerintah dalam perwujudan tatakelola yang baik dalam arti kelembagaan yang tangguh, terpercaya dan mandiri. Penguatan lembaga Pemerintah tetap mengacu pada prinsip-prinsip dasar tata kelola Pemerintahan yang baik. Sekalipun terjadi dinamika perkembangan lingkungan yang kuat, keberadaan kelembagaan tetap sanggup beradaptasi secara kreatif. Upaya pemberdayaan kelembagaan Pemerintah akan lebih diprioritaskan pada pelayanan publik dan pengembangan yang diarahkan pada terwujudnya Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Upaya pemberdayaan kelembagaan Pemerintah seperti ; Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah; Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah; Pemberdayaan Aparatur Pemerintah; Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan; Pengembangan Perencanaan Pembangunan; dan Pemberdayaan Pengawasan; diharapkan mampu menciptakan kelembagaan Pemerintah yang terpercaya yakni transparan, konsisten dan akuntabel serta efisien dan efektif.

Upaya dalam mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan suatu lembaga yaitu dengan memahami visi dan tupoksinya serta mampu menerapkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar. Hal ini merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan pelayanan publik sebagaimana yang tersirat dalam berbagai regulasi tentang pelayanan public. Oleh karena itu perlu mendapatkan perhatian sehingga mempunyai kontribusi yang sangat signifikan terhadap pencapaian kinerja yang semakin baik.

Indikator kinerja yang akan dicapai tersebut akan dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan prioritas. Peletakan Kebijakan dan sasaran dari program prioritas pada Tahun 2011 dan Tahun 2013 antara lain adalah, terciptanya kelembagaan yang menerapkan prinsip *good governance*, membangun suatu sistem, prosedur dan mekanisme kerja yang kompetitif, Melakukan transformasi organinasasi birokrasi yang lebih inovatif, fleksibel dan responsif. Untuk itu fokus kegiatan meliputi peningkatan kualitas aparat perlu memiliki wawasan dan visi untuk kemajuan oraganisasi, dan perlu paradigma baru terhadap pola pikir dan prilaku aparatur Pemerintahan dengan kegiatan prioritas pendidikan dan pelatihan, perlu kesempatan berproses belajar secara merata bagi setiap orang, Optimalisasi kinerja semua staf sesuai sumberdaya yang melekat dan ada pada dirinya dengan dukungan fasilitas kerja yang memadai.

Untuk membangun pemerintahan yang baik, maka perlu dukungan keberadaan kelembagaan masyarakat, kelembagaan ekonomi dan Sosial budaya yang berspektif gender. Dalam membangun Kelembagaan masyarakat yang tangguh dan mandiri dilakukan dengan membangun, membentuk dan memberi peluang kepada masyarakat agar mampu menyediakan segala kebutuhan hidup mereka secara mandiri dan berkelanjutan. Penguatan kelembagaan sosial

(organisasi keagamaan, profesi, dan pemuda dan olahraga); Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Politik.

Penguatan kelembagaan yang bersperspektif gender sebagai jabaran dari Strategi Pengarus Utamaan Gender agar tetap sanggup beradaptasi secara kreatif sehingga keberadaannya dibutuhkan dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Keterlibatan Wanita dalam pembangunan dilakukan dengan berusaha mengintergrasikan perempuan ke dalam proses pembangunan dengan sasaran meningkatkan produktifitas tenaga kerja perempuan, sehingga mendukung pembangunan lebih efektif dan efisien.

Kelembagaan masyarakat tidak dapat berfungsi secara efektif tanpa dukungan keberadaan peranan dari lembaga Pemerintah. Indikator sasaran kualitatif yang diharapkan antara lain adalah terfasilitasinya keterlibatan kelembagaan masyarakat dalam proses, pelaksanaan, pengawasan pembangunan, dan terbangunnya kelembagaan yang mampu mentransformasikan potensinya menjadi keunggulan lokal, terkelolanya kekayaan budaya dan seni secara berkelanjutan. Disamping itu Terkait kelembagaan ekonomi sasaran yang diharapkan terbangunnya kelembagaan ekonomi masyarakat yang mandiri, tumbuh berkembang secara sehat.

B. 2. Evaluasi Kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam prioritas RKPD Tahun 2013 dan RKPD Tahun 2014, beberapa indikator makro yang diharapkan dapat dicapai hingga Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan

Upaya peningkatan aksesibilitas terhadap pendidikan dan kesehatan merupakan aspek yang harus dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan, oleh karena pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia Sulawesi Selatan sebagai pelaku sekaligus objek pembangunan. Berbagai dokumen sebagai hasil kesepakatan-kesepakatan internasional seperti Pendidikan Untuk Semua (*Education For All*), Konvensi Hak Anak (*Convrention on the right of child*) dan *Millenium Development Goals (MDGs)* serta *World Summit on Sustainable Development* secara jelas menekankan pentingnya pendidikan dan kesehatan sebagai salah satu aspek penekanan untuk penanggulangan kemiskinan, pemerataan yang berkeadilan, kesetaraan gender, serta pemahaman nilai-nilai spiritual dan budaya. Dengan kondisi tingkat pendidikan dan kesehatan penduduk yang relatif masih rendah, upaya untuk memperbaiki akses penduduk terhadap pendidikan dan kesehatan harus dipercepat untuk mencapai Manusia Sulawesi Selatan yang berkualitas baik dan berdaya saing.

Tabel 2.22 Capaian Indikator Sosial Sektor Pendidikan dan Kesehatan

No.	Indikator	Capaian Thn 2012	Thn 2013
1	Angka Indeks Pendidikan	76,82	78,45
2	Angka Indeks Kesehatan sebesar	75,75	76,0
3	Angka Harapan Hidup	70,45 Tahun	7,61 Tahun
4	Rata-Rata Lama Sekolah	7,95 Tahun	8,29.Tahun
5	Angka Melek Huruf	88,73 Persen	90,04 Persen
8	layanan air bersih diperkotaan	85 % RT. perkotaan	90 % RT. Perkotaan

9	lingkungan/perumahan sehat, serta sanitasi	Sanitasi 80 persen dan PHBS 70 persen	Sanitasi 85 persen dan PHBS 75 persen
---	--	---------------------------------------	---------------------------------------

Kinerja pembangunan pendidikan dan kesehatan Tahun 2012 hingga 2013 memperlihatkan akselerasi peningkatan yang semakin membaik, namun secara kumulatif target Indeks Pembangunan Manusia dalam (RPJMD 2008-2013) masih sulit untuk dicapai, karena masih rendahnya kualitas peningkatan AMH, RLS, AHH, dan Daya Beli. Kondisi ini disebabkan masih lemahnya kualitas verifikasi terhadap usulan program dan kegiatan yang diusukan oleh seluruh SKPD terkait, dimana sangat sedikit kegiatan yang mendukung langsung kelima variable IPM tersebut diatas. Disamping itu dukungan Kabupaten/Kota yang masih relative terbatas. Hingga triwulan II tahun 2014 realisasi kegiatan yang mendukung langsung indikator IPM belum maksimal. Untuk itu, harus lebih selektif menetapkan program dan kegiatan Tahun 2015 sehingga diharapkan akan memperlihatkan kecenderungan pencapaian IPM yang jauh lebih baik.

Kedepan setiap SKPD perlu memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya financial yang kita miliki secara lebih efektif dan efisien. Efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran pembangunan di wilayah Sulawesi Selatan tergantung pada kualitas proses perencanaan dan penanggaran yang banyak dipengaruhi oleh kualitas, komitmen ataupun political will seluruh aparatur perencana dan pelaksana pembangunan daerah di masing-masing SKPD. Dengan malukan perbaikan terhadap kondisi tersebut diatas, maka yang diharapkan dapat dicapai dan ini juga merupakan perwujudan dari upaya-upaya untuk mendukung memenuhi hak dasar masyarakat yang paling utama, yaitu pendidikan dan kesehatan, serta dari aspek ekonomi yaitu peningkatan/perbaikan paritas daya beli masyarakat sebagai komponen indikator utama pembentukan Indeks Pembangunan Manusia.

Secara umum hal utama yang perlu mendapat perhatian dibidang pendidikan terletak pada kualitas dan akses masyarakat dalam mendapatkan layanan pendidikan dasar dan menengah, khususnya dalam menuntaskan wajib belajar 12. yang baru mencapai 8 Tahun. Ini terkait dengan biaya yang harus ditanggung, terutama dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Di samping itu, ketersediaan sebaran fasilitas pendidikan yang kurang memadai dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat. Kelangkaan fasilitas ini semakin meningkat seiring dengan meningkatnya strata pendidikan. Kualitas penyelenggaraan pendidikan juga membutuhkan perhatian khusus. Kualitas dimaksud terkait dengan standar muatan dan proses pembelajaran, kompetensi, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian. Penyebab ketiga adalah sikap atau wawasan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Di kalangan petani dan nelayan, anak lebih banyak dipandang sebagai aset produktif ketimbang sebagai "media" investasi (melalui pendidikan).

Dalam pembangunan kesehatan hal utama perlu medapatkan perhatian adalah optimalisasi penerapan pola hidup sehat dan perbaikan derajat kesehatan lingkungan dalam masyarakat, akses dan kualitas terhadap layanan kesehatan terutama pada masyarakat terpencil dan pulau-pulau serta belum mantapnya manajemen pembangunan kesehatan. Ketersediaan pangan yang terjangkau dengan kondisi daya beli masyarakat juga merupakan akar masalah dalam upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, karena sangat terkait dengan kualitas gizi masyarakat.

2. Peningkatan Produktifitas dan Pemasaran Hasil Pertanian

Pembangunan pertanian diarahkan pada kawasan strategis didaerah potensil khususnya pada wilayah pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten/Kota, hal ini diharapkan dapat meningkatkan nilai kontribusi sektor pertanian khususnya agro-industri dalam mengakselerasi peningkatan nilai produk domestik regional bruto dan mendukung lahirnya tingkat pertumbuhan yang berkualitas dengan asas pemerataan. Dalam struktur perekonomian sektor pertanian merupakan sektor basis yang dominan dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto Sulawesi Selatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk Sulawsi Selatan umumnya bekerja pada sektor pertanian yang sebahagian besar pada daerah Kabupaten. Priortas pembangunan sektor pertanian ini diarahkan pada peningkatan produktifitas dan daya saing hasil produksi termasuk penguasaan pasar baik domestik maupun pasar global.

Upaya peningkatan produksi pertanian khususnya komoditas unggulan serta peningkatan nilai ekspor komoditi pertanian telah memperlihatkan perbaikan dari Tahun keTahun. Capaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut;

Tabel 2-22 Capaian Indikator Ekonomi Sektor Pertanian

No.	Indikator	Capaian Thn 2012	Capaian Thn 2013
1.	Produksi Beras	Over stok 2,1 Juta Ton	Over stok 2,23 Juta Ton
2	Produksi Jagung	1,51 juta ton	1,55 juta ton
3	Populasi Ternak Sapi	1,112 Juta ekor	1,128 Juta ekor
4	Produksi Udang	28.150 Ton	34.420 Ton
5	Produksi Kakao (Coklat)	177.700 Ton	146,160 Ton
6	Produksi Rumput Laut (basah)	2,104 Juta Ton	2,422 Juta Ton

Penigkatan produktifitas sector pertanian tersebut diatas memperlihatkan angka yang cukup tinggi, dimana Indikator makro sector pertanian memperlihatkan pertumbuhan sebesar 6 persen meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Data tersebut diatas telah menempatkan posisi Sulawesi Selatan di tingkat Nasional sebagai penyanggah utama sector pertanian. Hal menunjukkan bahwa penetapan program dan kegiatan untuk meningkatkan produktifitas berjalan dengan baik. Kondisi ini perlu dijaga bahkan ditingkatkan kualitasnya pada penetapan kegiatan pembangunan tahun tahun berikutnya. Untuk menjaga titik jenuh pertumbuhan sektor petanian yang memperlihatkan kecenderungan semakin menurun, maka pertumbuhan harus diarkan pada pengembangan agro-industry dan agro-bisnis, yang sepenuhnya untuk mendorong laju pertumbuhan di sector industri khususnya indusutri pengolahan. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah dan untuk menjaga ketahanan ekonomi wilayah sulawesi selatan dari pengaruh ekonomi global.

Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah dukungan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada sektor ini. Upaya meningkatkan daya saing wilayah adalah dengan meningkatkan kualitas pengelolaan pasca panen khususnya terhadap komoditi unggulan pada sektor ini. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkesinambungan mendorong pengelolaan sumber-sumber pertumbuhan yang lebih berkualitas. Hal lain adalah keterlibatan dunia usaha dibutuhkan untuk

berinvestasi di sektor pertanian yang lebih besar agar dapat memicu surplus neraca perdagangan.

3. Peningkatan Industri Pengolahan dan Pariwisata Unggulan

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat petani dapat dilihat dari tingkat pendapatannya khususnya yang berpendapatan menengah kebawah. Sebagian besar masyarakat hidup di pedesaan dan bekerja pada sektor pertanian, maka perlunya membangun perekonomian yang berbasis kerakyatan dengan mengembangkan industri berbasis komoditas lokal (*agro-based industries*) yang memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan hasil pertanian. Untuk mendukung peningkatan pendapatan masyarakat khususnya pada sektor pertanian maka perlu penerapan teknologi pengolahan hasil pertanian yang dapat memberikan nilai tambah (*Value Added*) pada setiap komoditi yang dihasilkan. Dalam rangka mendukung pengembangan agro-indusri didaerah pedesaan dan perkotaan yang integratif, maka perlu pemanfaatan IPTEK secara berkelanjutan. Dampaknya diharapkan tingkat kesejahteraan petani semakin membaik.

Pengembangan *agro-based industries* dalam arti luas dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran perluasan dan penciptaan lapangan kerja, terutama di pedesaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta meningkatkan kualitas sumberdaya petani dan nelayan dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi wilayah. Upaya revitalisasi pertanian terkait erat dengan pembangunan pedesaan, karena penyebaran penduduk terbesar Sulawesi Selatan berada di pedesaan, maka peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan serta pertumbuhan sektor pertanian yang sarannya pada wilayah pedesaan terus didorong dalam rangka untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan yang berkeadilan dalam masyarakat Sulawesi Selatan.

Upaya ini akan mendorong pengurangan penduduk miskin, selain merupakan pelaksanaan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, juga salah satu cara untuk meningkatkan daya saing komodity pertanian di masa depan. Ini dilakukan melalui perbaikan kemampuan pelaku disektor pertanian, sehingga akan membuka jalan untuk meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat yang lebih baik.

Terkait dengan pengembangan pariwisata telah diarahkan dengan upaya meningkatkan daya saing produk industri pariwisata khususnya pariwisata unggulan, dimana hal ini perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Demikian juga dengan peningkatan kualitas lembaga dan manajemen pengelolaan kepariwisataan yang ada di Sulawesi Selatan.

**Tabel 2.23 Capaian Indikator Ekonomi
Produk Domestik Regional Bruto**

No.	Indikator	Capaian Thn 2012	Capaian Thn 2013*
1.	Investasi (ADHB)	mencapai 46,41 Triliun	mencapai 55.48 Triliun
2.	Nilai PDRB (ADHK)	59,7 Triliun Rupiah	64,2 Triliun Rupiah
3.	Pendapatan Perkapita (ADHB)	19,4 Juta Rupiah	22,1 Juta Rupiah
4.	Paritas Daya Beli	643.590 Rupiah	649.100 Rupiah
5.	Pertumbuhan Ekonomi	8,37 persen	7,65 persen
6.	Pertumb. Industri Pengolahan	9,32 persen	8,05 persen
7.	Nilai Ekspor (ADHB)	Naik 4,3 persen	4,17 persen

8.	Pertumbuhan sector Pertanian	5,14 persen	5,05 persen
9.	Wisatawan Nusantara/Manca Negara	4,8 juta kunjungan dan 64.601 kunjungan	4,95 juta kunjungan / 90.000 kunjungan

4. Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja

Prioritas rencana kerja Pemerintah daerah ini diarahkan untuk meningkatkan kesempatan kerja melalui kegiatan investasi serta memberi insentif bagi investor yang membuka usaha pengolahan produksi yang banyak menyerap tenaga kerja. Meningkatkan produktifitas tenaga kerja dengan cara memberi dukungan agar pekerja dapat meningkatkan kemampuannya dari produktifitas rendah ke produktifitasnya tinggi, melakukan perbaikan terhadap system pendidikan dan pelatihan dengan melihat perkembangan kebutuhan pasar tenaga kerja, serta memperbaiki semua regulasi terkait ketenaga kerjaan. Untuk memperluas informasi pasar kerja akan dilakukan dengan menmbah pusat-pusat informasi di daerah Kabupaten dan Kota yang terkoordinasi dengan baik dengan pusat informasi tenaga kerja Provinsi, serta meningkatkan kerja sama dengan asosiasi industry, Kadin, dan kelembagaan tenaga kerja lainnya baik dalam daerah dan luar daerah serta lembaga pasar tenaga kerja luar negeri.

Dalan Pasal 14 ayat (1) huruf n Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa ketenagakerjaan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah. Ruang lingkup meliputi aspek penawaran dan permintaan tanaga kerja, perencanaan ketenagakerjaan, dan informasi pasar kerja/peluang kerja. Semua aspek ini sangat menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi Sulawesi Selatan kedepan karena tingkat kualitas dan kuantitas produksi barang dan jasa yang dapat dihasilkan sangat tergantung dari ketersediaan dan kualitas tenaga kerja khususnya lembaga lembaga usaha yang bergerak pada sektor sektor unggulan. Ketersediaan tenaga kerja tesebut tidak hanya dilihat dari jumlahnya tetapi kualitas dan produktifitasnya, serta dukungan perbaikan terhadap iklim ketenagakerjaan diharapkan akan semakin membaik dari Tahun ke Tahun. Demikian juga terkait dengan semakin membaiknya perekonomian daerah akan mempengaruhi perbaikan terhadap upah minimum regional khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

Hingga Tahun 2014 diharapkan dapat meningkatkan luaran tenaga kerja dari lembaga pendidikan formal dan non formal, mendorong optimalisasi Fungsi Balai Latihan Kerja (BLK), memperluas kerjasama dengan dunia usaha terkait peluang TK, tersedianya tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar (infomasi pasar tenaga kerja), meningkatkan produktifitas tenaga kerja.

Capaian indikator sasaran pembangunan pada Tahun 2012 hingga Tahun 2013 antara lain diuraikan sebagai berikut;

**Tabel 2.24 Capaian Indikator Sosial
Sektor Kependudukan**

No.	Indikator	Capaian Thn 2012	Capaian Thn 2013*
1.	Angka Pengangguran Terbuka	5,87 Persen	Menurun 5,10 persen
2.	Jumlah Penduduk Yang Bekerja	3.351.908 Orang	3.430.000 Orang
3.	Angka Penduduk Miskin	805.920 Orang	857.450 Orang
4.	Jumlah Penduduk	8,190.222 Jiwa	8.342.000 Jiwa

5.	Angkatan Kerja	3.560.891 Jiwa	3.408.929 Jiwa
----	----------------	----------------	----------------

Data statistic/dinas kop. 2013

5. Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Lingkungan Hidup

Sebagai upaya perwujudan Sulawesi Selatan yang aman, nyaman, produktif yang berkelanjutan, maka pembangunan infrastruktur wilayah sangat terkait dengan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup. Degradasi kualitas lingkungan hidup antara lain menyebabkan banjir dan kekeringan, serta bencana alam lainnya yang semuanya bermuara pada penurunan produktifitas lingkungan, sebagai upaya mengatasi hal tersebut, maka di butuhkan adanya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Pembangunan berkelanjutan yang merupakan upaya sinergis pemabangunan wilayah dengan berkelanjutan lingkungan hidup merupakan salah satu langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan pemabangunan yang berwawasan lingkungan. Kebijakan ini terutama di arahkan untuk memelihara daya dukung lingkungan yang menunjukkan kecenderungan degradasi yang parah, serta melakukan upaya-upaya preventif terhadap pencemaran yang di timbulkan aktivitas manusia, baik yang dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat, maupun aktivitas industri.

Untuk mendukung peningkatan aktifitas sosial ekonomi masyarakat, maka pembangunan infrastruktur wilayah menjadi pendukung utama dalam memicu percepatan roda perekonomian daerah. Infrastruktur wilayah meliputi sarana transportasi, Energi Listrik dan Migas, Penataan pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan termasuk pengairan. Untuk itu maka diperlukan percepatan pembangunan infrastruktur wilayah secara terpadu dan berkesinambungan di Sulawesi Selatan. Penyediaan insfrastruktur pada semua sektor pembangunan yang memadai terutama untuk mendukung keterkaitan pembangunan antar daerah Kabupaten/Kota dapat meningkatkan sinergitas aktifitas perekonomian antar wilayah, untuk itu perlu dipercepat pembangunan seperti jaringan transportasi darat, laut dan udara secara terpadu yang mengarah kepada peningkatan kualitas pelayanan dan perluasan akses. Demikian pula pembangunan Infrastruktur Energi / Ketenagalistrikan, dan pengelolaan sumberdaya air, perlu dikembangkan secara terpadu antar sektor terkait.

Untuk mencapai optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang berkualitas maka harus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kondisi yang ingin dicapai adalah membaiknya sistem pengelolaan yang menjamin terciptanya keseimbangan antara pencapaian tujuan dengan potensi sumber daya yang tersedia dan secara ekonomi layak diterima secara rasional serta ramah terhadap lingkungan.

Berdasarkan capaian sasaran pembangunan infrastruktur wilayah dan penanganan lingkungan hidup yang lalu serta asumsi indikator sasaran Tahun 2013 dapat dicapai, maka pada Tahun 2014 di harapkan dapat meningkatkan ketersediaan sumberdaya Energi Listrik sesuai kebutuhan yang semakin meningkat, Meningkatkan pengelolaan sumberdaya energi alternatif sebagai energi pengganti Migas, Penataan permukiman yang layak huni dari aspek kesehatan dan lingkungan, serta terpeliharanya kondisi dan kualitas lingkungan hidup/berkurangnya kerusakan lingkungan hidup dan Berkurangnya tingkat kerusakan DAS dan luasan lahan kritis (rehabilitasi hutan).

Pembangunan Infrastruktur wilayah dan penanganan lingkungan hidup yang didasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan, telah mencapai hasil pembangunan sebagai berikut:

Tabel 2.25 Capaian Indikator Infrastruktur Bidang Fisik dan Prasarana

No	Indikator	Capaian Tahun 2012	Capaian Tahun 2013
1.	Pembangunan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan jalan pr prov sepanjang 117Km ▪ Kondisi mantap jalan 80 persen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan jalan sepanjang 144 Km; ▪ Kondisi mantap jalan 85 persen
2.	Rasio desa berlistrik	85 persen	90 persen
3.	Pengelolaan jaringan irigasi dan rawa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelolaan jaringan irigasi dan rawa seluas 36.936 Ha; ▪ Kondisi baik 85 persen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelolaan jaringan irigasi dan rawa seluas 36.501 Ha; ▪ Kondisi baik 90 persen
4.	Pemabangunan embung	72 buah	72 buah
5.	Pengeboran air tanah	5 titik	19. titik
6.	Desa mandiri energy	45 Desa (625 KK)	45 Desa (450 KK)
7.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	180.389 Ha	22.000 Ha.
8.	Penetapan Batas hutan	100 Km	75 Km.
9.	Ratio Eletrifikasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 70,56 persen. ▪ Terpantau pencemaran udara dan air pada 24 Kab/Kota dan 7 DAS 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 80,51 persen ▪ Terpantau pencemaran udara dan air pada 24 Kab/Kota dan 7 DAS.

6. Pembinaan serta Pengembangan Koperasi dan UMKM

Prioritas pembangunan ini diarahkan pada beberapa kebijakan antara lain mengembangkan sistem dan kelembagaan pendukung pembinaan usaha kecil dan menengah dimana hal ini dapat menciptakan keterpaduan antar unitkerja terkait. Memberi ruang gerak yang lebih leluasa untuk mengembangkan usaha secara mandiri dan professional. Melakukan revitalisasi terhadap kelembagaan yang terkait dengan kegiatan produksi, pasca panen, pengolahan hasil pertanian, pemasaran dan penyediaan modal untuk pengembangan usaha. Keberadaan lembaga ekonomi masyarakat sangat menentukan pengembangan dan pemberdayaan pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah yang dalam berbagai hal mempunyai banyak kelemahan dan keterbatasan. Kelembagaan ekonomi masyarakat tidak hanya menyangkut organisasi pengembangan usaha, akan tetapi juga meliputi ketersediaan regulasi yang mendukung dan tata cara dalam melakukan/manajemen usaha guna mencapai tujuan bersama sebagaimana yang dikehendaki dalam dunia usaha. Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat akan meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam menghasilkan produk baik barang maupun jasa yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dipasaran.

Dalam proses membangun keberadaan kelembagaan ekonomi khususnya koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah perorangan dalam meningkatkan efisiensi dan perbaikan manajemen usahanya sulit ditingkatkan jika dilakukan

sendiri sendiri. Sebagai contoh dalam pemanfaatan peralatan teknologi pertanian, pengelolaan sentra-sentra industri kecil, strategi pemasaran, penguatan kelembagaan ekonomi dengan memperbaiki tata niaga, akses terhadap permodalan yang semuanya hanya dapat dilakukan dengan membangun kerjasama yang saling menguntungkan satu dengan lainnya. Demikian juga di pedesaan, dalam rangka pengembangan lembaga keuangan mikro seperti Koperasi Simpan Pinjam telah mendapat dukungan dengan pendirian Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD) serta pendirian Bank UMKM ini semua yang akan dapat menjembatani kebutuhan bagi Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendapatkan fasilitasi pembiayaan dari lembaga keuangan bank dan non bank yang aksesnya sangat terbatas.

Pemerintah Daerah akan terus mendorong, memfasilitasi tumbuh kembangnya kelembagaan ekonomi yang berkaitan dengan pengembangan dunia usaha, termasuk koperasi khususnya koperasi wanita, serta usaha mikro kecil dan menengah. Terbangunnya kelembagaan ekonomi yang baik dan kuat akan memberi dampak positif bagi peningkatan produksi dan pengembangan usaha serta dapat menekan angka kemiskinan dan mengurangi pengangguran.

Untuk mencapai hal tersebut beberapa sasaran pokok yang perlu mendapatkan perhatian bagi seluruh pemangku kepentingan.

Capaian indikator sasaran pembangunan pada Tahun 2012 hingga Tahun 2013 antara lain diuraikan sebagai berikut;

**Tabel 2.26 Capaian Indikator Ekonomi
Bidang Koparesi dan Usaha Kecil Menengah**

No.	Indikator	Capaian Thn 2012	Capaian Thn 2013
1.	Jumlah SDM Wira usaha yang telah difasilitasi Diklat.	4.000 orang	5.000.. orang
2	Jumlha UMKM	909.670 unit	942.970.unit
3	Jumlah Koperasi	8.026 unit	8.230 unit
4	Jumlah Koperasi Aktif	5.554 unit	5.624 unit
5	Jumlah BPR	11 unit	11 unit
6	Jumlah Wira Usaha Baru	9.980 Orang	12.045 Orang

Dengan kondisi capaian hingga Tahun 2013, maka diharapkan hingga akhir Tahun 2014 kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Koperasi dan UMKM semakin membaik sesuai terget dalam RPJMD, Skim Kredit bagi petani dan nelayan semakin baik di Kab/Kota. Dengan membangun mekanisme perdagangan dan kelembagaan pasar yang sehat dan berpihak pada pelaku usaha, maka pendapatan masyarakat semaiKn membaik. Kualitas SDM pelaku usaha kecil dan menengah serta koperasi dalam majemem pengelolaan usaha manjadi hal yang penting demikian juga Pengembangan Koperasi Wanita yang mandiri dan berbadan hukum, Meningkatnya jumlah UMKM yang layak perbankan, dan berkembangnya lembaga penjamin kredit, serta Nilai Kredit yang tersalur dari lembaga keuangan kepada Koperasi dan UMKM yang didukung dengan regulasi yang mengatur pengembangan dan pembinaan Koperasi dan UMKM di Kabupaten/Kota.

C. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dengan berbagai kemajuan yang telah dicapai dalam mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dihubungkan dengan indikator pencapaian terhadap prioritas sasaran yang hendak dicapai RPJMD, maka terdapat berbagai isu dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian agar target indikator sasaran dapat dicapai.

1. Permasalahan Prioritas RKPD

Secara umum permasalahan pembangunan daerah adalah terkait dengan bagaimana meningkatkan kualitas hidup manusia agar kebutuhan hidup masyarakat dapat terpenuhi baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan umumnya belum mampu memperbaiki beberapa indikator pembangunan ekonomi dan social budaya, hal ini disebabkan oleh belum maksimalnya alokasi anggaran pembangunan yang menyentuh langsung akar permasalahan. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah belum sepenuhnya secara optimal mengarah langsung pada perbaikan pencapaian indikator RKPD, disamping itu banyaknya kebutuhan tetapi tidak didukung dengan peningkatan kemampuan kapasitas fiskal. Pembagian porsi penerimaan antar Pusat, Provinsi dengan daerah Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom belum memperlihatkan unsur pemerataan yang berkeadilan. Masalah berikutnya, berkenaan dengan daerah yang belum dapat mengoptimalkan sumberdaya keuangannya terkait dengan adanya keterbatasan infrastruktur, sarana dan prasarana di daerah potensial tertentu sehingga masih tergantung kepada daerah-daerah di Jawa yang merupakan penyedia infrastuktur khususnya disektor industri pengolahan.

a. Kebutuhan Dasar Masyarakat

Kondisi kualitas pendidikan masyarakat Sulawesi Selatan relatif masih tertinggal dengan daerah lain, hal ini tercermin dari tingkat kenaikan Angka Melek Huruf (AMH) rata-rata hanya mencapai 0,62 persen setiap Tahun sedangkan target yang harus dicapai adalah rata-rata kenaikan 1,69 persen setiap Tahun. Untuk angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) telah melampaui target yaitu mencapai kenaikan 0,31 persen setiap Tahun dari target RPJMD rata-rata naik 0,21 persen selama lima Tahun. Demikian juga dari aspek pendapatan yaitu terkait dengan kemampuan daya beli masyarakat (*Purchasing power parity*) yang tingkat kenaikannya rata-rata hanya 2,9 poin perTahun sementara target RPJMD 9,8 poin perTahun. Secara keseluruhan kondisi ini relatif masih rendah secara nasional. Capaian indikator sasaran ini perlu mendapatkan perhatian khusus bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya sektor yang menangani langsung, Untuk memacu capaian tersebut, maka perlu mengarahkan pada kegiatan yang terkait langsung dengan penanganan permasalahan tersebut diatas.

Terkait dengan masalah di bidang kesehatan khususnya indikator dari pembangunan kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Angka Harapan Hidup berada pada angka 70,2 Tahun 2011 dan 70,46 Tahun 2011, ini masih berada dibawah rata-rata nasional. Indikator pendukung terhadap AHH seperti indikator mortalitas, status gizi, sumber daya kesehatan, manajemen kesehatan dan lintas sektor terkait sebagian besar kriteria pengukurannya yang dicapai menunjukkan perkembangan yang kurang menggembirakan karena pencapaiannya justru mengalami penurunan. Permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah akses dan mutu pelayanan kesehatan yang masih rendah, yang dicerminkan dengan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) yang belum sebaik dengan rata-rata Nasional, demikian juga status gizi kurang balita.

Masalah rendahnya peningkatan Angka Indeks Pembangunan Manusia, dari seluruh indikator tersebut yang paling besar pengaruhnya di Sulawesi selatan adalah angka melek huruf dan Paritas daya beli. Dengan demikian maka Pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah kebijakan yang efektif dan terfokus pada program dan kegiatan yang terkait langsung dengan peningkatan capaian indikator tersebut diatas.

Ketersediaan angkatan kerja khususnya penduduk usia 15 Tahun keatas rata-rata meningkat dari Tahun 2010 ke Tahun 2011 naik sebesar 1,15 persen (41.107 Jiwa) hingga mencapai 3,612 juta jiwa, ini menandakan mereka yang siap untuk bekerja namun kondisi ini tidak diikuti dengan tingkat ketersediaan lapangan kerja. Walaupun penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian sedikit menurun sebesar 2,6 persen, namun tingkat pengangguran mengalami penurunan hingga mencapai 208.983 (5,87%-agustus 2012). Kondisi pencari kerja ini umumnya mereka yang berpendidikan namun tidak memiliki daya saing yang kuat. Disini perlunya Pemerintah memikirkan terkait dengan penyiapan tenaga kerja yang siap pakai disesuaikan peluang dan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Pemenuhan pangan yang tersedia, terjangkau dan aman sangat dipengaruhi oleh kondisi jaringan irigasi, khususnya pada daerah irigasi yang potensial menyumbang pemenuhan kebutuhan pangan nasional di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan terjadinya penurunan fungsi jaringan irigasi yang antara lain disebabkan oleh tingginya tingkat kerusakan karena umur konstruksi, bencana alam dan kurang optimalnya kegiatan operasi dan pemeliharaan di samping rendahnya keterlibatan petani dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi. Penurunan fungsi jaringan irigasi ini juga disebabkan kondisi debit sungai yang airnya digunakan untuk kebutuhan irigasi sangat dipengaruhi oleh musim hujan dan musim kemarau serta pesatnya perkembangan daerah permukiman dan industri telah menurunkan area resapan air dan mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air.

Ketersediaan infrastruktur wilayah berupa sarana dan prasarana transportasi dan perhubungan, mendukung upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan layanan pendidikan dan kesehatan, kesempatan kerja dan lapangan usaha sebagai upaya meningkatkan aksesibilitas antar wilayah guna mendukung kelancaran aktifitas perekonomian dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Aksesibilitas wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan ditunjang oleh kondisi jalan dan jembatan. Saat ini panjang dan kondisi jalan Provinsi mengindikasikan bahwa kondisi jalan Provinsi di Sulawesi Selatan masih berkinerja rendah, sehingga belum optimal untuk mendukung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat. Untuk itu diperlukan peningkatan kinerja dengan melakukan pembangunan dan perbaikan konstruksi pada ruas-ruas jalan yang kerusakannya cukup parah, sehingga pelayanan transportasi dapat meningkat yang pada akhirnya akan berimplikasi pada peningkatan produktifitas masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan.

Saat ini aksesibilitas antar wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan masih mengandalkan sarana transportasi berupa angkutan kota baik angkutan kota antar Provinsi maupun angkutan dalam Provinsi. Sebagai upaya mengefektifkan dan mengefesienkan aksesibilitas antar wilayah dibutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi massal berupa jaringan jalur kereta api umum antar kota lintas Provinsi yang menghubungkan Makassar dan Parepare, jaringan jalur kereta api kawasan Mamminasata dan Bus Rapid Transportation (BRT).

Pencapaian pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air bersih di perkotaan dan di perdesaan membutuhkan usaha yang maksimal, mengingat masih besarnya kesenjangan upaya pencapaian target RPJMD Tahun 2008-2013 akan pemenuhan cakupan air bersih khususnya pada wilayah perdesaan yang kesenjangan antara target dan capaian antara lain disebabkan belum optimalnya upaya pemenuhan kebutuhan air bersih akibat besarnya jumlah rumah tangga baik di perkotaan

maupun di perdesaan yang memerlukan akses air bersih dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tersedia.

Pengelolaan sumberdaya alam oleh masyarakat perlu memperhatikan prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan hidup terkait dengan upaya mewujudkan Sulawesi Selatan yang asri dan lestari. Dalam merencanakan dan melakukan berbagai kegiatan pembangunan harus mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan. Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini adalah terjadinya degradasi kualitas lingkungan hidup yang menyebabkan besarnya dampak bencana alam seperti banjir dan kekeringan, yang membutuhkan adanya upaya sinergitas pembangunan wilayah dengan keberlanjutan lingkungan hidup melalui pemeliharaan daya dukung lingkungan dan peningkatan upaya-upaya preventif terhadap pencemaran yang ditimbulkan oleh aktivitas industri, melakukan peningkatan tutupan lahan sebagai masyarakat, maupun aktivitas industri, melakukan peningkatan tutupan lahan sebagai upaya mempertahankan keberlanjutan dukungan sumber daya alam bagi pelaksanaan pembangunan khususnya pada hutan dan lahan kritis, serta mencanangkan Gerakan Sulawesi Selatan Hijau (Sulawesi Selatan Go Green), yang merupakan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup oleh masyarakat, dunia usaha, Pemerintah dan sekolah.

b. Kualitas Hasil Produksi Pertanian

Belum optimalnya penerapan Iptek dalam proses produksi hasil pertanian dan penerapan Strategi Petik Olah Jual akan melemahkan daya saing di Sulawesi Selatan. Hal ini disebabkan oleh buruknya kinerja perekonomian dalam 4 (empat) hal pokok, yaitu:

- 1) buruknya kinerja perekonomian yang tercermin dalam kinerjanya di perdagangan khususnya Net Ekspor, Investasi, ketenagakerjaan, dan stabilitas harga,
- 2) lambatnya perkembangan industri pengolahan khususnya pada sektor pertanian. Sebagian besar komoditi unggulan diekspor dalam bentuk gelondongan. Lemahnya pengembangan berbagai peraturan dan perundangan untuk iklim usaha kondusif, lemahnya koordinasi akibat kerangka institusi publik yang masih banyak tumpang tindih, dan kompleksitas struktur sosialnya,
- 3) lemahnya efisiensi usaha khususnya penerapan Petik Olah Jual dalam mendorong peningkatan produksi dan inovasi pemanfaatan IPTEK secara efektif dan efisien, pasar tenaga kerja yang belum dapat bersaing secara optimal, akses ke sumberdaya keuangan yang masih rendah, serta praktik dan nilai manajerial yang relatif belum profesional,
- 4) keterbatasan di dalam infrastruktur, baik infrastruktur fisik, teknologi, dan infrastruktur dasar yang berkaitan sektor industri khususnya industri pengolahan.

Secara umum yang dapat mempengaruhi daya saing Sulawesi Selatan belum optimalnya sinergitas perencanaan lintas kabupaten/kota dan Provinsi sehingga menghasilkan program yang bersifat parsial dan kurang terfokus untuk mengantisipasi hambatan-hambatan baik di hulu, di hilir maupun untuk mengantisipasi dinamika Rancangan lingkungan strategis. Disamping itu terbatasnya infrastruktur industri (agro-industri) mengakibatkan lemahnya daya saing wilayah dalam merangsang pertumbuhan sektor industri pengolahan. Dalam Era Globalisasi ASEAN – CHINA Free Trade Area dapat menjadi ancaman pemasaran hasil produksi pertanian tanaman pangan serta industri lokal yang akan mempengaruhi (*Net Ekport*) menjadi devisa neraca perdagangan.

c. Sumberdaya Energi

Kebijakan pembangunan Energi khususnya ketenagalistrikan di Sulawesi Selatan memperlihatkan penurunan dari segi penyediaan pasokan tenaga listrik, hal ini antara lain disebabkan oleh sistem energi Sulawesi Selatan masih bertumpu pada energi listrik produk BUMN yang sarat dengan subsidi yang pasokannya semakin tidak mencukupi dibanding peningkatan kebutuhan konsumen khususnya untuk pengembangan usaha industri dan perdagangan. Krisis energi listrik di Sulawesi Selatan disebabkan oleh belum adanya produksi energi listrik yang baru, dimana hal ini disebabkan oleh keterbatasan keuangan negara sementara yang mengalami krisis energi hampir dirasakan oleh seluruh wilayah di Indonesia. Kedepan sebaiknya dikembangkan sumber energi pengganti diversifikasi energi dengan energi terbarukan yang lebih hemat dalam hal pembiayaan seperti air, batubara, Gas, dan angin (tersedia cadangan cukup besar), disamping itu pembangkit listrik yang sudah terbangun baik PLN maupun swasta agar yang lebih fokus pada aspek pemeliharaan agar produksi optimal tetap terjaga.

Jumlah unit pembangkit tahun 2011 naik dari 106 menjadi 221 Unit Pembangkit, namun kebutuhan yang semakin besar sehingga Daya mampu energi listrik Sulawesi Selatan hingga dari Tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami penurunan produksi dari sebesar 56.498.378 KWh (0,22 persen), yaitu dari Produksi sendiri sebesar 8.646.858 KWh dan yang dibeli sebesar 247.191.684 KWh. Namun demikian diharapkan pertumbuhan produksi tenaga listrik hingga akhir Tahun 2012 diharapkan tetap stabil untuk memnuhi beban puncak. Kebijakan kedepan walaupun didukung oleh produksi listrik swasta namun kondisi ini akan mengalami disparitas ketersediaan tenaga listrik, jika pembangunan pembangkit yang baru tidak diselesaikan secepat mungkin untuk mendukung penyediaan pasokan tenaga listrik. Pemadaman bergilir adalah bukan solusi yang mendasar demikian juga penghematan listrik hanya mampu menurunkan sedikit beban puncak. Sementara aktifitas sektor bisnis dan industri pengolahan akan mengalami penurunan produksi dan dapat memicu laju infasi. Permasalahan ini agar tidak hanya Pemerintah Pusat yang memikirkan, tetapi Pemerintah Daerah juga perlu mengambil berbagai kebijakan untuk mempercepat pelaksanaan yang direncanakan dan mencari potensi penambahan kapasitas produksi energi listrik lainnya.

Potensi pengembangan listrik batubara cukup besar. Batubara yang digunakan di Sulawesi Selatan yang masih disupply dari luar rata-rata 720 ribu ton perTahun, sementara potensi di Sulawesi Selatan mencapai 36.392.000 ton yang tersebar pada 8 (delapan) Kabupaten. Untuk PLTA potensi pada 10 (sepuluh) Kabupaten dengan 19 (Sembilan belas) lokasi yang dapat membangkitkan 2.947 MW, sementara potensi pembangkit listrik mini hidro pada 15 (lima belas) Kabupaten dengan 20 lokasi dapat menghasilkan 74.372 KW. Demikian juga untuk tenaga angin potensi yang terdapat pada 3 (tiga) Kabupaten daerah pesisir pantai dengan rata-rata kecepatan angin 2-6 meter/detik yang dapat membangkitkan tenaga listrik sampai 10 KW untuk satu kincir angin. Kondisi dan potensi ini perlu mendapatkan perhatian dalam merumuskan berbagai program dan kegiatan prioritas.

Pertumbuhan kebutuhan energi listrik di Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 Tahun terakhir mencapai rata-rata 7,7 persen per Tahun. Ratio elektrifikasi Sulawesi Selatan pada Tahun 2011 sebesar 74,59 persen yang menunjukkan bahwa masih ada sekitar 26,41 persen atau 452.440 KK yang belum terjangkau oleh aliran listrik dan umumnya berada di daerah perdesaan dan kepulauan. Sedangkan ratio desa berlistrik pada Tahun 2011 sebesar 84,36 persen, yang menunjukkan bahwa masih ada sekitar 15,64 persen atau 465 desa yang belum berlistrik. Pemenuhan kebutuhan akan energy listrik khususnya pada daerah

perdesaan dan kepulauan tersebut sangat memungkinkan untuk dipenuhi mengingat Provinsi Sulawesi Selatan memiliki beberapa jenis sumber energi terbarukan yang dapat dikembangkan sebagai sumber energi listrik. Beberapa sumber energi terbarukan yang dapat dikembangkan di Provinsi Sulawesi Selatan adalah pemanfaatan energi surya melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya, serta pemanfaatan limbah komoditas peternakan maupun pertanian melalui pemanfaatan energi biogas yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan dan kepulauan akan energi listrik.

2. Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan

a. Pemerintahan Umum

Tuntutan dan harapan dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah adalah terlaksananya terselenggaranya Pemerintahan daerah yang baik dan bersih pada semua level Pemerintahan baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) mempunyai makna terpenuhinya aspek hukum dan manfaat dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian adalah birokrasi. Permasalahan terkait dengan hal tersebut adalah Pola rekrutmen, promosi dan pengisian jabatan yang belum didasarkan pada meritokrasi dimana masih menggunakan pola seleksi umum tes tertulis belum dilakukan tes uji kompetensi. Pengisian jabatan belum transparan dan profesional dimana pejabat yang menentukan karier pegawai belum sepenuhnya bekerja secara obyektif dalam memberikan penilaian dimana penempatannya belum sepenuhnya disesuaikan dengan standar keahlian dan pengalaman serta pendidikan formal dan non formal yang telah dimiliki terkait jabatannya.

Masih kurangnya kualitas kerjasama inter/atau antar lembaga Pemerintah, dimana cenderung masih egoisme sektoral dengan kinerja bersifat parsial dan kualitas koordinasi yang rendah. Kurangnya kreatifitas dan inovasi yang dilakukan setiap SKPD dalam mengefektifkan dan mengefisienkan pemanfaatan anggaran pembangunan. Persoalan tersebut juga terkait dengan kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan formal dan non formal khususnya yang bersifat teknis pelaksanaan, kerjasama dengan lembaga hukum dalam menegakkan peraturan daerah dimana jika tidak dikoordinasikan dengan baik akan sulit dilakukan *law enforcement* terhadap Perda tersebut.

Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah masih rendah dalam menguasai tupoksinya, demikian juga keahlian atau penambahan/peningkatan pendidikan belum terencana dengan baik dimana cenderung aparat memilih sendiri pendidikan formal lanjutan yang dianggap mudah tamat dan tidak didasarkan pada kebutuhan keahlian sesuai dengan tupoksinya. Akibatnya pendidikan strata yang ditamati cenderung sama dan menumpuk pada satu bidang. Keseragaman bidang keahlian yang ditamati oleh aparatur kurang mendukung kompleksitas tugas Pemerintahan yang seharusnya diisi oleh personil yang mempunyai keahlian dan berpengalaman dimana ditempatkan.

b. Pelayanan Publik

Berdasarkan hasil identifikasi dalam pemberian pelayanan publik terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian khususnya instrument yang jelas untuk dipedomani dalam mengevaluasi kualitas pelayanan publik. Keberadaan Kelembagaan Pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan baik dalam penyelenggaraan tugas Pemerintah umum dan pembangunan aparatur negara, belum memperlihatkan kinerja yang optimal. Hal tersebut tercermin dari berbagai tindakan penyelewengan dan penyalagunaan wewenang dalam bentuk Kolusi

Korupsi dan Nepotisme yang telah merugikan masyarakat. Hal ini terlihat dari lambatnya proses penyelesaian kasus korupsi yang jumlahnya cukup besar, disamping itu pelayanan publik terkait dalam proses aktivitas perekonomian khususnya dalam bidang investasi, perdagangan dan jasa terkait proses perizinan usaha, proses perolehan modal usaha, serta aktifitas dibidang perpajakan dan kepabeanan. Kondisi demikian semakin menghambat dan memperlemah kinerja aparatur dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan berwibawah. Disamping itu belum adanya Standar Pelayanan Minimal yang baku dan disepakati untuk semua SKPD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Permendagri Nomor 6 Tahun 2007, serta permendagri Nomor 27 Tahun 2007.

Pelaksanaan Pelayanan publik terkait dengan kompetensi aparat Pemerintah belum berkembang secara optimal disebabkan oleh masih terbatasnya sumberdaya aparatur, pembinaan dan pengawasan aparat penegak hukum belum sepenuhnya menyentuh nilai-nilai moral, etik dan keadilan terhadap pelaksanaan tugas yang dapat mengurangi kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan permasalahan sebagaimana diuraikan diatas, maka tantangan bagi Pemerintah bagaimana menentukan langkah langkah kebijakan yang efektif dan terfokus, serta dukungan dan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan jalannya pembangunan khususnya dalam mengoptimalkan pelayanan publik.

c. Kapasitas Keuangan Daerah

Pelimpahan kewenangan kepada daerah sebagai salah satu wujud dari prinsip otonomi daerah yang telah dilaksanakan sejak Tahun 2000 juga diikuti dengan desentralisasi fiskal. Prinsip ini telah memberikan keleluasaan daerah dalam mengatur penerimaan dan pengeluarannya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Agar belanja atau pengeluaran dilaksanakan secara efektif dan efisien maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Perda Nomor 2 Tahun 2010 yang memberi penegasan bahwa harus ada keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran dalam arti semua belanja kegiatan harus dapat menyelesaikan permasalahan dan mencapai target indikator sasaran yang ditetapkan dalam rencana.

Namun dalam pelaksanaan masih banyak kendala dan permasalahan antara lain adalah disiplin penggunaan anggaran masih rendah khususnya dalam pengalokasian anggaran masih tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, disamping itu konsistensi antara penganggaran dengan perencanaan dimana dokumen perencanaan yang ada fungsinya masih merupakan persyaratan administrasi saja. Program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam RKPD sering tidak muncul dalam APBD sehingga sasaran khususnya indikator kinerja yang ingin dicapai seiring jauh dari harapan. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja, kinerja yang banyak ditampilkan adalah kinerja output sementara kinerja outcome dan *impact* umumnya belum memperlihatkan hasil yang ingin dicapai (strategi pencapaiannya). Oleh sebab itu diharapkan agar hal ini menjadi ukuran berhasilnya suatu kegiatan. Oleh sebab itu penetapan indikator kinerja outcome dan impact harus diikuti dengan penjelasan apa kegiatan tersebut berfungsi atau bermanfaat kemudian dapat dilihat pada alat pembukti indikator berupa dokumen indikator hasil pembangunan daerah yang dikeluarkan oleh lembaga resmi.

3. Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan daerah Sulawesi Selatan Tahun 2015 berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Pemerintah daerah RPKD 2014 dan Tahun 2013 yang lalu. Analisis terhadap isu-isu strategis RPJMD dan RPJMN

yang diprediksikan akan aktual pada Tahun 2015. Berdasarkan berbagai perspektif tersebut, isu-isu strategis pembangunan daerah Sulawesi Selatan diidentifikasi sebagai berikut.

a. Isu Strategis Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Dalam struktur produk domestik regional bruto Sulawesi Selatan masih didominasi oleh sektor pertanian baik produksinya maupun penyerapan tenaga kerjanya, sementara harapan terhadap pergeseran pertumbuhan dari sector pertanian ke sektor industri dan pengolahan sangat lambat. Dominasi oleh produk primer belum memberikan nilai tambah yang dan tingkat pendapatan yang maksimal. Fenomena tekanan populasi di perdesaan semakin tidak seimbang dengan ketersediaan lahan pertanian yang semakin berkurang. Oleh Karena itu, perlu akselerasi pergeseran dari pertanian ke kegiatan agroindustri/agribisnis disamping itu perlu industri pengolahan hasil pertanian dalam skala besar untuk meningkatkan nilai ekspor.

Pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan antar kawasan. Sulawesi Selatan telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berada di atas rata-rata nasional, tetapi pertumbuhan itu lebih berlangsung pada kawasan tertentu dan sektor tertentu. Pertanian dan perdesaan yang menampung banyak tenaga kerja pertumbuhannya tidak berimbang dengan jasa dan perkotaan yang serapan tenaga kerjanya lebih kecil. Ini berakibat pada dampak pertumbuhan yang belum optimal terhadap akselerasi penurunan kemiskinan dan pengangguran sehingga belum bisa melewati kecepatan rata-rata nasional.

Kemiskinan, pengangguran, pendapatan perkapita dan daya beli. Persentasi penduduk miskin dan angka pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan konsisten menurun dalam lima Tahun terakhir, tetapi dari segi jumlah populasinya masih cukup besar. Pendapatan per kapita Sulawesi Selatan juga terus mengalami kenaikan tetapi kecepatan kenaikan tersebut belum melewati kecepatan dari kenaikan PDRB/kapita rata-rata nasional. Meskipun laju inflasi relatif baik dan nilainya cenderung di bawah rata-rata nasional, tetapi karena pendapatan per kapita yang rendah maka daya beli masyarakat juga masih rendah. Karena itu, kualitas pertumbuhan ekonomi perlu terus ditingkatkan agar lebih efektif bagi penurunan kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan pendapatan per kapita dan daya beli.

Kerjasama Kabupaten/Kota dan kawasan andalan. Transformasi perekonomian ke arah industri yang seiring dengan peningkatan pendapatan per kapita secara relatif sama dengan rata-rata nasional memerlukan efektivitas kawasan ekonomi tertentu dalam mengakselerasi nilai tambah. Kawasan andalan Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar (Mamminasata) dalam suatu integrasi perekonomian memerlukan akselerasi pelayanan bagi berkembangnya industri. Begitu pula diperlukan akselerasi bagi pengembangan wilayah selatan (Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai dan Selayar) dalam mendorong pertanian, perikanan dan pariwisata; pengembangan kawasan sentra produksi padi sawah berbasis agribisnis di Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang dan Luwu; pengembangan agribisnis dan klaster kakao kawasan Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur dan Pinrang; kawasan perkebunan dan pariwisata di Enrekang, Tana Toraja dan Toraja Utara; pelayanan pelabuhan di Barru dan Parepare serta kawasan pertambangan di Maros dan Pangkep; serta kerjasaman kabupaten dalam pengelolaan teluk Bone.

Wilayah maritim dan pulau-pulau kecil. Salah satu wilayah yang paling tertinggal dalam perekonomian dan akses layanan publik adalah pulau-pulau kecil, terutama di Kabupaten Pangkep, Selayar dan Sinjai. Sementara itu, pulau-pulau kecil tersebut memiliki potensi dan keunikan, misalnya potensi Terumbu Karang di

Pulau Kapoposang (Makassar) dan Taka Bonerate (Selayar). Sulawesi Selatan juga memiliki keunikan dengan kemampuan masyarakat dalam pembuatan perahu perikanan dan pinisi untuk wisatawan di Bulukumba. Perhatian kepada ekonomi maritim ini perlu menjadi bagian untuk menunjukkan identitas dan daya saing wilayah Sulawesi Selatan.

Perwujudan Sulawesi Selatan sebagai pilar utam pembangunan nasional yang salah satu pilarnya adalah sektor Pertanian yang menargetkan surplus beras 3 juta Ton sangat membutuhkan ketersediaan lahan pertanian. Saat ini terjadi peningkatan laju alih fungsi lahan pertanian khususnya pada lahan pertanian pangan, untuk itu dibutuhkan adanya upaya perlindungan lahan pertanian berkelanjutan sebagaimana amanat UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Khususnya pada lahan pertanian pangan yang beririgasi teknis yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi dalam RTRWP Sulawesi Selatan sebagai Kawasan Lahan Pangan Berkelanjutan.

Transformasi perekonomian ke arah industri yang seiring dengan peningkatan pendapatan per kapita secara relatif sama dengan rata-rata nasional dapat diupayakan melalui upaya pengembangan wilayah berbasis kawasan andalan yang diharapkan akan berperan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya. Pengembangan kawasan andalan bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya kawasan dalam rangka pembangunan ekonomi melalui pengaturan pemanfaatan potensi kawasan dan kerjasama antar wilayah. Penetapan kawasan andalan di Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas kawasan andalan darat dan kawasan andalan laut yang penetapannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

b. Isu Strategis Aspek Pelayanan Publik

Akses dan kualitas pendidikan. Perbaikan telah dicapai dalam akses dan kualitas pendidikan di Sulawesi Selatan, khususnya melalui kebijakan pendidikan gratis yang diimplementasikan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, tetapi akselerasi kinerja yang dicapai itu masih perlu diteruskan untuk menyamai kinerja nasional. Peningkatan angka rata-rata lama sekolah masih dihambat oleh Angka Partisipasi Sekolah yang rendah, sementara angka buta huruf masih tinggi karena besarnya porsi buta huruf pada usia 50 Tahun ke atas, serta efek putus sekolah SD yang masih signifikan dekade sebelumnya. Porsi penduduk dengan kualifikasi luaran pendidikan tinggi baru sekitar 1,3%, masih jauh dari kondisi ideal. Kualitas lulusan SD hingga SLTA sudah mengalami peningkatan dilihat dari tingkat kelulusan ujian nasional, namun demikian perlu diperhatikan keberlanjutan prestasi tersebut khususnya terkait dengan kinerja guru yang telah tersertifikasi. Selain itu, kompetensi spesifik untuk bidang kerja tertentu seperti kebutuhan pilot dan pramugari bagi penerbangan, tenaga pariwisata dan perhotelan, tenaga ahli pertanian, tenaga kerja internasional dan sebagainya memerlukan penguatan dalam bentuk pendidikan vocational. Mengantisipasi kecenderungan global atas bangkinya masyarakat berpengetahuan (*knowledge based society*), Sulawesi Selatan khususnya kota Makassar juga perlu mendorong produksi pengetahuan melalui perguruan tinggi, jasa penerbitan dan elemen *civil society*.

Akses dan kualitas kesehatan. Melalui program kesehatan gratis oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, kemajuan dalam kinerja pelayanan kesehatan telah semakin nyata. Angka harapan hidup sudah hampir menyamai rata-rata nasional, angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan, secara konsisten mengalami perbaikan. Ketersediaan rumah sakit dan puskesmas serta dokter dan paramedis semakin mendekati standar ideal. Karena itu, tantangan ke depan yang utama adalah pemerataan akses yang semakin fokus ke daerah terpencil, pedalaman dan pulau kecil, upaya perbaikan cakupan kelahiran yang

ditangani tenaga medis serta penanganan gizi buruk, dan di sisi lain mendorong Kota Makassar sebagai daerah tujuan layanan kesehatan dan pendidikan kedokteran tingkat nasional bahkan Asia Tenggara.

Infrastruktur dan fasilitas wilayah. Infrastruktur dasar untuk akses listrik, air bersih, dan sanitasi layak telah berkinerja cukup baik dalam lima Tahun terakhir. Namun demikian, infrastruktur jalan nasional, Provinsi dan kabupaten dengan kualifikasi rusak berat masih signifikan. Selain itu, infrastruktur irigasi dan jalan tani untuk menunjang ekonomi pertanian sebagian mengalami kerusakan. Karena itu, dalam menunjang akselerasi perekonomian koridor Sulawesi, peningkatan kualitas jalan yang sudah ada dan pembangunan jalur kereta api trans-Sulawesi dari Makassar ke Manado, serta rehabilitasi jaringan irigasi yang ada, menjadi agenda mendesak. Fasilitas wilayah yang menunjang posisi Sulawesi Selatan sebagai daerah tujuan dan simpul jejaring bagi berbagai aktivitas, khususnya fasilitas perhubungan, hotel dan restoran ke daerah tujuan wisata, fasilitas dan kapasitas penyelenggaraan pertemuan internasional bidang ilmiah, seni dan budaya, juga memerlukan dukungan berkelanjutan.

Kesetaraan gender, partisipasi politik dan kualitas demokrasi. Kesetaraan gender adalah isu internasional yang menjadi keniscayaan untuk direspon dalam pembangunan daerah. Indeks pembangunan dan pemberdayaan gender Sulawesi Selatan masih berada di bawah rata-rata nasional sehingga pada periode 2013-2018 akselerasi sangat diperlukan. Partisipasi politik dalam makna yang lebih substansial, yakni kesadaran ideologis dalam keterlibatan politik serta fungsi partai politik sebagai wahana pendidikan demokrasi bagi rakyat, merupakan tantangan mendesak. Isu ini bermuara pada tuntutan perwujudan demokrasi yang tidak hanya terkait dengan ketersuaaraan aspirasi tetapi juga pada keberfungsian demokrasi bagi kesejahteraan.

Infrastruktur dan fasilitas wilayah. Pembangunan Infrastruktur wilayah diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas fisik antar daerah dan antar kawasan guna mendukung kelancaran aktifitas perekonomian dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah yang ditunjang oleh sarana dan prasarana transportasi, jalan dan jembatan jaringan pelayanan air minum, jaringan irigasi dan rawa serta ketersediaan energy listrik. Perbaikan jaringan irigasi pada daerah irigasi yang potensial menyumbang pemenuhan kebutuhan pangan nasional di Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai upaya mendukung target overstock pangan. Selain itu juga dibutuhkan adanya upaya mengoptimalkan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, peningkatan keterlibatan petani dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi serta pengendalian alih fungsi lahan. Peningkatan cakupan pelayanan air minum yang merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat diprioritaskan pada pemenuhan cakupan air bersih perdesaan yang kesenjangan antara target dan pencapaian masih cukup besar.

Mengoptimalkan pemanfaatan sumber energy terbarukan guna memenuhi kebutuhan energy listrik pada daerah perdesaan dan kepulauan melalui pembangunan PLTS yang memanfaatkan energy pembangunan PLTMH dan PLTPH yang memanfaatkan energy air, serta pembangunan PLT Biogas yang memanfaatkan limbah komoditas peternakan dan pertanian. Perwujudan jaringan transportasi antar moda merupakan kebutuhan sebagai upaya meningkatkan keterkaitan antar wilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah melalui pengembangan jaringan transportasi yang terpadu. Pengembangan jaringan transportasi yang terpadu dapat diwujudkan melalui pengembangan akses prasarana dan sarana transportasi darat, laut dan udara yang menghubungkan antar kawasan perkotaan guna mendukung pemantapan koridor ekonomi

c. Isu Strategis Aspek Daya Saing Daerah

Keberlanjutan reformasi birokrasi dan kePemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi merupakan prioritas nasional yang telah berjalan dengan baik di Sulawesi

Selatan, ditandai dengan perolehan opini WTP tiga Tahun dari BPK untuk administrasi keuangan dan penilaian LPPD peringkat dua dan tiga dalam dua Tahun terakhir dari Kemendagri. Berbagai penghargaan dari Pemerintah pusat terkait substansi penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan juga telah diperoleh. Pada tingkat kabupaten/kota, perbaikan administrasi keuangan dan Pemerintahan juga semakin mengalami kemajuan. Untuk lima Tahun ke depan, keberlanjutan dan peningkatan kualitas dari penyelenggaraan Pemerintahan umum dan administrasi keuangan diharapkan semakin signifikannya mendukung *good governance*

Pengamalan agama dan kerukunan umat beragama. Masyarakat Sulawesi Selatan adalah masyarakat yang religius. Tantangan yang dihadapi adalah pemeliharaan keadaan yang kondusif bagi pengamalan agama dan kerukunan antar umat beragama di tengah arus informasi dan keterbukaan komunikasi yang semakin bebas. Selain itu, juga diperlukan perhatian bagi ketercukupan sarana/prasarana dan fasilitas ibadah, ketercukupan juru dakwah dan penceramah agama, keberlangsungan pendidikan agama dalam keluarga, pendidikan melek aksara alquran, dan peningkatan peran agama sebagai sumber etos perkembangan ekonomi dan kehidupan sosial-kemasyarakatan.

Keberlanjutan pertanian, nilai tukar petani, dan ketahanan pangan. Pertanian adalah kekuatan utama perekonomian Sulawesi Selatan dan merupakan keunggulan dalam kontribusinya bagi ketahanan nasional. Dalam lima Tahun terakhir, program terukur untuk meningkatkan kinerja produksi untuk beras, jagung, ternak sapi, udang, rumput laut dan kakao telah dijalankan, dan posisi Sulawesi Selatan sebagai lima besar produsen beras nasional dan tujuh besar produsen jagung nasional tercapai. Peningkatan produksi komoditas lainnya juga signifikan tercapai. Untuk lima Tahun ke depan, peluang pasar komoditas pertanian perlu dimanfaatkan dengan baik melalui pengembangan rantai nilai pada rangkain aktivitas pertanian dari hulu hingga hilir agar menghasilkan produk berdaya saing tinggi yang sekaligus memperkuat landasan kesejahteraan masyarakat.

Kebudayaan, inovasi dan teknologi. Kebudayaan sebagai cara pikir, cara kerja dan cara hidup suatu masyarakat merupakan identitas dari masyarakat tersebut. Revitalisasi, penguatan, dan apresiasi terhadap nilai, norma, kebijakan, pengetahuan, seni dan artefak lokal-asli beragam etnis dan daerah di Sulawesi Selatan menjadi keniscayaan ketika tersadari bahwa kebudayaan yang berasal dari aras global-modern-universal tidak bisa dihindari untuk bersentuhan dan berinteraksi dengan kebudayaan lokal asli tersebut. Tantangannya adalah sampai mana persentuhan antara yang lokal-asli-spesifik dengan yang global-modern-universal tersebut terhibridisasi satu sama lain sehingga menghasilkan kebaruan, secara *soft ware* dalam bentuk ide dan gagasan baru serta secara *hard ware* dalam bentuk teknologi/peralatan baru.

Rancangan iklim, kelestarian lingkungan dan pengelolaan ruang. Hal ini merupakan isu strategis internasional yang sangat mempengaruhi pembangunan Sulawesi Selatan, khususnya karena pertanian dalam arti luas merupakan andalan bagi kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat. Produksi pertanian sangat rentan dengan Rancangan iklim. Efek *la-nino* dan *el-nino* terhadap pengelolaan irigasi, varietas tanaman, dan hama-penyakit sudah dialami dalam pembangunan pertanian. Ancaman terhadap kerusakan terumbu karang dan produktivitas perikanan karena pemanasan air laut, keberadaan pulau-pulau kecil karena kenaikan permukaan air laut, semakin memerlukan perhatian. Gerakan hijau penanaman pohon yang telah dijalankan selama ini juga masih perlu ditingkatkan efektivitasnya dalam memperbaiki ekologi daerah aliran sungai bagi keberlanjutan ketersediaan air. Terkait erat dengan isu-isu ini adalah penataan ruang, yakni keniscayaan untuk melakukan pemanfaatan ruang secara konsisten dengan rencana tata ruang yang berlaku secara nasional, Provinsi dan

kabupaten/kota.

Keamanan, ketertiban, harmoni sosial dan kesatuan bangsa. Kondisi ini terus mengalami perbaikan, namun demikian, potensi konflik sosial terkait masalah agraria, relasi antar etnis, identitas daerah, kontestasi politik, demonstrasi yang mengganggu ketertiban umum dan tauran/konflik antar mahasiswa atau mahasiswa dengan aparat, tetap memerlukan kewaspadaan dan langkah pencegahan, untuk perbaikan pencitraan Sulawesi Selatan sebagai daerah tujuan dari semua kepentingan baik nasional maupun internasional.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH

Perkembangan kerangka ekonomi daerah hingga awal triwulan II Tahun 2014 memperlihatkan gambaran keterkaitan dengan capaian indikator makro ekonomi yang secara sistematis telah mendorong dinamika ekonomi wilayah dan diharapkan dapat mengembangkan dan memantapkan ketahanan ekonomi wilayah Sulawesi Selatan hingga akhir Tahun 2014. Berdasar pada analisa terhadap kondisi perekonomian secara makro pada Tahun 2013, serta perkiraan kondisi perekonomian pada Tahun 2014, maka diuraikan kondisi ekonomi makro dan sasaran-sasaran pokok pembangunan yang diprediksi dapat dicapai pada akhir Tahun 2015 diuraikan sebagai berikut.:

A. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Perkembangan proses transformasi struktural perekonomian daerah diharapkan berimplikasi pada membaiknya beberapa variabel kunci indikator makro ekonomi di Sulawesi Selatan seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan paritas daya beliserta pengendalianinflasi. Kondisi tersebut dapat dilihat pada gambaran kinerja ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2012, Tahun 2013 serta perkiraan kondisi Tahun 2014, dimana pada Tahun 2014 kebijakan ekonomi daerah Sulawesi Selatan ditujukan pada peningkatan pertumbuhan khususnya sector pertanian dan industry pengolahan (*pro growth*) dengan mengarahkan pada pertumbuhan ekonomi berkualitas dengan penekanan pada aspek pemerataan yang berkeadilan khususnya masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah. Dengan demikian diharapkan akan dapat/mampu memecahkan masalah-masalah sosial mendasar terutama yang terkait dengan kemiskinan dan pengangguran (*pro poor*).

Hingga Triwulan II Tahun 2014 peranan konsumsi (*final demand*) masih mendominasi terhadap pembentukan PDRB dan pertumbuhan ekonomi. Peranan investasi masih sepertiga dari peran konsumsi. Hal lain yang penting dan membutuhkan perhatian adalah terjadinya (*mines Net Ekspor*) Defisit Neraca Perdagangan atas dasar harga berlaku dan hal ini terkait dengan besarnya pertumbuhan konsumsi masyarakat dan Pemerintah serta naiknya nilai impor. Untuk itu maka kebijakan kedepan diarahkan pada perbaikan iklim investasi dengan membangun sinergitas dan kerjasama yang nyata dengan dunia usaha baik dalam negeri maupun luar negeri. Investasi tersebut diharapkan untuk mendukung sektor industri pengolahan dan untuk memperbaiki iklim usaha pada industri kecil dan menengah secara berkesinambungan dan industry besar untuk jangka panjang.

Melihat masih rendahnya peran dan kontribusi investasi swasta dan Pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk mendorong percepatan peranan swasta dan masyarakat dalam kegiatan investasi. Investasi swasta erat kaitannya dengan tingkat suku bunga yang pada jangka pendek sifatnya tetap dan dapat mempengaruhi laju inflasi. Untuk jangka panjang diharapkan peningkatan investasi yang dibutuhkan adalah untuk industri startegis dan skala besar. Untuk kebijakan setiap Tahun yang harus dilakukan yaitu meningkatkan investasi pada sektor industri pengolahan (*agro-industry*) yang akan berdampak pada perbaikan (*value added*) nilai tambah dari hasil produk khususnya produk unggulan pada sektor pertanian. Demikian juga untuk mendukung agro-bisnis, maka kemampuan wirausaha masyarakat Sulawesi Selatan perlu dipacu antara lain melalui pendidikan dan latihan Iptek terapan yang berkaitan dengan bisnis dan kewirausahaan dan ini sangat diperlukan.

Kebijakan fiskal sebagai suatu instrument manajemen permintaan sangat mempengaruhi tingkat aktifitas perekonomian. Fenomena ketidak seimbangan antara kemampuan anggaran untuk membiayai kebutuhan yang semakin besar memaksa kita untuk lebih ketat menerapkan pola anggaran berbasis kinerja dan menjadi salah satu strategi untuk efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran pembangunan daerah di Sulawesi Selatan.

Kebijakan Pemerintah terkait dengan pajak dan retribusi yang memegang peranan penting dalam memacu Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu diupayakan menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki. Dengan tetap mengutamakan peningkatan pelayanan dan mempertimbangan kondisi perekonomian masyarakat, dimana Pajak pendapatan (*income tax*) yang diperoleh diharapkan tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi agar barang dan jasa yang dihasilkan dapat lebih kompetitif.

Sesuai dengan arah kebijakan ekonomi tersebut diatas dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan internal, sasaran ekonomi makro Tahun 2014 adalah pertumbuhan ekonomi diharapkan tetap berada diatas angka 8 persen, dengan asumsi kita dapat menekan laju inflasi dan memperbaiki Neraca perdagangan (*Net Ekpor*). Untuk mendapatkan angka pertumbuhan sebesar tersebut di atas, maka investasi (pembentukan modal dan Rancangan stok) yang diharapkan dapat mencapai diatas Rp 23,55 triliun (ADHK) dengan asumsi nilai icor 2,28. Alokasi anggaran Pemerintah daerah (*APBD dan APBN*) dialokasikan pada program kegiatan yang produktif khususnya sektor Non Migas khususnya pertanian dan industri pengolahan. Apabila kondisi stabilitas ekonomi tersebut diatas dapat terjaga dengan baik, maka aktifitas perekonomian akan berjalan baik. Dengan kondisi tersebut kualitas hidup masyarakat khususnya yang bergerak disektor pertanian akan lebih baik yang antara lain akan tercermin dari kualitas peningkatan beberapa indikator ekonomi makro serta indikator sosial lainnya seperti jumlah pengangguran semakin menurun, daya beli masyarakat semakin membaik, penduduk miskin semakin berkurang.

1. Kondisi Perekonomian Wilayah

Perkembangan Rancangan struktur ekonomi dihitung berdasarkan presentase sumbangan masing-masing aktifitas ekonomi (9 sektor/lapangan usaha) dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku untuk cakupan wilayah Provinsi atau wilayah kabupaten/kota. Sektor yang mengalami penurunan pada Tahun 2012 adalah Sektor pertanian penurunan dari 25,35 persen menjadi 24,55 persen, sector pertambangan dari 6,17 persen menjadi 5,39 persen. Sektor yang mengalami kenaikan sector industry pengolahan dari 12,19 persen menjadi 12,26 persen dan sector perdagangan dari 17,59 persen menjadi 17,98 persen PDRB Sulawesi Selatan berdasarkan harga konstan Tahun 2011 sebesar Rp.55,116 Triliun, Pada Tahun 2012 diharapkan meningkat sebesar 75,767 Triliun. Sejalan dengan tingkat pertumbuhan PDRB tersebut, struktur ekonomi juga mengalami Rancangan. Kontribusi sektor pertanian pada berdasarkan Harga berlaku secara perlahan menurun 3 Tahun terkhir hingga 2011. Peran sektor industri sedikit naik namun masih relative sangat lambat. Sementara kontribusi sektor jasa dan perdagangan mengalami peningkatan cukup besar hingga pada Tahun 2011.

Sementara itu pendapatan perkapita meningkat dari Rp. 16,82 juta pada Tahun 2011 menjadi Rp 19,46 juta pada Tahun 2012 dan diperkirakan meningkat menjadi Rp 22,34 Juta pada Tahun 2013. Peningkatan ini memperlihatkan bahwa aktifitas perekonomian dalam wilayah Sulawesi Selatan semakin membaik. Seiring dengan peningkatan pendapatan perkapita tersebut, juga terjadi peningkatan daya beli masyarakat dari Tahun 2010 – 2011 yaitu

Rp. 636.600,- PerTahun, menjadi Rp. 640.300,- (meningkat 0,67 persen) , dan diperkirakan Rp.642,77 pada Tahun 2012.

Tingkat pertumbuhan dan pergeseran struktur ekonomi tersebut diatas, juga didorong oleh perkembangan kualitas peningkatan investasi, baik investasi Pemerintah maupun swasta dan masyarakat, serta dukungan alokasi anggaran Pemerintah yang bersumber dari hasil pajak, retribusi dan tabungan masyarakat. Dari kegiatan ekonomi yang dilakukan didaerah Sulawesi Selatan yang berasal dari investasi Pemerintah, swasta dan masyarakat termasuk kegiatan ekspor di atas secara langsung berdampak pada penciptaan lapangan kerja baru dan menurunkan tingkat pengangguran.

Sejalan dengan perkembangan PDRB tersebut, pertumbuhan ekonomi meningkat 8,18 persen pada Tahun 2010, dan menurun 7,66 % Tahun 2011, kemudian naik menjadi 8,31 % Tahun 2012. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut di atas telah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengatasi pengangguran. Peningkatan Jumlah angkatan kerja diharapkan juga akan meningkatkan peluang dan kesempatan kerja dengan dukungan peningkatan kualitas angkatan kerja.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan juga sangat ditentukan oleh besarnya Investasi Atas dasar harga berlaku, baik investasi Pemerintah, swasta dan masyarakat. Berdasarkan data kerangka makro ekonomi dari aspek permintaan, jumlah investasi terus mengalami peningkatan, namun belum diikuti dengan surplus neraca perdagangan. Untuk menjaga agar tingkat pertumbuhan ekonomi tetap sesuai target yang telah ditentukan, maka pada Tahun 2013 diharapkan investasi kurang lebih mencapai Rp 48 Triliun. Dengan demikian maka pada Tahun 2013 diharapkan dapat memicu penurunan angka pengangguran dan penduduk miskin dipedesaan dan khususnya di perkotaan.

Selanjutnya, neraca perdagangan memperlihatkan bahwa nilai ekspor Sulawesi Selatan pada Tahun 2011 tercatat sebesar 30,13 triliun, sementara perkembangan nilai impor pada Tahun sama tercatat lebih besar yaitu 39,67 Triliun. Dari angka ini menunjukkan bahwa neraca transaksi perdagangan luar negeri Sulawesi Selatan pada Tahun 2012 mengalami devisa sebesar 2,8 triliun. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian dengan memicu industri pengolahan terhadap komoditi pertanian sebelum diekspor.

Dari gambaran beberapa indikator ekonomi di atas sepanjang Tahun 2009, hingga Tahun 2012, maka diharapkan ada Rancangan peningkatan ataupun perbaikan pada Tahun 2013 dan 2014. PDRB harga konstan propinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat meningkat dari Rp. 59,708 Trilyun Tahun 2012 menjadi Rp 65,48 triliun Tahun 2013, dengan pertumbuhan ekonomi Tahun 2013 dapat mencapai 8,35 persen. Demikian halnya dengan pendapatan perkapita pada Tahun 2013 dapat mencapai Rp. 22,6 juta dengan daya beli mencapai Rp. 650.000,-

Kinerja kegiatan ekonomi tersebut di atas, secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja bidang sosial terutama pada peningkatan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Bila pendapatan per kapita kita semakin meningkat, maka dapat mempengaruhi perbaikan daya beli masyarakat , peluasan kesempatan kerja, menurunnya jumlah penduduk miskin serta masa depan perekonomian dapat semakin membaik. Hal ini, tercermin pada kenaikan beberapa indikator sosial yang telah diuraikan pada bab kedua.

Secara umum investasi yang berada dalam suatu wilayah dikategorikan berdasarkan sumber pendanaan investasi tersebut. Sumber pendanaan pertama adalah yang berasal dari Pemerintah yaitu meliputi sumber pendanaan dari APBN

dan sumber pendanaan melalui APBD. Alokasi dana APBN yang masuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sepanjang Tahun 2009 s/d Tahun 2013 meningkat dari Tahun keTahun dimana anggaran tersebut meliputi dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan alokasi APBN murni, Alokasi Dana APBN yang disalurkan lewat dana perimbangan. Adapun untuk rencana anggaran Tahun 2014 terangkum dalam buku II RKPD 2014 ini dikategorikan sebagai tiga sumber pembiayaan APBD, APBN, PHLN.

Pada saat bersamaan selain alokasi dana tersebut diatas, dana dekonsentrasi yang masuk kedaerah, akan membantu membiayai kebutuhan dasar penyelenggaraan Pemerintahan, juga diharapkan dapat memacu perekonomian daerah. Peningkatan perekonomian daerah pada akhirnya akan memicu pertumbuhan aktifitas perekonomian didaerah sehingga berdampak pada peningkatan kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun tidak selamanya dana perimbangan ini menjadi andalan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Disatu saat diharapkan kontribusi dari PAD lebih berperan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dan tetap dalam semangat desentralisasi keuangan dan otonomi daerah.

Kontribusi dana PAD di wilayah Sulawesi Selatan selama 4 (empat) Tahun terakhir terhadap total pendapatan daerah menunjukkan peningkatan dari 1,95 Triliun 2011 menjadi 2,19 Triliun Tahun 2012, sementara target 2013 sebesar 2,64 Triliun. Selain itu beberapa kabupaten menunjukkan angka perbandingan PAD terhadap total pendapatan yang masih rendah. Besarnya kebutuhan dari dana desentralisasi antar kabupaten/kota di wilayah Sulawesi Selatan belum menunjukkan percepatan peningkatan kearah tingkat kemandirian selama periode empat Tahun terakhir. Tingkat kemandirian kebutuhan fiskal untuk pelayanan publik berdasarkan indeks pelayanan publik perkapita masih tinggi. Demikian juga kapasitas fiskal berdasarkan ukuran besarnya potensi penerimaan PAD pada hampir kesemua Kabupaten/kota di wilayah Sulawesi Selatan masih membutuhkan kerja keras untuk meningkatkan.

Secara total jumlah dari ketiga kelompok dana Pemerintah yang masuk ke Sulawesi Selatan untuk dibelanjakan dalam wilayah Sulawesi Selatan (APBN 5 tahun terakhir) adalah sebesar Rp.17,96 Trilyun pada Tahun 2008, dan pada Tahun 2013 menjadi Rp. 34,35 Trilyun (*naik 16,39 Triliun*). Belanja ini tidak secara keseluruhan dibelanjakan untuk belanja modal, namun juga untuk belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Keserasian antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung belum memperlihatkan kinerja yang baik, dimana belanja tidak langsung (gaji,honor,perjalanan dsb.) masih jauh lebih besar dari belanja langsung khususnya belanja modal untuk produktifitas. Kinerja APBD belum memperlihatkan anggaran berbasis kinerja yang mengedepankan efisiensi dan efektifitas belanja.

Investasi untuk membiayai pembangunan daerah yang direncanakan diharapkan menghasilkan kegiatan produksi dan jasa yang pada gilirannya menciptakan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat sehingga akan menurunkan persentase tingkat pengangguran dan kemiskinan di Sulawesi Selatan. Peningkatan produksi barang dan jasa erat kaitannya dengan permintaan konsumsi dan ekspor, sehingga Investasi sebaiknya diarahkan pada kegiatan yang banyak menyerap tenaga kerja (padat karya) dan diarahkan pada investasi industri pengolahan yang komoditinya berorientasi ekspor. Akumulasi dari aktifitas ekonomi tersebut akan meningkatkan kemampuan masyarakat dan dunia usaha dalam membayar retribusi dan pajak daerah, yang berujung pada peningkatan Pajak Asli Daerah (PAD). Upaya Pemerintah dalam mendorong perkembangan investasi dilakukan antara lain melalui pemberian kepastian hukum dan kepastian

berusaha, penyederhanaan prosedur perizinan investasi, peningkatan perlindungan berinvestasi yang diatur melalui Peraturan Daerah (PERDA), dan penciptaan sistem insentif agar produk yang dihasilkan mampu bersaing (kompetitif).

Meskipun dari sisi proporsinya, Peranan investasi Pemerintah (APBN dan APBD) untuk keseluruhan investasi yang masuk kedalam wilayah Sulawesi Selatan dipandang relatif kecil, walaupun investasi ini diharapkan dapat memicu geliat perekonomian daerah. Dari kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat yang berasal dari investasi Pemerintah, swasta dan masyarakat termasuk kegiatan ekspor maupun impor di atas secara langsung telah berdampak pada penciptaan lapangan kerja baru dan menurunkan tingkat pengangguran. Bila kondisi sosial dan ekonomi yang stabil dapat dipertahankan sepanjang Tahun ini, dan upaya penciptaan kondisi lain yang lebih baik, seperti keamanan, kepastian regulasi dan masalah lainnya, maka investasi swasta di Sulawesi Selatan dapat meningkat terus.

2. Tantangan Dan Prospek Perekonomian Daerah

Berbagai kebijakan Pemerintah diarahkan untuk memperbaiki prospek pembangunan ekonomi dan keuangan Provinsi Sulawesi Selatan, hal ini dapat dilihat melalui tinjauan terhadap perkembangan beberapa variabel ekonomi makro yang merupakan sasaran utama dari pembangunan ekonomi. Variabel tersebut berkenaan dengan aspek pendapatan dengan distribusinya, pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan yang berkeadilan, aspek ketenagakerjaan yang ditunjukkan dengan jumlah tingkat pengangguran penduduk, aspek stabilitas harga ditunjukkan dengan fluktuasi dari tingkat harga umum yang mempengaruhi tingkat inflasi, aspek perdagangan terkait hubungan dengan negara lain yang ditunjukkan dengan kegiatan ekspor-impor. Ketiga hal tersebut dapat terealisasi jika didukung peran aktif dari seluruh lembaga ekonomi baik dari swasta, Pemerintah maupun dari dunia perbankan serta lembaga ekonomi masyarakat di daerah yang menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing secara efisien dan efektif didukung dengan Pemerintahan yang menerapkan prinsip *good governance*.

Perkembangan kondisi perekonomian daerah ditinjau dari aspek pertumbuhan ekonomi menunjukkan kinerja yang baik. Perekonomian Sulawesi Selatan Tahun 2012 tumbuh cukup tinggi sebesar 8,31 persen dibandingkan Tahun 2010 sebesar 7,6 persen. Dari aspek *demand* Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan terutama didukung oleh kinerja Investasi dan konsumsi yang semakin baik. Terkait dengan *supply* dimana pertumbuhan ekonomi didorong oleh sektor pertanian, perdagangan dan jasa serta sektor industri pengolahan. Disamping itu kedepan akan menunjukkan fluktuasi yang banyak dipengaruhi oleh Rancangan kondisi sosial ekonomi dan politik terutama terkait dengan proses pelaksanaan Pemilu pada Tahun 2014 hingga pasca Pemilukada Tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi secara rata-rata kedepan sedikit akan mengalami perbaikan dibanding perkiraan capaian Tahun 2013.

Indikator lain yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah investasi khususnya investasi swasta dalam dan luar negeri yang akan memperlihatkan sedikit perbaikan, dimana dunia usaha atau pebisnis akan menyongsong proses awal kepemimpinan yang baru pasca-pelaksanaan Pemilukada di Sulawesi Selatan. Hal lain yang akan mempengaruhi adalah terkait dengan rencana pengurangan subsidi dan peralihan penggunaan bahan bakar premium ke bahan bakar pertamax yang harganya jauh lebih tinggi dan secara tidak langsung akan mempengaruhi kenaikan harga barang dan jasa yang akan mendorong tingkat inflasi. Kondisi ini menjadi tantangan kedepan untuk memperbaiki kemampuan daya beli masyarakat sehingga distribusi pendapatan akan semakin baik (*Gini Rasio mendekati angka "0"*). Kondisi terakhir semakin mendekati angka 1(satu) ini perlu mendapatkan perhatian dan dikendalikan dengan baik agar dapat memperbaiki

prospek perekonomian Sulawesi Selatan khususnya pada Tahun 2014.

Hal lain dari aspek pendapatan yang belum mendapatkan perhatian selama ini adalah aspek pemerataannya. Ukuran terkait dengan distribusi pendapatan, yaitu angka *gini ratio* yang kedepan masih cukup besar antara 0,3 hingga 0,35 angka ini semakin mendekati 0, yang berarti menunjukkan perbaikan namun masih memperlihatkan besarnya tingkat ketimpangan pembagian kesejahteraan ekonomi antar penduduk di Sulawesi Selatan dan hal ini menjadi tantangan kedepan untuk diperbaiki kesenjangan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Kondisi ketenagakerjaan kedepan tampaknya juga masih belum menggembirakan, seperti ditunjukkan data (2008-2012) kecenderungan penurunan jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian sebesar 2,6 persen, tetapi pada sektor industri naik 7,5 persen, perdagangan dan jasa cenderung akan semakin membaik yaitu naik 18,47 persen. Kondisi ini memperlihatkan kecenderungan Investasi dari Tahun keTahun meningkat, konsumsi yang tetap stabil serta kecenderungan peningkatan nilai ekspor walaupun net-ekspor masih defisit. Perkembangan angka pengangguran memperlihatkan penurunan dari Tahun keTahun, yaitu dari 236.926 jiwa menjadi 208.983 jiwa. Terkait dengan stabilitas harga, juga menunjukkan kondisi stabil namun laju inflasi yang mengalami peningkatan yaitu Tahun 2011 Inflasi sebesar 2,88 persen dan Tahun 2012 mmencapai 4,41 persen. Hal ini sedikit memperlambat laju peningkatan Investasi dan Ekpor sedikit menurun dibandingkan dengan laju peningkatan konsumsi baik konsumsi Pemerintah, swasta dan masyarakat. Defisit NP oleh karena adanya peningkatan permintaan konsumsi masyarakat terkait barang import baik sandang, pangan dan peralatan elektronik, alat komunikasi serta otomotif yang harganya relatif murah dan bersaing.

Dari sisi perdagangan eksternal dalam kaitannya dengan kegiatan ekspor-impor, mengalami kontraksi sebesar 1,82 persen. Dimana Laju peningkatan Impor lebih besar dari laju peningkatan export. Peningkatan pertumbuhan ekspor terutama didorong oleh komoditas unggulan Sulsel seperti kakao, ikan tuna, udang, sapi, dan rumput laut serta kayu olahan. Kenaikan kinerja Impor Sulawesi Selatan yang melebihi ekspor disebabkan oleh impor barang setengah jadi yang banyak digunakan oleh perusahaan kendaraan/elektronik sebagai Factor Input dalam memproduksi barang jadi (**intermediate goods**) serta tingginya impor barang dan jasa antar pulau. Kedepan akan dalakukan perbaikan kualitas terhadap komoditas unggulan yang memiliki peluang ekspor sehingga berdayasaing dipasar global. Komoditi tersebut seperti kakao, udang, sapi, ikan tuna, rumput laut. Dengan peningkatan kualitas akan meningkatkan Nilai Tambah dan nilai ekspor.

B. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah dibutuhkan untuk pencapaian target RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 dan mendukung target pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD 2013-2018. Kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana komponen keuangan daerah meliputi komponen Pendapatan daerah, Belanja daerah dan Pembiayaan daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dengan demikian, arah kebijakan Keuangan Daerah akan diuraikan pada masing-masing komponen Keuangan Daerah tersebut.

Secara umum arah kebijakan keuangan daerah tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundan-undangan yang berlaku saat ini antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka arah kebijakan keuangan daerah dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2015 bertujuan antara lain untuk :

1. Mendukung proses pembangunan daerah secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah, serta prioritas pembangunan dan urusan pemerintahan.
2. menjamin ketersediaan dana pembangunan daerah secara memadai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. meminimalkan resiko fiskal sehingga dapat menjamin kesinambungan anggaran pembangunan daerah.
4. kesinambungan anggaran dengan merujuk kepada ketentuan UU Nomor 27 Tahun 2003 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 terkait dengan batas defisit anggaran dan batas pinjaman/utang.
5. peningkatan akuntabilitas dan transparansi anggaran serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Kebijakan keuangan daerah tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran seperti merasionalkan keseimbangan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung, mengarahkan pemanfaatan anggaran pada pencapaian *Millenium Development Goals (MDGs)* dan mendukung prinsip *pro-poor, pro-job, dan pro-growth* serta *Enviroment*. Kinerja perekonomian daerah Provinsi Sulawesi Selatan juga tergantung pada capaian proyeksi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dan realisasi investasi serta kemampuan pengeluaran investasi oleh Pemerintah daerah untuk memicu pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan stabilitas politik dan keamanan baik nasional maupun tingkat daerah khususnya terkait proses dan pasca-pemilu. Beberapa hal strategis pada bidang Ekonomi Keuangan di wilayah Sulawesi Selatan yang perlu mendapat perhatian antar lain adalah:

1. masih terjadi kesenjangan perekonomian antar kabupaten di Sulawesi Selatan;
2. belum optimalnya pengembangan potensi industri pengolahan dan jasa finansial;
3. belum optimalnya kemampuan daerah dalam peningkatan PAD untuk meningkatkan dukungan terhadap APBD;
4. diperlukan revitalisasi sektor pertanian sebagai lumbung pangan nasional;
5. masih rendahnya nilai investasi untuk mendorong aktivitas ekonomi produktif khususnya industri pengolahan;
6. belum optimalnya pemanfaatan potensi sub-sektor unggulan pada sektor pertanian antara lain perikanan dan kelautan di beberapa wilayah potensial.

Perlu dilakukan pembenahan terhadap kawasan strategis khususnya pembangunan pusat-pusat pelayanan ekonomi wilayah, membangun kelembagaan perbankan yang tangguh, pembangunan pusat pelayanan pendidikan tinggi dan kesehatan regional serta pembenahan pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia. Untuk itu, ruang gerak anggaran perlu lebih dioptimalkan tidak hanya melalui mobilisasi sumber pendapatan, tetapi juga melalui upaya penggalan sumber pembiayaan antara lain dari pinjaman dan obligasi daerah, serta dengan melakukan efisiensi dan efektifitas belanja. Hal ini sebagai upaya dalam mewujudkan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pusat pelayanan di kawasan timur indonesia, perlu dilakukan pembenahan.

1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD. Untuk mencapai hal tersebut **Pertama** : dilakukan Intensifikasi meliputi peningkatan pelayanan pajak, pembinaan SDM dan administrasi, peningkatan WaBin, Sosialisasi perpajakan, dan koordinasi lintas pemda/ sektor/SKPD. **Kedua** : dilakukan Ekstensifikasi dengan pemberlakuan Perda, Pengembangan jenis dan obyek pajak, Pemberlakuan tarif PKB Progresif, dan Rasionalisasi tarif retribusi dengan catatan tidak mempengaruhi stabilitas perekonomian lokal.

Sumber Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain lain pendapatan yang sah. Dana perimbangan merupakan dana transfer Pemerintah kepada daerah yang terdiri dari: (1) Bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, (2) Dana Alokasi Umum, dan (3) Dana Alokasi Khusus. Melihat kondisi PAD di kabupaten/kota, maka arahan kebijakan pendapatan daerah lebih di fokuskan pada upaya untuk meningkatkan setiap komponen PAD. Secara khusus kebijakan yang dapat dilakukan dalam upaya peningkatan pendapatan dari PAD yang dapat dilakukan melalui langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi. Selain PAD sumber pendanaan yang lain adalah Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum serta Dana Alokasi Khusus

Pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengalami kenaikan setiap Tahun yang cukup signifikan, pada Tahun 2011 mencapai 3,103 Trilyun dan kecenderungan capaian Tahun 2012 mencapai 4,554 Trilyun serta diproyeksikan untuk Tahun 2013 akan mencapai 5,136 Trilyun. Seluruh jenis penerimaan daerah memperlihatkan kecenderungan meningkat selama tiga Tahun terakhir. Namun kenaikan yang cukup baik terlihat dari pendapatan asli daerah, sebaliknya jenis penerimaan lainnya memperlihatkan kenaikan yang tidak terlalu besar bahkan Bagi Hasil Bukan Pajak mengalami penurunan dari target pada Tahun 2010.

Tabel 3.22 Pendapatan Daerah Provinsi SulSel

No	JENIS PENDAPATAN	2012	2013*	2014**
I	Pendapatan Asli Daerah	2.376.750.112.292	2.587.845.794.829	3.004.195.000.000
a.	Pajak Daerah	1.729.076.066.267	2.461.760.558.000	2.721.165.000.000
b.	Retribusi Daerah	111.669.544.400	123.880.288.050	69.280.000.000
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan	62.366.797.388	64.987.092.656	70.600.000.000
d.	Lain-lain PAD yang sah	70.049.843.217	57.378.410.000	143.150.000.000
II	Dana Perimbangan	1.327.471.697.027	1.457.776.123.700	1.568.315.500.000
a.	Bagi Hasil	248.345.316.602	284.159.927.879	288.315.500.000
b.	Dana Alokasi Umum	996.939.548.000	996.939.584.000	1.210.000.000.000
c.	Dana Alokasi Khusus	42.774.470.000	42.774.470.000	70.000.000.000
III	Lain Lain Pendapatan sah	885.994.042.000	928.924.640.000	910.600.000.000
	Jumlah Pendapatan Daerah	4.665.215.439.319	5.022.565.598.529	5.483.110.500.000

Sumber : Dispenda sulsel. *) Perkiraan **) Proyeksi

Pendapatan dari dana perimbangan sebenarnya berada diluar kendali

Pemerintah daerah karena alokasi dana tersebut ditentukan oleh Pemerintah pusat berdasarkan formula yang telah ditetapkan. Fluktuasi penerimaan dari dana perimbangan sangat tergantung dari peningkatan penerimaan negara. Oleh sebab itu maka penerimaan daerah lebih difokuskan pada peningkatan penerimaan PAD.

Terdapat empat jenis pajak daerah yaitu; Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar kendaraan bermotor, dan Pajak pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan. Disamping jenis pajak ini terdapat pula retribusi yaitu, Retribusi Jasa Umum meliputi retribusi pelayanan kesehatan, Tera ulang, Penyelenggara pendidikan. Retribusi Jasa Usaha meliputi; RPKD, RPPUD, Penginapan/Villa, Tempat rekreasi dan Olah Raga, Tempat Parkir, Kepelabuhanan, dan Penyeberangan Air. Retribusi perizinan tertentu meliputi; Izin trayek dan Izin usaha perikanan

Permasalahan yang dihadapi sampai saat ini terletak pada; Pembatasan kewenangan pengelolaan PDRD, Bagi hasil pendapatan belum optimal, Pemberdayaan asset belum optimal, Sistem Waskat dan Wasdal masih lemah, Perusda/BUMD belum maksimal sebagai penghasil PAD, Masih lemahnya sanksi pelanggaran terhadap pelanggan pajak dan retribusi, serta masih kurangnya partisipasi Swasta/BUMN dalam membangun daerah.

2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah

Dalam konteks belanja, Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan belanja daerah dilakukan secara **adil dan merata** agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi untuk mendorong meningkatkan aspek pelayanan publik. Untuk mengendalikan tingkat **efisiensi dan efektifitas** penggunaan anggaran, maka dalam perencanaan belanja perlu memperhatikan;

(1) Penerapan secara jelas tujuan dan sasaran yang akan dicapai, serta hasil dan manfaat terkait indikator kinerja yang ingin dicapai, **(2)** Prioritas kegiatan dengan memperhitungkan beban kerja dan menggunakan standar harga yang rasional sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tabel 3.23 Perkembangan APBD Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun	Pendapatan (Triliun Rp)	Belanja (Triliun Rp)	Defisit (Miliard Rp)
2009	2.254.701.091.668	2.455.558.026.755	200.856.935.086
2010 ^M	2.493.615.885.334	2.706.432.203.914	212.816.318.579
2011	3.124.213.285.773	3.385.714.310.554	278.814.746.369
2012	4.601.370.274.463	4.760.942.065.502	212.338.655.821
2013	5.022.565.598.529	5.644.397.117.453	621.831.518.924

Belanja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung mengalami peningkatan dari Tahun 2011 sebesar 1,965 Triliun dan Tahun 2012 sebesar 3,360 Triliun termasuk dana BOS. Untuk Tahun 2013 diprediksi Belanja tidak langsung mencapai 3,816 Trilyun. Pengeluaran Pemerintah untuk **belanja langsung** Tahun 2011 sebesar 1,415 Triliun kemudian Tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 1,384 Triliun. Untuk Tahun 2013 diprediksi akan mencapai 1,63 Trilyun. Kedepan diharapkan belanja langsung sedikit lebih besar (khususnya belanja yang menambah nilai investasi) dari pada belanja tidak langsung.

Kebijakan belanja tidak langsung terkait dengan belanja pegawai untuk

Tahun 2012 sebesar 728,6 Milyar sedangkan untuk Tahun rencana 2014 diproyeksikan mencapai 828,37 Milyar. Hal ini untuk mempersiapkan kenaikan gaji antara 5-15 persen sebagai antisipasi terhadap pidato presiden pada pengantar Nota Keuangan APBN, Mempersiapkan akress 2,5 persen untuk KGB, tunjangan, dan mutasi, pemberian insentif pegawai termasuk gaji ke 13 yang diberikan setiap Tahunnya.

3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan terkait dengan pengeluaran pembiayaan diperuntukkan pada Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan modal (investasi daerah), Pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah serta pembayaran utang belanja. Pada Tahun anggaran Tahun 2014 kebijakan pengeluaran pembiayaan yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah adalah; Penyertaan modal (investasi) daerah yang disediakan untuk penyertaan modal pada perusahaan daerah, Pembayaran hutan pada Tahun anggaran 2014 dianggarkan sebagai kewajiban pembayaran pokok utang pinjaman sesuai jadwal yang telah disepakati dalam kontrak pinjaman. Pada Tahun 2012 terkait dengan penerimaan pembiayaan hanya terdapat dana Sisa lebih perhitungan anggaran Tahun lalu (Silpa) sebesar 212,33 Milyar.

Untuk mewujudkan peningkatan pengelolaan keuangan daerah, maka arah kebijakan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah dengan cara:
 - 1) mendorong pertumbuhan dan pembangunan perekonomian daerah;
 - 2) membenahi manajemen data penerimaan PAD;
 - 3) meningkatkan penerimaan pendapatan non konvensional;
 - 4) mengevaluasi dan memperbaiki perda terkait pengelolaan pajak dan retribusi daerah secara berkala;
 - 5) menetapkan target penerimaan yang rasional berdasarkan perkembangan potensi penerimaan yang real;
 - 6) memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan pada masyarakat.
- b. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan Belanja Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- c. Meningkatkan pengawasan anggaran dengan cara antara lain: (a) Menerapkan sistem dan pelaporan hasil pengawasan sesuai dengan aturan, (b) Meningkatkan kemampuan eksekutif dan legislatif dalam menyusun dan mengawasi penggunaan anggaran, (c) Melakukan pengawasan pelaksanaan perda dan mengevaluasi efektifitasnya
- d. Meningkatkan kualitas aparatur pengelola keuangan daerah yang antara lain melalui pendidikan dan pelatihan baik formal maupun nonformal serta meningkatkan kemampuan dalam memahami, mengkaji dan menerapkan peraturan daerah dalam pelaksanaan tugas.
- e. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat serta koordinasi antar Kab/Kota, Provinsi dan ke Pemerintah Pusat

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas dan Sasaran pembangunan Tahun 2015 sebagaimana diamanatkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2013-2018 dengan Visi “ Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan Tahun 2018“

Visi tersebut dijabarkan kedalam 7 (tujuh) Misi yaitu

- 1 Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar ummat beragama;
- 2 Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan;
- 3 Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur;
- 4 Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global;
- 5 Meningkatkan kualitas demokrasi dan hukum;
- 6 Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan, harmoni sosial dan kesatuan bangsa;
- 7 Meningkatkan perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih.

Tujuan setiap misi ini adalah untuk mencapai meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah harus menjamin adanya keterkaitan, sinergitas antar sektor, antar Kabupaten/Kota dan antara Provinsi dengan Pemerintah Pusat. Untuk dapat mencapai tujuan pembangunan tersebut, berbagai tantangan yang harus dihadapi dari lingkungan eksternal (*globalisasi*) maupun dari lingkungan internal. Aktifitas perekonomian daerah didorong dengan membangun pusat-pertumbuhan ekonomi yang tersebar diseluruh daerah. Pengentasan kemiskinan dipercepat dengan sasaran yang langsung menyentuh masyarakat miskin dan marjinal.

RKPD Tahun 2015 disusun dengan mengacu pada arah dan kebijakan yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sulawesi Selatan khususnya pada tahun 2015.

A. KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH

Kebijakan umum pembangunan daerah Tahun 2015 adalah membangun sinergitas dan menjaga pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional serta mendorong berkembangnya pusat pelayanan barang dan jasa baik untuk peningkatan perekonomian disulawesi selatan, maupun regional Sulawesi, serta mendukung prioritas nasional (*pro growth, pro job, pro poor and pro enviroment*). Kondisi tersebut diharapkan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan melalui beberapa kebijakan antara lain:

1. meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan bagi swasembada pangan daerah, kedaulatan pangan nasional, dan ekspor produk pertanian (*pro growth, pro job and pro poor*);
2. mempercepat transformasi agribisnis ke agroindustri bagi berkembangnya klaster industri daerah (*pro growth, pro job and pro poor*);
3. menginisiasi pengembangan industri pertanian/ industrialisasi pedesaan dan pengembangan pertambangan (*pro growth, pro job dan pro poor*);

4. meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan gratis bagi pembangunan manusia (*pro human development*);
5. meningkatkan kualitas dan efektivitas kesehatan gratis bagi pembangunan manusia (*pro human development*);
6. menjamin keterpenuhan listrik secara berkelanjutan bagi daya saing daerah (*pro competitiveness*);
7. meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur transportasi, air bersih, permukiman dan irigasi (*pro infrastructure*),
8. mmengakselerasi pengembangan sarana, prasarana dan fasilitas wilayah serta perhubungan darat, laut/maritim dan udara bagi daya saing daerah (*pro competitiveness*);
9. mendorong kerjasama kawasan antar kabupaten/kota dalam Provinsi, interkoneksi sinergis dengan wilayah lain antar Provinsi, nasional dan internasional (*pro synergy*);
- 10 meningkatkan kualitas pengarusutamaan gender dalam pembangunan serta memfasilitasi penyelenggaraan demokrasi yang substantif dan penegakan hukum yang berkeadilan (*pro gender and democracy*);
- 11 mengembangkan langkah dan sistem dalam kordinasi dan pemantauan ketertiban, keamanan, harmoni sosial dan kesatuan bangsa (*pro harmony*);
- 12 meningkatkan kompetensi dan kapasitas kelembagaan Pemerintah dalam menjalankan birokrasi yang efektif dan bersih (*pro good governance*);
- 13 mengakselerasi pemberdayaan masyarakat melalui fungsi kelembagaan lokal yang efektif bagi pemenuhan kebutuhan dan pemecahan masalah *lokal-spesific* dan berbasis komunitas (*pro community*).

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2015 merupakan penjabaran visi, misi, strategi dan arah kebijakan Tahun ketiga dari RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan pada capaian kinerja pembangunan daerah hingga triwulan II Tahun 2014, dimana kondisi tersebut telah memberi inspirasi untuk melahirkan rumusan berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan daerah yang akan dihadapi pada Tahun 2015 sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya. Dengan menganalisa hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun sebelumnya, maka dapat dirumuskan Tema dan Prioritas arah kebijakan serta sasaran pembangunan daerah Tahun 2015 adalah sbb.:

B. TEMA DAN PRIORITAS RKPD.

Untuk mengoptimalkan hasil pelaksanaan arah kebijakan pembangunan tahun 2015, maka penekanan pembangunan dan strategi yang dilakukan harus tepat dan terarah. Hal ini dilakukan melalui analisis masalah dan tantangan baik internal maupun eksternal secara komprehensif.

1. Tema RKPD

Dari uraian tersebut diatas,serta memperhatikan tantangan lingkungan eksternal dan internal, maka Tema dan Prioritas yang dicanangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 adalah :

“PENGUATAN PEREKONOMIAN DAERAH MELALUI PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS TAHUN 2015“

Penguatan perekonomian daerah, adalah diarahkan pada peningkatan kualitas hasil produksi ataupun output dari sektor pembangunan yang menjadi sector unggulan Provinsi Sulawesi Selatan khususnya sector pertanian, yang didukung industri pengolahan dan sistem perdagangan yang semakin kuat. Peningkatan pertumbuhan pada sector pertanian dan sector industry akan meningkatkan kualitas pertumbuhan PDRB Sulawesi Selatan pada tahun 2015.

Penguatan perekonomian daerah difokuskan pada kerjasama antar daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kondisi dan potensi daerah masing-masing. Penerapan agro-industri akan memberi nilai tambah pada hasil produksi melalui penerapan Iptek dalam proses pengolahan, sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya petani. Pengembangan sektor industri dan perdagangan membutuhkan inovasi dan kreatifitas pemanfaatan Iptek khususnya dalam proses produksi, sehingga nilai tambah yang diharapkan akan memberi dampak positif pada pertumbuhan semua sector pembangunan khususnya sektor pertanian.

Kebijakan pengembangan **Kawasan Strategis** dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan khususnya pengembangan kawasan andalan belum berjalan dengan baik, sehingga perlu penanganan yang lebih intensif pada beberapa kawasan andalan dengan melakukan inovasi dan atau perbaikan manajemen pengelolaannya yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan sasaran meningkatkan pertumbuhan khususnya pertumbuhan sektor pertanian yang menitik beratkan pada kabupaten/kota yang masuk dalam kawasan andalan.

Upaya lain untuk memaksimalkan dampak dari hasil pembangunan daerah adalah dengan menjadikan penanganan Lingkungan Hidup sebagai strategi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan menjadikan strategi pengarusutamaan gender (PUG) sebagai landasan perencanaan khususnya dalam proses penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Dengan mengintegrasikan kedua hal tersebut kedalam dokumen Rencana Kerja Tahunan, maka diharapkan strategi tersebut sudah terintegrasi kedalam rumusan kebijakan, prioritas program dan kegiatan. Dengan penerapan kedua strategi ini diharapkan dapat mendukung ketepatan desain perencanaan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan, serta memaksimalkan hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan. Dengan demikian dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya, mengakselerasi status ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (perempuan dan laki-laki).

Secara substantif perencanaan yang disusun oleh SKPD telah menerapkan KLHS dan berperspektif gender. RKPD Tahun 2015 ini diharapkan menjadi dokumen rancangan Tahunan yang menjadikan KLHS sebagai landasan lahirnya program dan kegiatan serta berperspektif gender dimana akan dijabarkan secara lebih rinci kedalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) beberapa SKPD yang terkait.

Dalam mensinergikan prioritas nasional, maka Visi, Misi dan arah kebijakan dalam RPJMD Sulawesi Selatan dijabarkan pada 11 (sebelas) prioritas Gubernur yang terkait peningkatan produksi komoditi unggulan sector pertanian, pendidikan dan kesehatan gratis, industri pengolahan, pengembangan UMKM, serta Ketenaga

kerjaan dan perumahan rakyat miskin. Untuk mempercepat capaian terhadap beberapa hal tersebut diatas, maka ditetapkan 8 (delapan) prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 sbb. :

2. Prioritas Pembangunan

Untuk mendukung prioritas Nasional Tahun 2015 yang terdiri dari 9 (sembilan) Bidang Issu Strategis Nasional Tahun 2015, maka Arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah Sulawesi Selatan yang diarahkan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan dan untuk membangun sinergitas antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota, dilahirkan 7 (tujuh) Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi ; (1) Pengembangan Kerjasama dan Daya Saing Daerah; (2) Pengembangan Ekonomi Kerakyatan; (3) Pengembangan Pendidikan, Kepemudaan, Keolahragaan dan Kebudayaan serta Pengembangan Kesehatan; (4) Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Wilayah; (5) Pengembangan Kawasan Strategis ; (6) Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Air dan Kapasitas Infrastruktur Irigasi; (7) Reformasi Birokrasi dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Prioritas pembangunan Tahun 2015 selain untuk mewujudkan 11 (sebelas) prioritas RPJMD, juga memperhatikan prioritas RPJMN 2009-2014 yakni prioritas pembangunan nasional khususnya terkait dengan Penanggulangan Kemiskinan (Pro-Poor), Penciptaan Lapangan kerja (Pro-Job), Pertumbuhan Ekonomi (pro growth), Pembangunan berkelanjutan (pro-environment), serta mendukung MDGs 2015. Dalam penyusunan RKPD Sulawesi Selatan tahun 2015 ini, juga memperhatikan Issu Strategis Nasional yang ada dalam RKP tahun 2015 yang meliputi 9 (Sembilan) Bidang, yakni seperti berikut.

- a) Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan beragama, dengan isu strategis sistem jaminan sosial nasional (*demand dan supply*), penurunan angka kematian ibu dan bayi, pengendalian jumlah penduduk, sinergi percepatan penanggulangan kemiskinan, dan reformasi pembangunan pendidikan.
- b) Bidang Pembangunan Ekonomi, dengan isu strategis transformasi struktur industri dalam arti luas, Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi , Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi dan peningkatan daya saing tenaga kerja.
- c) Bidang Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana, dengan isu strategis pertama adalah penguatan konektivitas nasional melalui keseimbangan pembangunan antar wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan transportasi massal perkotaan. Isu strategis kedua adalah peningkatan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar melalui peningkatan rasio elektrifikasi nasional, peningkatan akses air minum dan sanitasi, penataan perumahan/permukiman Isu strategis ketiga adalah peningkatan ketahanan air.
- d) Bidang Pembangunan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup, dengan isu strategis perkuatan ketahanan pangan, peningkatan ketahanan energi, percepatan pembangunan kelautan, dan peningkatan keekonomian keanekaragaman hayati dan kualitas lingkungan hidup.
- e) Bidang Pembangunan Ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan isu strategis perkuatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi.
- f) Bidang Pembangunan Politik, dengan isu strategis konsolidasi demokrasi.

- g) Bidang Pembangunan Pertahanan dan keamanan, dengan isu strategis percepatan pembangunan *Minimum Essential Force* (MEF) dengan pemberdayaan industri pertahanan dan peningkatan ketertiban dan keamanan dalam negeri.
- h) Bidang Pembangunan Hukum dan aparatur, dengan isu strategis reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan publik, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan
- i) Bidang Pembangunan wilayah dan tata ruang, dengan isu strategis pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan, pengelolaan risiko bencana, dan sinergi pembangunan perdesaan.

C. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Sasaran pembangunan yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2015 dengan menekankan pada 7 (tujuh) prioritas arah kebijakan RKPD Tahun 2015, selain melihat RPJMN 2009-2014, kebijakan Umum tahun 2015 yang tercantum dalam RPJMD Sulawesi selatan 20013-2018 serta isu strategis nasional yang tercantum dalam RKP tahun 2015, juga memperhatikan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang telah disampaikan pada Musrenbang Provinsi Sulawesi Selatan pada Bulan Mei 2014. Berlandaskan hal tersebut, maka ditetapkan beberapa target dan sasaran indikator makro yang diharapkan dapat dicapai pada Tahun 2015 yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Kerjasama dan Daya saing Daerah

Dengan membangun kerjasama antar Kabupaten/Kota dan antara Kabupaten/ Kota dengan provinsi diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan pada semua sector pembangunan sesuai dengan potensi daerah. Demikian juga dengan membangun kerjasama antar Provinsi baik dalam negeri maupun dengan luar negeri diharapkan akan dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Pengembangan Investasi pada sektor pertanian khususnya Agro-Industri adalah sangat penting karena sebagian besar masyarakat hidup di pedesaan dan bekerja pada sektor pertanian, Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya pada sektor pertanian maka konsep petik olah jual menjadi solusi yang baik. Dengan melakukan proses pengolahan (*agro-industri*) terhadap komoditi hasil pertanian, maka akan dapat memberikan nilai tambah (*Value Added*) dan akhirnya akan menambah pendapatan petani.

Dalam rangka mendukung pengembangan agro-industri di daerah pedesaan dan perkotaan yang integratif, maka perlu pemanfaatan Ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Hal ini akan banyak menyerap tenaga kerja dan dapat mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Dengan naiknya pendapatan petani akan memperbaiki daya beli masyarakat dan dampaknya tingkat kesejahteraan petani semakin membaik.

Pengembangan *agro-based industries* dalam arti luas dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran perluasan dan penciptaan lapangan kerja, terutama di pedesaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta meningkatkan kualitas sumberdaya petani dan nelayan dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi wilayah. Upaya revitalisasi pertanian terkait erat dengan pembangunan pedesaan, karena penyebaran penduduk terbesar Sulawesi Selatan berada di pedesaan, maka peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan serta pertumbuhan sektor pertanian yang sarannya pada wilayah pedesaan terus didorong dalam rangka untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan

pendapatan yang berkeadilan dalam masyarakat Sulawesi Selatan.

Penataan dan pengembangan sistem jaringan distribusi pemasaran antar Kabupaten/kota dan antar provinsi khususnya komoditas strategis perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang terpadu. Demikian juga dalam Penguatan system Inovasi Daerah serta dukungan pengembangan pada Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Terpadu serta dengan memaksimalkan peran Badan Kerjasama Regional Sulawesi sebagai wadah memperkuat pembangunan kewilayahan.

Sasaran pembangunan untuk Tahun rencana berdasarkan hasil hasil pengamatan/evaluasi kinerja Tahun 2012 dan Tahun 2013, dengan asumsi perkiraan kinerja pelaksanaan pembangunan sampai akhir Tahun 2014 dapat dicapai, maka di proyeksikan target indikator sasaran (indicator makro) hingga Tahun 2015 antara lain sebagai berikut;

- Investasi (ADHB) mencapai 55-60 Triliun rupiah.
- nilai PDRB (ADHB) diharapkan naik mencapai hingga 196,62 Triliun rupiah.
- pendapatan Perkapita (ADHB) dapat mencapai sebesar 23,38 juta rupiah
- paritas Daya Beli mencapai 649.990 rupiah atau mencapai Indeks 66 persen
- target Pertumbuhan Ekonomi diharapkan mencapai 8 persen.
- pertumbuhan Industri Pengolahan naik sebesar 2-4 persen.
- nilai ekspor Non Tambang/Migas diharapkan mengalami peningkatan.
- pertumbuhan Sektor Pertanian diharapkan naik sebesar 5,51 persen.
- pengembangan obyek wisata yang masuk unggulan Sulawesi Selatan.
- menurunkan angka pengangguran terbuka mencapai 5,7 persen.
- menurunkan angka penduduk miskin 7-8 persen
- Menjaga Pertumbuhan penduduk agar dibawah 1,2 persen
- meningkatkan jumlah angkatan kerja yang bekerja naik 2-3 persen
- mendorong optimalisasi Fungsi Balai Latihan Kerja (BLK)
- memperluas kerjasama dengan dunia usaha terkait peluang TK.

2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan.

Dalam struktur perekonomian sektor pertanian merupakan sektor basis yang dominan dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebahagian besar penduduk Sulawesi Selatan bekerja pada sektor pertanian yang tersebar pada daerah Kabupaten. Prioritas pembangunan untuk meningkatkan produktifitas dan mutu hasil produksi sektor pertanian akan meningkatkan daya saing komodity unggulan dan peningkatan pangsa pasar baik domestik maupun pasar internasional. Dengan mengarahkan kegiatan pembangunan pertanian berbasis komoditas local didaerah potensial khususnya pada wilayah pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten/Kota dapat meningkatkan nilai kontribusi sektor pertanian terhadap total nilai produk domestik regional bruto. Kondisi ini akan mendukung tingkat pertumbuhan sector pertanian, industry (*agro-based industries*) dan perdagangan.

Disamping itu perlunya mengembangkan sistem dan kelembagaan ekonomi lokal yaitu usaha mikro kecil dan menengah yang berbasis kerakyatan. Dengan menciptakan keterpaduan antar unit kerja terkait akan memberi ruang gerak yang lebih leluasa untuk mengembangkan usaha secara mandiri dan professional. Melakukan revitalisasi terhadap kelembagaan yang terkait dengan kegiatan produksi, pasca panen, pengolahan hasil pertanian, pemasaran dan penyediaan modal untuk pengembangan usaha. Keberadaan lembaga ekonomi masyarakat sangat menentukan pengembangan dan pemberdayaan pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah yang dalam berbagai hal mempunyai banyak kelemahan dan keterbatasan. Kelembagaan ekonomi masyarakat tidak hanya menyangkut

organisasi pengembangan usaha, akan tetapi juga meliputi ketersediaan regulasi yang mendukung dan tata cara dalam melakukan/manajemen usaha guna mencapai tujuan bersama sebagaimana yang dikehendaki dalam dunia usaha. Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat akan meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam menghasilkan produk baik barang maupun jasa yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dipasaran.

Berikut penjelasan terkait beberapa pokok pikiran DPRD yang menjadi perhatian dan tertuang dalam uraian prioritas RKPD Tahun 2015.

Sebagaimana di ketahui bahwa tingkat kemakmuran masyarakat di suatu wilayah di ukur dengan indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) per kapita dan tingkat pemerataan pendapat masyarakat yang diukur dengan Gini Rasio. Jika melihat pertumbuhan ekonomi sulsel dari tahun ke tahun cukup pesat, seyogianya berjalan paralel dengan nilai IPM yang bergerak signifikan, pertumbuhan PDRB pr kapita di sulsel sesuai target RPJMD akan bisa mencapai Rp. 30.000.000,- pada tahun 2018 serta rasio gini terus menurun yang berarti terjadi distribusi pendapatan secara merata. Diharapkan Pemerintah daerah akan terus mendorong, memfasilitasi tumbuh kembangnya kelembagaan ekonomi yang berkaitan dengan pengembangan dunia usaha, termasuk koperasi khususnya koperasi wanita, serta usaha mikro kecil dan menengah. Terbangunnya kelembagaan ekonomi yang baik dan kuat akan memberi dampak positif bagi peningkatan produksi dan pengembangan usaha. Untuk mencapai hal tersebut beberapa sasaran pokok yang perlu mendapatkan perhatian bagi seluruh pemangku kepentingan..

Masalah pemerataan pendapatan masyarakat hendaknya merupakan salah satu hal penting yang perlu perhatian Pemda. Tidak dapat dipungkiri, hasil pembangunan (dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi) yang telah dicapai belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh masyarakat secara merata.

Salah satu solusi pemberdayaan kelompok nelayan di desa-desa pesisir antara lain dengan menyiapkan alat tangkap yang modern dan ramah lingkungan serta bantuan pengadaan perahu bagi nelayan tradisional melalui koperasi nelayan. Diperlukan perhatian pemerintah terhadap bantuan bibit padi, pupuk, jagung kepada para kelompok tani agar distribusinya efektif dan tepat sasaran, juga diperlukan adanya solusi masalah kestabilan harga hasil pertanian dan perkebunan sehingga tidak mengakibatkan kerugian kepada para petani. Pada sektor perikanan untuk lebih mendorong peningkatan tingkat pendapatan kelompok tani nelayan diharapkan bantuan pengadaan alat dan mesin perahu penangkapan ikan, bibit rumput laut, bantuan benih/bibit udang yang berkualitas dan diperlukan adanya bimbingan teknis budidaya disektor perikanan agar menghasilkan produk yang berkualitas.

Pada sektor peternakan para petani mengharapkan dukungan adanya bantuan bibit sapi dan ayam potong serta bimbingan teknis dibidang peternakan. Bantuan dari Pemerintah Provinsi bagi kelompok pengajian, kepemudaan dan kelompok-kelompok kerajinan dalam memberikan dukungan agar dapat mengakses dana pengembangan usaha yang ada di lembaga Keuangan Bank guna mendukung program pemberdayaan masyarakat dalam membuka dan memfasilitasi lapangan kerja bagi masyarakat pedesaan.

Sasaran pembangunan untuk Tahun rencana diharapkan dapat mencapai indikator sasaran (indicator makro) hingga Tahun 2015 antara lain sebagai berikut;

- Meningkatkan surplus beras (*over stock*) mencapai 2,2 - 2,3 juta ton.
- Meningkatkan produksi jagung 1,6 – 1,65 juta ton.
- Meningkatkan Populasi Ternak Sapi 1,45 - 1,55 juta ekor.
- Meningkatkan produksi Udang Segar mencapai 33.200 - 33.300
- Meningkatkan jumlah produksi Coklat mencapai 216.602 ton
- Meningkatkan jumlah Produksi Rumput Laut mencapai diatas 2 juta ton
- Meningkatnya Nilai ekspor komoditas sektor pertanian dan perikanan.
- Meningkatkan pertumbuhan agro-industri yang berbasis sumberdaya lokal.
- Berkembangnya lembaga-lembaga ekonomi lokal (usaha agro-bisnis pedesaan) berbasis masyarakat.
- Terbangunnya konektifitas transportasi dan perdagangan
- pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Koperasi dan UMKM
- meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha kecil dan menengah serta koperasi dalam majemem pengelolaan usaha.
- pengembangan Koperasi Wanita yang mandiri dan berbadan hukum.
- meningkatnya jumlah UMKM mandiri mencapai 1.656 Unit Usaha.
- meningkatnya Nilai Kredit yang tersalur dari lembaga keuangan kepada Koperasi dan UMKM.

3. Pengembangan Pendidikan, Kepemudaan, Keolahragaan dan Kebudayaan serta Pembangunan Kesehatan.

Peningkatan aksesibilitas terhadap pendidikan dan kesehatan merupakan aspek yang harus dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia Sulawesi Selatan sebagai pelaku sekaligus objek pembangunan. Berbagai kebijakan seperti Pendidikan Untuk Semua (*Education For All*), Konvensi Hak Anak (*Convrention on the right of child*) dan *Millenium Development Goals (MDGs)* serta *World Summit on Sustainable Development* secara jelas menekankan pentingnya pendidikan dan kesehatan sebagai salah satu aspek penekanan untuk penanggulangan kemiskinan, peningkatan IPM, kesetaraan gender, serta pemahaman nilai-nilai budaya. Dengan kondisi tingkat pendidikan dan kesehatan penduduk yang relatif masih rendah, upaya untuk memperbaiki akses penduduk terhadap pendidikan dan kesehatan harus dipercepat untuk mencapai Manusia Sulawesi Selatan yang berkualitas baik dan berdaya saing.

Dengan memperhatikan beberapa pokok pikiran DPRD khususnya yang terkait dengan prioritas ketiga RKPD Tahun 2015, dimana dari segi peringkat Nilai IPM Sulsel yang masih berada pada peringkat Sembilan belas 19 di Indonesia, tetapi dari segi laju peningkatan berada pada urutan ketiga (3). Kondisi ini menunjukkan seberapa jauh daerah ini telah mencapai sasaran yang ditentukan. Untuk perlu dilakukan pengukuran akselerasi 3 dimensi pokok pembangunan masusia. Untuk itu ditahun 2015, harus ada upaya maksimal agar angka ideal IPM terus meningkat hingga mencapai 74. Dengan terus membaiknya kondisi sosial ekonomi Sulsel, IPM tahun 2015 harus naik signifikan dengan meningkatkan angka khususnya Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah disamping perbaikan usia harapan hidup. Angka buta aksara yang masih cukup tinggi, akan menurunkan nilai IPM sehingga di tahun 2015 perlu upaya terencana dengan baik untuk mengatasi buta aksara khususnya lanjut usia melalui pendekatan yang lebih tepat.

Sejalan dengan itu, angka partisipasi sekolah usia SD dan SLTP harus diupayakan sudah bisa mendekati 100% di tahun 2015. Sedangkan hasil perolehan nilai ebtanas murni (NEM) bisa diatas rata-rata. Pemda perlu memberikan perhatian terhadap fasilitas sekolah secara memadai khususnya yang jauh dari ibukota Kabupaten/Kota, disertai upaya memperbaiki kualitas tenaga pendidik/guru. Disamping itu perlunya peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan program pendidikan gratis di Sulsel. Untuk mendukung peningkatan akses pendidikan khusus pendidikan tinggi, maka perlu dukungan pembiayaan bagi mahasiswa yang masuk kategori keluarga kurang mampu. Hal ini akan dapat meningkatkan akses pada pendidikan tinggi dan melahirkan manusia yang berkulitaas di Sulawesi Selatan.

Sedangkan masalah utama pada bidang kesehatan antara lain belum optimalnya penerapan pola hidup sehat dan rendahnya derajat kesehatan lingkungan dalam masyarakat, rendahnya akses dan kualitas terhadap layanan kesehatan terutama pada masyarakat terpencil dan pulau-pulau serta belum mantapnya manajemen pembangunan kesehatan. Ketersediaan pangan yang terjangkau dengan kondisi daya beli masyarakat juga merupakan akar masalah dalam upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, karena sangat terkait dengan kualitas gizi masyarakat. Dari seluruh uraian tersebut diatas, maka Tahun 2015 Indeks Pembangunan Manusia diharapkan mencapai 74,40. Sulsel perlu lebih memposisikan diri sebagai pusat rujukan medik dikawasan timur Indonesia. Untuk itu Rumah Sakit milik Pemprov, harus didukung peralatan medis yang canggih/modern serta ditunjang tenaga medis dan paramedis yang berkualitas. Peralatan medis yang canggih/modern akan lebih menjamin upaya keselamatan pasien dan akan lebih efektif dalam tindakan medik.

Dalam hal pelayanan publik, pentingnya penyediaan layanan informasi Bursa Kerja secara On-line untuk menjembatani dan memfasilitasi para pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja untuk lebih mempermudah proses penerimaan dan informasi menyangkut peningkatan kompetensi pencari kerja.

Sasaran pembangunan untuk Tahun rencana berdasarkan hasil kinerja hingga Triwulan II Tahun 2014, maka di tetapkan target indikator sasaran (indicator makro) yang rasional dapat dicapai hingga Tahun 2015 antara lain sebagai berikut;

- Meningkatkan angka harapan hidup 71,3 Tahun.
- menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) 50 - 55 per 100.000 kelahiran hidup.
- meningkatnya cakupan air bersih terlayani 85 persen rumah tangga di perdesaan.
- meningkatnya Angka RLS 8 Tahun.
- meningkatnya indikator persentase kelulusan dalam ujian nasional.
- berkurangnya jumlah penduduk kurang pangan dan gizi. (prevalensi gizi kurang pada anak balita dibawah 14 persen, dan gizi buruk pada angka 4 persen.
- Meningkatkan Angka Melek Huruf hingga 89.84 persen.
- meningkatnya indikator capaian layanan air bersih diperkotaan 90 persen rumah tangga.
- layanan perbaikan lingkungan/perumahan sehat, serta sanitasi 85 Persen dan PHBS 75 % pada rumah tangga.

4. Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Wilayah.

Untuk mendukung peningkatan aktifitas sosial ekonomi masyarakat, maka pembangunan infrastruktur wilayah menjadi pendukung utama dalam memicu percepatan roda perekonomian daerah. Dukungan infrastruktur wilayah meliputi

ketersediaan infrastruktur dasar guna meningkatkan akses masyarakat akan rumah dan lingkungan pemukiman yang layak, aman, dan terjangkau sebagai upaya mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, perkuatan konektivitas antar wilayah guna menjamin kelancaran distribusi barang, jasa dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk unggulan wilayah dan mengurangi kesenjangan wilayah serta peningkatan ketahanan pangan dan energy

Dalam mendukung beberapa hal terkait pokok pikiran DPRD khususnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah, maka Penyediaan infrastruktur wilayah pada semua sektor pembangunan dioptimalkan dari berbagai sumber pembiayaan terutama untuk mendukung keterkaitan pembangunan antar daerah Kabupaten/Kota yang dapat meningkatkan sinergitas aktifitas perekonomian antar wilayah. Untuk mendukung itu maka perlu dipercepat pembangunan seperti jaringan transportasi darat, laut dan udara secara terpadu yang mengarah kepada peningkatan kualitas pelayanan dan perluasan akses. Demikian pula pembangunan Infrastruktur Energi / Ketenagalistrikan, dan pengelolaan sumberdaya air, perlu dikembangkan secara terpadu antar sektor terkait. Mengenai Indeks Kesejahteraan Daerah (IKD) yang merupakan indikator penting untuk mengetahui sejauh mana efektifitas peningkatan mutu kesejahteraan daerah, hal ini juga didasarkan pada pengukuran ekonomi, kesehatan, pendidikan dan bagaimana kondisi infrastruktur daerah. Untuk itu kapasitas infrastruktur harus lebih dipacu pengembangannya seperti Bandara Sultan Hasanuddin, bandara-bandara perintis dan kepelabuhan untuk mendukung ekspor-impor dan sektor kepariwisataan, kelistrikan untuk mendukung pembangunan industri baru, pemenuhan kebutuhan dasar (air bersih, sandang, pangan, papan, dsb), jalan jembatan.

Pengembangan/perbaikan infrastruktur hendaknya menjadi prioritas karena akan meningkatkan daya saing ekonomi. Lemahnya infrastruktur akan menyulitkan peningkatan daya saing dan penanggulangan kemiskinan akan melambat. Untuk pemerataan pembangunan, pengembangan infrastruktur kecamatan dan desa tertinggal dan terisolir, perlu prioritas penanganannya agar dapat dijangkau dengan kendaraan roda empat. Upaya ini untuk lebih mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa tertinggal/terisolir, serta perbaikan pemukiman masyarakat pedesaan terutama perbaikan drainase dan pembuatan jalan desa serta paving blok serta peningkatan penataan dan fasilitasi pemukiman.

Rencana pembangunan jalur kereta api Makassar-Parepare, tetap menjadi perhatian, demikian pula dengan pengembangan kawasan terpadu Mamminasata, lebih dimaksimalkan pelaksanaannya terutama pembangunan sistem transportasi yang terintegrasi beserta faktor-faktor penunjangnya. Demikian halnya dengan Pembangunan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan CPI, ditahun 2015 terus dilakukan kegiatan pembangunannya.

Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas hasil pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas maka harus menerapkan prinsip **pembangunan berkelanjutan** dan berwawasan lingkungan. Secara umum kondisi yang ingin dicapai adalah membaiknya sistem pengelolaan yang **menjamin terciptanya keseimbangan** antara pencapaian tujuan dengan kapasitas potensi sumber daya yang ada untuk manfaat jangka panjang.

Berdasarkan capaian sasaran pembangunan infrastruktur wilayah dan penanganan lingkungan hidup yang lalu serta asumsi indikator sasaran Tahun 2013 dapat dicapai, maka hingga akhir Tahun 2015 sasaran (indicator makro) yang diharapkan dapat mencapai antara lain sebagai berikut;

Sasaran

- Terjaganya kualitas jalan dan jembatan
- Meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan
- Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana angkutan darat (Kereta Api, serta fasilitas LLAJ) ;
- Meningkatkan kapasitas prasarana dan fasilitas bandar udara;
- Meningkatkan Kualitas lingkungan perumahan pada 18 kawasan permukiman;
- Meningkatkan ketersediaan air baku guna mendukung ketahanan pangan;
- Meningkatkan Jangkauan layanan air bersih.
- Meningkatkan akses bagi rumah tangga terhadap prasarana sanitasi yang layak
- Meningkatkan ketaatan energy yang di tunjang dengan penyediaan listrik
- Meningkatkan kapasitas infrastruktur pengendalian banjir dan pengamanan pantai.

5. Pengembangan Kawasan Strategis

Dengan memperhatikan pokok-pokok pikiran dari DPRD, maka prioritas pengembangan kawasan startegis di Sulawesi Selatan tahun 2015 diarahkan pada wilayah pusat pertumbuhan. Laju pertumbuhan ekonomi Sulsel yang cukup tinggi, idealnya berbanding lurus dengan penurunan penduduk miskin dan pengurangan angka pengangguran secara signifikan dan peningkatan pendapatan perkapita. Dalam membangun pusat-puat pertumbuhan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan khususnya pengembangan kawasan andalan pada daerah Kabupaten/kota menjadi hal yang penting untuk ditangani bersama secara terpadu dan dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Sejalan dengan itu, usaha industri kecil dan industri rumah tangga yang jumlahnya cukup banyak, perlu mendapatkan perhatian Pemerintah Daerah khususnya permodalan, peningkatan kapasitas pelaku usaha dan manajemen pemasaran sehingga dapat menunjang peningkatan produksi karena sector ini tidak kalah pentingnya dalam perekonomian Sulsel

Perlu penanganan yang lebih intensif pada beberapa kawasan andalan yang telah ada, dengan melakukan inovasi dan atau perbaikan manajemen pengelolaannya yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan tehnologi dengan sasaran meningkatkan pertumbuhan khususnya pertumbuhan sektor pertanian yang menitik beratkan pada pada kabupaten/kota yang masuk dalam kawasan andalan.

Sasaranya:

- Berkurangnya ketimpangan antar Kabupaten/Kota
- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada daerah-daerah pusat pertumbuhan.
- Terbangunnya konektifitas antar Kabupaten/Kota dalam pembangunan disemua sector pembangunan daerah.
- Berkembangnya industry berbassis sumberdaya local yang berdaya saing

6. Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Air & Kapasitas Infrastruktur Irigasi

Untuk mencapai pengelolaan sumber daya alam yang berkualitas maka harus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Hal ini adalah memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Kondisi yang ingin dicapai adalah membaiknya sistem pengelolaan yang menjamin terciptanya keseimbangan antara pencapaian tujuan dengan potensi sumber daya yang tersedia tetap lestari dan ramah lingkungan serta dari aspek ekonomi secara rasional layak diterima.

Berikut pokok pikiran DPRD yang menjadi perhatian terkait dengan prioritas

RKPD Tahun 2015. Sejalan dengan program-program sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2013-2018, dibutuhkan tekad pemerintah daerah agar berjalan paralel dengan tujuan Millenium Development Goals (MDGs) 2015 dapat tercapai, yaitu percepatan penurunan penduduk miskin, pemerataan pendidikan di semua jenjang, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, pengurangan angka penderita HIV AIDS, memperbesar akses air minum dan air bersih bagi penduduk pedesaan, pengurangan angka kematian anak dan peningkatan kesehatan ibu hamil.

Pembangunan ekonomi terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam (*natural resours*) khususnya erkait dengan pembangunan disektor pertanian tanaman pangan, perikanan, perkebunan dan kehutanan. Sektor ini merupakan sektor unggulan Sulawesi Selatan yang diarahkan pada peningkatan pendapatan petani khususnya pada kelompok masyarakat marginal tanpa mengesampingkan kelompok usaha ekonomi menengah keatas. Kondisi ini diharapkan dapat berkembang dengan didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya meningkatkan dukung lingkungan dengan menjaga keseimbangan antara pengelolaan sumber daya alam dengan kelestarian lingkungan hidup secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan pengelolaan sumberdaya alam secara lebih berkualitas akan menjadi sumber pertumbuhan sektor yang tinggi. Untuk mencapai hal itu perlu dukungan investasi dalam dan luar negeri serta pengendalian impor khususnya komoditi pertanian.

Sasaran

Sasaran pembangunan untuk Tahun rencana berdasarkan pengamatan hasil evaluasi kinerja Tahun 2013 dan perkiraan kinerja pelaksanaan pembangunan sampai akhir Tahun 2014, maka ditetapkan beberapa sasaran indikator makro Tahun 2015 antara lain sebagai berikut;

- Meningkatnya kapasitas jaringan irigasi (luas areal lahan yang terairi).
- Meningkatnya produktifitas lahan pertanian.
- Terpeliharanya kondisi dan kualitas lingkungan hidup/berkurangnya kerusakan lingkungan hidup.
- meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan Sumberdaya Air.
- ekstensifikasi, dan diversifikasi pada areal pengelolaan lahan khususnya sektor pertanian.
- Meningkatnya kualitas pengelolaan hutan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan hutan kemasyarakatan
- Meningkatnya kualitas pengelolaan hutan barbasis pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan bibit tanaman hutan
- Meningkatnya perlindungan dan pengamanan hutan dan konservasi sumber daya alam;
- Meningkatnya kualitas pengelolaan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan;

7. Revormasi Birokrasi dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Upaya penataan birokrasi khususnya pada kelembagaan pemerintah akan lebih diprioritaskan agar pelayanan publik diarahkan pada terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Upaya pemberdayaan kelembagaan pemerintah seperti; Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah; Pemberdayaan Aparatur Pemerintah; Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan; dan Pemberdayaan Pengawasan. Upaya ini diharapkan mampu

menciptakan kelembagaan pemerintah yang terpercaya yakni transparan, konsisten dan akuntabel serta efisien dan efektif. Sementara upaya terhadap pemberdayaan kelembagaan masyarakat meliputi Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Sosial; Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Politik; Pengembangan dan Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat. Untuk mencapai upaya penguatan kelembagaan dibutuhkan adanya dukungan lingkungan yang kondusif sehingga semua aktifitas baik aktifitas pada lembaga pemerintah, lembaga masyarakat maupun lembaga swasta dapat berjalan dengan baik serta mencapai tujuan dan sasaran yang telah disepakati bersama.

Untuk kondisi Sulawesi Selatan saat ini, keberadaan kelembagaan pemerintah yang kuat dan berwibawa merupakan keniscayaan. Itu terutama disebabkan oleh karena kelembagaan masyarakat yang mandiri belum sepenuhnya terbangun. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah nyaris merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki kemampuan untuk menyediakan pelayanan guna memenuhi hak dasar masyarakat. Untuk maksud tersebut, pemerintah daerah perlu melakukan pembenahan internal agar mampu melaksanakan tugas-tugas dimaksud secara efisien dan efektif. Rentang pembenahan itu menjadi semakin lebar, karena pemerintah dituntut pula untuk beradaptasi secara kreatif terhadap perubahan dan perkembangan di era globalisasi.

Setidaknya, pembenahan itu mencakup upaya-upaya pergeseran sikap dan wawasan serta kompetensi aparat agar menjadi aparat yang profesional, sampai kepada penataan kelembagaan agar mampu menjawab tuntutan zaman yang terus berubah. Organisasi seperti itu semestinya dibangun sesuai dengan kaidah-kaidah *good governance*, mengikuti model organik dan berbasis pada misi (*mission-driven*) ketimbang hirarkis-mekanistik, serta sekaligus merupakan organisasi pembelajar (*learning organization*) yang memanfaatkan teknologi terkini.

Masyarakat maju (*evolutionary learning community*) adalah masyarakat yang mampu menyediakan secara mandiri beraneka ragam kebutuhan mereka, sehingga peran pemerintah akan dapat lebih difokuskan pada aspek regulasi yang non-represif. Syarat harus bagi terwujudnya masyarakat seperti ini adalah keberadaan lembaga-lembaga masyarakat yang tangguh dan mandiri dalam menyelenggarakan misinya. Peran Lembaga independen seperti Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Sulawesi Selatan tetap akan menjadi perhatian dalam tahun ini agar dapat bekerja maksimal sesuai bidang tugasnya. Untuk lebih memaksimalkan system pengelolaan APBN dan APBD disetiap SKPD, diperlukan tenaga akuntan dalam upaya peningkatan kompetensi aparatur, terutama dari kalangan muda dan diprioritaskan untuk lebih meningkatkan kompetensi tertentu seperti akuntansi dan auditor, demikian pula tenaga legal drafter yang dimaksudkan untuk penyusunan produk-produk hukum daerah.

Sasaran

- Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang memiliki kemampuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhkembangnya kelembagaan masyarakat yang mandiri, menyediakan pelayanan--dalam kerangka pemberdayaan--bagi seluruh kelompok masyarakat secara efisien dan efektif, serta melaksanakan regulasi tanpa menimbulkan dampak negatif yang menghambat inovasi dan kreativitas masyarakat.
- Terwujudnya organisasi pemerintah daerah sebagai organisasi pembelajar yang mengikuti kaidah-kaidah *good governance*, serta berbasis pada misi (*mission-driven*).
- Terbentuknya SKPD sebagai unit kerja yang mandiri dan profesional dalam menyelenggarakan misinya.

- Menguatnya nilai-nilai budaya lokal yang berbasis pada nilai-nilai budaya bahari dan keagamaan yang teraktualisasi dengan nilai-nilai yang dibawa oleh spirit zaman.
- Tumbuhkembangnya kelembagaan masyarakat yang tangguh dan mandiri pada seluruh aspek kehidupan yang mampu mendukung terselenggaranya pembangunan berbasis komunitas (*Community-Based Development*), melahirkan pemimpin, menyediakan dan menciptakan pilihan-pilihan (*choice*) yang semakin berkualitas kepada masyarakat serta mendorong dan meningkatkan kemampuan untuk memilih dan menyalurkan aspirasi (*voice*) dari anggota masyarakat pada segenap lapisan untuk semua bidang kehidupan, dan secara aktif mendorong terwujudnya daerah kabupaten dan kota sebagai komunitas yang maju dan mandiri.
- Mewujudnya desa sebagai komunitas yang mandiri serta mewujudnya daerah kabupaten dan kota sebagai komunitas yang berbasis pada keunggulan lokal yang spesifik.

BAB V

RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH

Untuk mencapai target dan sasaran hingga akhir Tahun 2015, maka dirumuskan beberapa program prioritas berdasarkan urusan yang sifatnya strategis dan memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian target dan indikator sasaran setiap prioritas kebijakan RKPD sebagaimana diuraikan pada Bab IV. Program prioritas yang sifatnya strategis dan mendukung 11 prioritas gubernur dan memperhatikan Pokok Pokok Pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan antara lain adalah sebagai berikut :

A. Program Prioritas Urusan Wajib:

- Program Peningkatan Fungsi dan Peran Lembaga Keagamaan dan Tokoh Agama; dengan sasaran pokok kegiatan terjaminnya kerukunan intra dan antar ummat beragama serta pengamalan nilai nilai agama.
- Program Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun;
Sasaran pokok Kegiatan adalah meningkatkan angka Rata-Rata Lama Sekolah, APK dan APM. Menurunkan Angka putus sekolah, Memperbaiki Rasio murid dengan guru. (SD, SMP, SMA), serta jumlah dan kualitas sarana pendidikan.
- Program peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan sasaran pokok Sasaran pokok Kegiatan adalah terpenuhinya rasio murid dengan guru yang layak dari aspek jumlah tenaga pendidikan yang berkualitas sesuai kebutuhan. Meningkatkan jumlah dan kualitas lulusan pendidikan dasar dan menengah, meningkatkan mutu dan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan.
- Program Pengembangan Fasilitas Pendidikan Tinggi dengan sasaran berkembangnya pendidikan tinggi serta untuk meningkatkan jumlah, mutu luaran perguruan tinggi.
- Program Pengembangan Pendidikan Vokasional
Sasaran pokok Kegiatan adalah meningkatnya jumlah dan kualitas sekolah kejuruan khusus penerbangan, kelautan, dan ketenaga kerjaan kualitas internasional.
- Program Peningkatan Manajemen Layanan Pendidikan dengan sasaran pokok kegiatan adalah meningkat dan meratanya jumlah satuan / lembaga pendidikan yang terakreditasi sehingga mutu pendidikan yang semakin berkualitas menjadi pilihan bagi seluruh masyarakat.
- Program intensifikasi dan perluasan akses pendidikan keaksaraan fungsional. Sasaran pokok Kegiatan adalah menurunnya jumlah penduduk yang masuk kategori buta aksara atau persentase dapat baca tulis semakin tinggi khususnya pada penduduk usia produktif.
- Program Pengadaan, Pengawasan Obat dan Makanan serta Pengembangan Obat Asli Indonesia dengan sasaran pokok persentase ketersediaan obat serta kualitas kefarmasian
- Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
Sasaran pokok Kegiatan adalah meningkatkan pelayanan kesehatan pada UPTD, Pasien Askes, Jamkesmas, Puskesmas, Rumah Sakit, serta motivasi kerja dan persentase RS yang melaksanakan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT). Berkembangnya program kesehatan olahraga.
- Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Sasaran pokok Kegiatan adalah meningkatkan pola hidup sehat, keberdayaan masyarakat terjaminnya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dan akses penduduk terhadap layanan kesehatan.

- Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
Sasaran pokok Kegiatan adalah menurunnya angka gizi buruk dan prevalensi gizi buruk. Meningkatnya kesadaran keluarga terhadap kebutuhan gizi dan surveilans gizi serta penanggulangannya. Menurunkan jumlah penduduk kurang pangan dan gizi.
- Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
Sasaran pokok kegiatan adalah terjaminnya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dan akses penduduk terhadap layanan kesehatan secara merata dan bermutu di Rumah Sakit Pemerintah dan PUSKESMAS.
- Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Balita dan Lansia
Sasaran pokok Kegiatan adalah menurunnya angka kematian ibu dan anak. Menurunnya angka kematian anak balita. Meningkatnya cakupan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak secara bermutu dan terjangkau.
- Program Penyelenggaraan Jalan.
Sasaran Pokok meningkatnya kapasitas kinerja jaringan jalan, jalan provinsi kondisi mantap, serta mendukung Sulawesi selatan sebagai Simpul Transporasi Luar Jawa;
- Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku;
Sasaran pokok program adalah meningkatnya ketersediaan air baku guna mendukung ketahanan pangan;
- Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;
Sasaran pokok adalah Meningkatnya kapasitas jaringan irigasi (luas areal terlayani) dalam rangka menunjang peningkatan produktifitas dan surplus beras 3 juta ton;
- Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman;
Sasaran pokok program adalah terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni (khususnya keluarga miskin) dan terbangun infrastruktu permukiman yang berkualitas (18 kawasan permukiman);
- Program Pengembangan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan sasaran pokok kegiatan adalah meningkatkan jumlah dan kualitas Dokumen Rencana Pembangunan Daerah, serta optimalisasi hasil pembangunan dengan keterpaduan perencanaan dan penganggaran;
- Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan sasaran pokok kegiatan adalah Efektifitas penggunaan anggaran pembangunan, Tercapainya tujuan, target dan sasaran Pembangunan Daerah, serta kinerja seluruh lembaga pemerintah;
- Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam, dengan sasaran pokok kegiatan adalah meningkatkan persentase kapasitas perlindungan dan konservasi sumberdaya alam, serta kapasitas penanganan lingkungan.
- Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak, dengan sasaran pokok kegiatan adalah persentase Kab/Kota yang menerapkan SPM layanan terpadu.
- Program Pengembangan/Pemeliharaan Prasarana dan Pelayanan transportasi;

Sasaran pokok program kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana transportasi darat serta peningkatan jaringan pelayanan angkutan darat angkutan laut, jaringan pelayanan angkutan udara serta kapasitas prasarana dan fasilitas transportasi massal

- Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan PMKS. Sasaran pokok program adalah berkurangnya penduduk miskin di Desa di Dikota dan terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang masalah kesos.
- Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja. Sasaran pokok Kegiatan adalah menurunkan angka pengangguran, dan meningkatnya jumlah angkatan kerja yang berkualitas atau tenaga kerja yang terampil berdasarkan kebutuhan pasar tenaga kerja.
- Program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja. Sasaran pokok Kegiatan adalah membuka lapangan kerja baru, meningkatnya luaran lembaga pendidikan non formal atau pendidikan kejuruan baik yang difasilitasi Pemerintah maupun yang dilakukan oleh pihak swasta dimana dapat melahirkan tenaga kerja siap pakai serta meningkatnya kualitas data dan informasi tenaga kerja yang dibutuhkan masyarakat.
- Program Pembinaan Hubungan Industrial Tenaga Kerja, dengan sasaran pokok kegiatan adalah peran LKS Tripartit dalam menjalin hubungan industrial yang kondusif, tertangani/terkendalinya kasus keternagakerjaan.
- Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUMKM. Sasaran pokok Kegiatan adalah berkembangnya jiwa dan semangat kewirausahaan, kualitas kelembagaan UMKM serta daya saing hasil produk UMK yang sarasannya meningkatkan jumlah dan kualitas pengelolaan lembaga UMKM.
- Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UKM; dengan sasaran program meningkatnya kualitas dan peran koperasi dan UKM. Serta berkembangnya jiwa dan semangat kewirausahaan, kualitas kelembagaan UMKM meningkatkan jumlah dan kualitas pengelolaan lembaga UMKM.
- Pemberdayaan usaha skala mikro dengan indikator keluaran berkembangnya jenis usaha kecil dengan dukungan penyaluran modal usaha dari lembaga keuangan serta dukungan fasilitasi dari Pemerintah daerah melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan dengan sasaran penduduk yang masuk kategori miskin atau pengangguran.
- Program peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi dengan indikator keluaran meningkatnya jumlah dan nilai investasi yang masuk di Sulawesi Selatan serta meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam khususnya sektor pertanian, pertambangan dan energi yang dilakukan oleh dunia usaha dengan dukungan kemudahan birokrasi dan dunia usaha yang kondusif.
- Program Pengkajian dan Pengelolaan Kekayaan Budaya. Sasaran pokok program adalah meingkatnya ketahanan budaya secara serasi dengan Spirit Zaman.
- Program Peningkatan Perencanaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan. Sasaran program adalah meningkatnya peran dan prestasi pemuda dan keolahragaan di tingkat nasional dan internasional.

- Program Kerjasama Pembangunan Antar Wilayah.
Sasaran pokok kegiatan adalah meningkatkan MOU/PKS yang difasilitasi, jumlah kerjasama termonitoring/dievaluasi pelaksanaannya dalam kerangka BKPRS serta Kerjasama antar daerah dan pihak ketiga lainnya.
- Program Pengembangan Kerjasama Antar Kawasan Andalan.
Sasaran pokok kegiatan adalah Jumlah Kerjasama MOU/PKS yang efektif terfasilitasi dan terkoordinasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi setiap daerah berdasarkan kondisi dan potensinya.

B. Program Prioritas Urusan Pilihan

- Program peningkatan produksi dan Produktifitas Perkebunan.
Sasaran pokok Kegiatan adalah meningkatnya jumlah dan kualitas produksi serta produktifitas komodity unggulan perkebunan. Meningkatkan nilai tambah hasil produksi komodity perkebunan. meningkatnya kuantitas dan kualitas hasil produksi perkebunan (Kopi, Kakao) yang berdaya saing tinggi khususnya pada kawasan kawasan andalan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Program peningkatan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Produksi.
Sasaran pokok Kegiatan adalah meningkatkan volume dan nilai Eksport serta jumlah unit pengelolaan yang termanfaatkan.
- Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.
Sasaran dengan indikator keluaran meningkatnya produksi dan populasi ternak Sapi, Unggas, dan ternak lainnya. Meningkatnya produksi daging, telur dan susu.
- Program peningkatan produksi dan Produktifitas Tanaman Pangan.
Sasaran pokok Kegiatan adalah tercapainya surplus 3 juta ton beras, jagung, yang dapat menyanggah kebutuhan nasional dan mendukung upaya Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Meningkatnya jumlah dan kualitas jenis usaha yang bergerak pada sektor pertanian yang produktif dengan nilai tambah dan daya saing sehingga dapat mendorong meningkatnya nilai ekspor dan meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian.
- Program pengelolaan Hasil, Pasca Panan dan Pengembangan Agribisnis dan penyebaran informasi.
Sasaran pokok Kegiatan adalah Meningkatnya mutu hasil panen, terjaminnya standarrisasi, pengawasan mutu serta kapasitas kelembagaan usaha agribisnis di daerah.
- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian.
Sasaran dengan indikator keluaran meningkatnya ketersediaan alat dan mesin pertanian, kapasitas jaringan irigasi, ketersediaan pupuk serta sarana produksi lainnya.
- Program Penyediaan Benih Bermutu, Pengendalian OPT serta Statistik Pertanian.
Dengan Sasaran pokok meningkatnya penggunaan benih bersertifikat, menurunkan persentase serangan OPT, Tersedianya data dan informasi pertanian yang akurat.
- Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan.

Sasaran pokok Kegiatan adalah meningkatnya jumlah ketersediaan cadangan pangan yang sarannya adalah terpenuhi konsumsi pangan minimal 4.474 kkal/kap/hari. Terpantaunya lumbung pangan (Tersedianya cadangan pangan pada setiap Lumbung). Mendukung pengamanan jumlah stok pangan dalam mendukung ketersediaan pangan dalam waktu yang lama dan tersedia secara berkesinambungan setiap Tahunnya.

- Program Pengembangan Distribusi dan Harga Pangan.
Sasaran pokok kegiatan yaitu meningkatnya ketersediaan data dan informasi distribusi pangan (regional/nasional), harga pangan, Akses pangan daerah, serta BP3K yang berbasis teknologi informasi. Meningkatnya volume ekspor dalam dan luar negeri, meningkatnya kualitas dan akses keuangan pelaku agribisnis.
- Program Penyelenggaraan dan Kerjasama Penyuluhan.
Sasaran pokok kegiatan yaitu meningkatnya kualitas penyuluh dan meningkatkan jumlah petani yang keluar dari garis kemiskinan.
- Program Pemberdayaan ketenagaan Penyuluhan.
Sasaran pokok kegiatan yaitu meningkatnya jumlah penyuluh yang berkualitas dan THL. TB PP. yang berseragam penyuluh,
- Program Pengembangan Perikanan Bididaya.
Sasaran program kegiatan yaitu meningkatnya produktifitas perikanan tangkap dan budidaya serta rumput laut, dengan sasaran menghasilkan produk berkualitas pasar global.
- Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.
Sasaran program kegiatan yaitu meningkatnya produktifitas perikanan yang menghasilkan produk berkualitas ekspor. meningkatnya Nilai produksi dan Nilai ekspor khususnya yang masuk unggulan yang telah mempunyai pasar baik dalam maupun luar negeri.
- Program Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan.
Sasaran pokok Kegiatan adalah mengurangi konsumsi beras perTahun dan perbaikan skor pola pangan harapan.
- Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan.
Sasaran pokok Kegiatan adalah meningkatkan aktifitas ekonomi pada kawasan andalan, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan lainnya.
- Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS.
Sasaran pokok kegiatan adalah terkendalinya luas kawasan hutan, meningkatnya rehabilitasi luasan lahan kritis, dan atau berkurangnya luasan lahan kritis.
- Program Pembinaan dan Pengembangan Desa Mandiri Energi;
Sasaran pokok program kegiatan adalah meningkatnya persentase Ratio Elektrifikasi. Terpenuhinya kebutuhan listrik pada daerah-daerah terpencil.
- Program Pengembangan dan pemasaran Pariwisata;
Sasaran pokok program kegiatan adalah meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan manca Negara maupun wisatawan nusantara (domestic). perlindungan dan pengamanan hutan dan konservasi SDA
- Program Pengembangan Destinasi Wisata .

Sasaran pokok program kegiatan adalah berkembangnya daya saing pariwisata daerah (destinasi unggulan). Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai 5 (lima) besar daerah tujuan wisata terkemuka di Indonesia, sejajar dengan destinasi utama di Indonesia, dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan.

- Program Kerjasama Perdagangan Internasional, dengan Sasaran pokok program kegiatan adalah meningkatnya jumlah partisipasi promosi dalam dan luar negeri (mengikuti even pameran dan promosi investasi)
- Program Penibngkatan dan Pengembangan Nilai Ekport dengan Sasaran pokok program kegiatan adalah meningkatnya Volume dan Niai ekspor, Jumlah layanan sertifikasi mutu dan kalibrasi sesuai standar SNI, ISO 17025-2008, kualitas dan kapasitas ekportir.
- Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Sasaran program kegiatan adalah terpantanya jumlah peredaran komodity strategis (pengendalian impor barang dan jasa), Jumlah pelaksanaan pasar lelang dan system resi gudang.
- Program pengembangan industri Kecil dan Menengah.

Sasaran pokok Kegiatan adalah meningkatnya angka pertumbuhan sektor industri, terbangunnya industri-industri baru, dan meningkatnya pemanfaatan dan penerapan Ilmu pengetahuan dan Teknologi khususnya pada sektor pertanian dengan dukungan pihak dunia usaha dan Pemerintah daerah setempat.

- Program peningkatan kapasitas IPTEK dengan sisten produksi. Sasaran pokok Kegiatan adalah tersedianya prototype alat industri dan TTG serta tersedianya komoditi ekspor yang berdaya saing tinggi dipasaran internasional dan tersedia secara berkesinambungan.
- Program Pengembangan Inovasi Daerah dan Ekonomi Kreatif
Sasaran pokok Kegiatan adalah Meningkatnya pendapatan masyarakat industry kerajinan tangan, Meningkatnya mutu hasil industry kerajinan.

Seluruh program Urusan Wajib untuk mendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan peningkatan rasana dan prasarana wilayah. Program Urusan Pilihan diarahkan untuk mendukung peningkatan pertumbuhan 9 sector PDRB khususnya sector pertanian dan dan Industri pengolahan. Seluruh program prioritas tersebut diatas merupakan program yang sifatnya prioritas utama atau strategis dalam RKPD Tahun 2015. Program Strategis tersebut akan didukung oleh program yang menjadi pendorong percepatan pencapaian terhadap sasaran yang ditargetkan sebelas (11) Perioritas Gubernur Sulawesi Selatan hingga tahun 2018. Seluruh program dan Kegiatan prioritas saling terkait antara satu dengan lainnya dan dijabarkan kedalam bentuk kegiatan pembangunan yang secara rasional dapat dilaksanakan dan dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Demikian juga Strategi KLHS dan PUG akan mewarnai seluruh rangkaian proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang berlandaskan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Untuk efektifitas penggunaan anggaran dan pencapaian sasaran, maka usulan kegiatan Renja-SKPD disusun berdasarkan urutan skala prioritas dan setiap prioritas kegiatan merupakan kegiatan yang mendukung langsung upaya pencapaian indikator sasaran program yang telah ditetapkan baik indikator sasaran dalam RKPD maupun indikator sasaran Renstra masing-masing SKPD.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 memuat arah kebijakan daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan hingga akhir tahun 2015. Untuk mendukung capaian indikator sasaran pembangunan dalam . RKPD, maka Renja setiap SKPD wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Dokumen rencana ini menjadi salah satu pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun sinergitas khususnya lembaga Non Pemerintah dan dunia usaha dalam merencanakan kegiatan pembangunan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

RKPD Tahun 2015 ini pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Sulawesi Selatan. RKPD Tahun ini dimaksudkan agar konsistensi dokumen rencana tahunan (RKPD) setiap tahun tetap terjaga dan tetap nampak berkesinambungan serta tetap tercipta sinergitas dengan arah dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Tahun sebelumnya.

Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dalam mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian sasaran pembangunan Tahun 2015, maka seluruh SKPD wajib menyusun dan menetapkan . Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (. Renja-SKPD) yang mengacu pada RKPD.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menjamin konsistensi dan sinergitas antara . RKPD Kabupaten/ Kota dengan . RKPD Provinsi, serta . Renja SKPD Provinsi tetap memperhatikan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Uraian program dan kegiatan prioritas yang direncanakan setiap SKPD harus terkait dan mendukung secara langsung terhadap pencapaian indikator sasaran setiap prioritas kebijakan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2015.
4. Dalam menyusun program kerja tahunan, seluruh pemangku kepentingan serta dunia usaha agar berkontribusi dalam mendukung capaian target dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam . RKPD Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD dan setiap SKPD berkewajiban melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 ini diharapkan menjadi komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam membangun Sulawesi Selatan lima tahun kedepan sebagai pilar utama pembangunan nasional.

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH., MSi., MH.